



LKjIP

Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah dapat menyelesaikan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun 2022.



SUHATRI BUR, SE, MM
BUPATI PADANG PARIAMAN

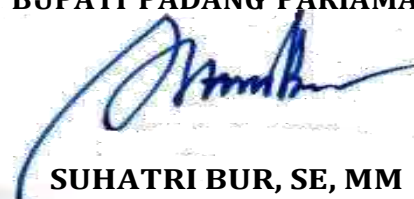
Penyusunan Laporan ini merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk menginformasikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2022. Upaya ini dilakukan sebagai wujud konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Laporan kinerja ini menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran tahun 2022 dalam mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yaitu **“Padang Pariaman Berjaya”**. Lebih lanjut, dokumen ini memuat aspek akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang berisi target dan realisasi belanja keuangan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini dapat bermanfaat bagi semua pihak baik sebagai informasi maupun sebagai evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Parit Malintang, Maret 2023
BUPATI PADANG PARIAMAN

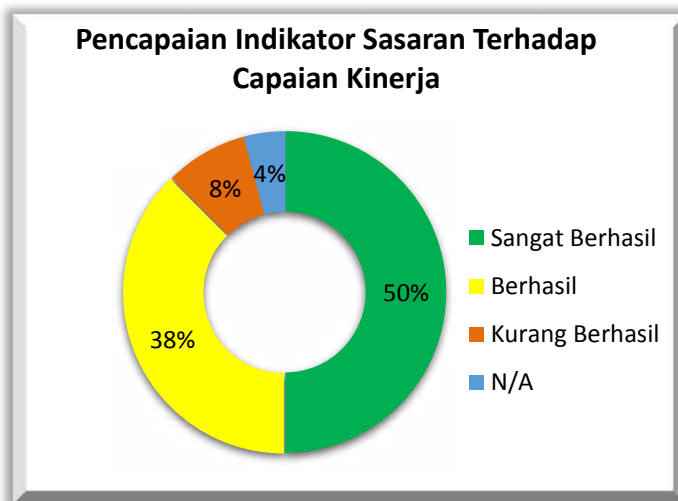


SUHATRI BUR, SE, MM

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah ditetapkan 7 Misi, 8 Tujuan, 19 Sasaran Strategis dan 24 Indikator Kinerja Utama (IKU).



Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja terhadap 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang mana dapat disimpulkan bahwa 12 indikator (50%) dikategorikan Sangat Berhasil, 9 indikator (37,5%) dikategorikan Berhasil, 2 indikator (8,33%) dikategorikan Kurang Berhasil, dan 1 indikator (4,17%) dikategorikan N/A (Data Belum Tersedia). Dari persentase capaian indikator diatas maka didapatkan rata-rata capaian kinerja keseluruhan dari 24 Indikator Kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 94,78% dengan kategori capaian “Berhasil”.

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (20,84%) yang mengalami peningkatan capaian dari kategori “Berhasil” menuju kategori “Sangat Berhasil” pada tahun 2021 ke tahun 2022 ialah : Persentase Ketaatan Terhadap RTRW (102,30%), Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB (101,76%), Tingkat Kemiskinan (110,59%), Tingkat Pengangguran Terbuka (107,69%), dan Indeks Pelayanan Publik (101,97%). Disisi lain, tidak terdapat penurunan pada realisasi capaian IKU tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi capaian IKU tahun 2021.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.


INSPEKTUR
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
HENDRA ASWARA, S.STP,MM.CGCAE
Pembina TK PNP 19810926 199912 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ihtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	x
Daftar Grafik	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.2.1 Kondisi Geografis	2
1.2.2 Demografis	4
1.2.3 Produk Domestik Regional Bruto	6
1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi	7
1.3 Struktur Organisasi	8
1.4 Sumber Daya Manusia	10
1.5 Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1 Visi dan Misi	17
2.1.1 Visi	17
2.1.2 Misi	18
2.1.3 Tujuan dan Sasaran	19
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	21
2.3 Indikator Kinerja Utama	41
2.4 Perjanjian Kinerja	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	46
3.1 Pengukuran Kinerja	46
3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama	47
3.3 Akuntabilitas Keuangan	307
3.4 Prestasi dan Penghargaan	310
BAB IV PENUTUP	314
4.1 Kesimpulan	314
4.2 Rencana Perbaikan Kedepan	316

Lampiran

Daftar Lampiran

1. Pernyataan telah direviu oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman.
2. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kab. Padang Pariaman
3. Perjanjian Kinerja Padang Pariaman Tahun 2022
4. Matriks Pengukuran Kinerja Pemerintah Kab. Padang Pariaman Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	4
Tabel 1.2	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	5
Tabel 1.3	: Jumlah Pegawai Negeri sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	11
Tabel 1.4	: Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022	12
Tabel 2.1	: Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026	20
Tabel 2.2	: Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 – 2026	22
Tabel 2.3	: Indikator Kinerja Utama berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	41
Tabel 2.4	: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman	43
Tabel 3.1	: Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab	44
Tabel 3.2	: Pengukuran dengan Skala ordinal	47
Tabel 3.3	: Realisasi Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	47
Tabel 3.4	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	50
Tabel 3.5	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022	51
Tabel 3.6	: Data Lembaga Penghasil Pendidikan Al-Quran Tahun 2021	54
Tabel 3.7	: Hafiz/Hafizah yang lolos Gebupafa 2022	56

Tabel 3.8	: Data Lembaga Penghasil Hafiz/Hafizhah Tahun 2022	56
Tabel 3.9	: Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022	63
Tabel 3.10	: Perbandingan Realisasi Capaian IKU Tahun 2021 dan Tahun 2022	63
Tabel 3.11	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Indeks Pembangunan Gender	69
Tabel 3.12	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender	69
Tabel 3.13	: Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	71
Tabel 3.14	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sasaran strategis 3	76
Tabel 3.15	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sasaran strategis 3	77
Tabel 3.16	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sasaran strategis 4	81
Tabel 3.17	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sasaran strategis 4	82
Tabel 3.18	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 sasaran strategis 5	86
Tabel 3.19	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sasaran strategis 5	87
Tabel 3.20	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Kontribusi Sektor Pertanian /Perkebunan terhadap PDRB	92
Tabel 3.21	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	92
Tabel 3.22	: Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022	95
Tabel 3.23	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	98

Tabel 3.24	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	99
Tabel 3.25	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	108
Tabel 3.26	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	109
Tabel 3.27	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sasaran strategis 7	114
Tabel 3.28	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sasaran strategis 7	115
Tabel 3.29	: Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	116
Tabel 3.30	: Realisasi Anggaran untuk IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2022	131
Tabel 3.31	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sasaran strategis 8	135
Tabel 3.32	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sasaran strategis 8	136
Tabel 3.33	: Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022	144
Tabel 3.34	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	145
Tabel 3.35	: Capaian Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	154
Tabel 3.36	: Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 & 2022	155
Tabel 3.37	: Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat	155
Tabel 3.38	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 sasaran strategis 11	165

Tabel 3.39	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sasaran strategis 11	166
Tabel 3.40	: Jumlah Kasus-Kasus Hubungan Industrial yang Di Fasilitas	174
Tabel 3.41	: Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	180
Tabel 3.42	: Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021 Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	180
Tabel 3.43	: Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019 s/d 2022	180
Tabel 3.44	: Program dan Kegiatan Pendukung IKU Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022	184
Tabel 3.45	: Penghargaan yang Diterima Tahun 2022	192
Tabel 3.46	: Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Stategis 12 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	194
Tabel 3.47	: Aspek Evaluasi SAKIP	195
Tabel 3.48	: Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	195
Tabel 3.49	: Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021	200
Tabel 3.50	: Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	203
Tabel 3.51	: Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	205
Tabel 3.52	: Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota se-Sumatera Barat	206
Tabel 3.53	: Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022	207
Tabel 3.54	: Predikat Nasional Indeks SPBE	207
Tabel 3.55	: Capaian Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Standar Nasional Tahun 2022	208

Tabel 3.56	: Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 (Domain dan Aspek)	209
Tabel 3.57	: Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022	213
Tabel 3.58	: Capaian Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 sasaran strategis 14	221
Tabel 3.59	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021 sasaran strategis 14	222
Tabel 3.60	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2022 sasaran strategis 14	223
Tabel 3.61	: Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	227
Tabel 3.62	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Usia Harapan Hidup Tahun 2022 dengan Tahun 2021	228
Tabel 3.63	: Inovasi-Inovasi Pada Puskesmas	254
Tabel 3.64	: Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	262
Tabel 3.65	: Perbandingan Target dan Realisasi LPP Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022	263
Tabel 3.66	: Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2022	275
Tabel 3.67	: Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2022	276
Tabel 3.68	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022	280

Tabel 3.69	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan 2022	281
Tabel 3.70	Daftar Nagari Tangguh Bencana yang Ada di Kabupaten Padang Pariaman	285
Tabel 3.71	Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU pada sasaran strategis 18	288
Tabel 3.72	Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022 pada sasaran strategis 19	294
Tabel 3.73	Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target dan Realisasi Tahun 2021 pada sasaran strategis 19	294
Tabel 3.74	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022	307
Tabel 3.75	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022	307
Tabel 3.76	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022	308
Tabel 3.77	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022	309
Tabel 3.78	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	309

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	:	Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman	3
Gambar 1.2	:	Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman	10
Gambar 3.1	:	Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran	52
Gambar 3.2	:	Kegiatan pemberian Beasiswa kepada hafizh/hafizhah	61
Gambar 3.3	:	Melakukan Penindakan dan Penertiban Pelajar yang berkeliaran di Luar Jam Belajar	66
Gambar 3.4	:	Melakukan Penindakan dan Penertiban Balap Liar	66
Gambar 3.5	:	Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkda Nomor Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040	67
Gambar 3.6	:	Melakukan Penindakan dan Penertiban Penyakit Masyarakat Pelanggaran Perda Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penindakan Pencegahan dan Penyakit Masyarakat	67
Gambar 3.7	:	Penerimaan Penghargaan KLA Tingkat Pratama	74
Gambar 3.8	:	Launching Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak	74
Gambar 3.9	:	Penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya	75
Gambar 3.10	:	Rehabilitasi Jalan Simpang Kayu Tanam – Lubuk Simantuang	79
Gambar 3.11	:	Rehabilitasi Jalan Simpang Sintuak – Simpang Pakandangan	80
Gambar 3.12	:	Rehabilitasi Jembatan Lubuk Napa Kecamatan Padang Sago	80
Gambar 3.13	:	Rehabilitasi Daerah Irigasi Alahan Tabek Sikucur	84
Gambar 3.14	:	Rehabilitasi Daerah Irigasi Kampung Manggis Barangan	84
Gambar 3.15	:	Rehabilitasi Daerah Irigasi Tantabek Kecamatan IV Koto Aur Malintang	85
Gambar 3.16	:	Rehabilitasi Daerah Irigasi Duku Sp. 1 Kecamatan Sungai Limau	85
Gambar 3.17	:	Rehabilitasi Daerah Irigasi Kasang Kecamatan Batang Anai	85
Gambar 3.18	:	Peninjauan Lapangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	89

Gambar 3.19	:	Rapat Lintas Sektirial Oleh Kemeterian ATR/BPN Tentang Penyusunan RDTR Rencana Detil Tata Ruang	90
Gambar 3.20	:	Piagam Penghargaan Peringkat 1 Penyuluh Pertanian PNS Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat	98
Gambar 3.21	:	Pemantauan ke Sejumlah Pasar di Kabupaten Padang Pariaman	101
Gambar 3.22	:	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	102
Gambar 3.23	:	Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dalam Rangka Survei ke Kios Pupuk	103
Gambar 3.24	:	Survei Komoditi Ekspor/Pinang	104
Gambar 3.25	:	Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	105
Gambar 3.26	:	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	106
Gambar 3.27	:	Penghargaan Juara III Lomba Pasar Tingkat Provinsi Sumatera Barat	107
Gambar 3.28	:	Penghargaan Juara III Lomba Booth Creative Pada Acara Minang Crev	107
Gambar 3.29	:	Penghargaan Juara I Enumerator Terbanyak Provinsi Sumatera Barat	108
Gambar 3.30	:	Kunjungan Kelapangan Tentang Produk Olahan	111
Gambar 3.31	:	Pembinaan IKM melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Managemen Kewirausahaan	111
Gambar 3.32	:	Inovasi Please Care PAPA dan Duyan Baso	117
Gambar 3.33	:	Penyerahan Bantuan Sembako oleh Ketua LKKS	118
Gambar 3.34	:	Penyaluran Jaminan Sosial Keluarga pada KPM PKH	118
Gambar 3.35	:	Penyaluran BLT BBM	119
Gambar 3.36	:	Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia	120
Gambar 3.37	:	Penyerahan bantuan bahan makanan dan logistik oleh Bupati Padang Pariaman untuk Pondok Pesantren Nurul Yaqin yang ditimpa Bencana Kebakaran	121
Gambar 3.38	:	Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik pada Korban Bencana Longsor di V Koto Kampung Dalam	121

Gambar 3.39	:	TAGANA Kabupaten Padang Pariaman meraih Juara III dalam Lomba Manajemen Dapur Umum pada Apel Siaga Bencana Provinsi Sumatera Barat	122
Gambar 3.40	:	Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait tentang Persiapan Acara Bazar Penyediaan Komoditas Pangan pada tanggal 29 November 2022 di Ruangan LPSE Kantor Bupati Padang Pariaman	140
Gambar 3.41		Survei Harga Pasar	140
Gambar 3.42		Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar Yang Ada di Kabupaten Padang Pariaman	141
Gambar 3.43		Sosialisasi Insilite	150
Gambar 3.44		Layanan Perpustakaan Daerah	150
Gambar 3.45		Layanan Perpustakaan Keliling	151
Gambar 3.46		Lomba Perpustakaan Nagari	151
Gambar 3.47		Pelatihan Budi Daya Jamur Implementasi Program TPBIS	151
Gambar 3.48		Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Padang Pariaman	152
Gambar 3.49		Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Daerah	152
Gambar 3.50		Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Dapodik di lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2022	158
Gambar 3.51		Proses pembelajaran Paket B di PKBM Delima Bandara	159
Gambar 3.52		Monitoring Dan Pengawasan Pembangunan Ruang kelas di Satuan Pendidikan SD yang berasal dari dana DAK tahun 2022	160
Gambar 3.53		Penghargaan PIP Terbaik 3 Tingkat Sumbar	162
Gambar 3.54		Prestasi Hafizh/Hafizhah Penghafal Al-Qur'an	163
Gambar 3.55		Pelatihan di BLK, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	170
Gambar 3.56		Serah Terima Mesin Jahit	170
Gambar 3.57		Monev ke LPKS Permata Bangsa Sumatera Barat di pasar usang Batang Anai Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	170
Gambar 3.58		Koordinasi Dengan Perusahaan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia	171
Gambar 3.59		Pelayanan AK-1 Para Pencari Kerja Didaftarkan Melalui Aplikasi Sisnaker Kementerian Ketenagakerjaan	172

Gambar 3.60	Monitoring tentang Tata tertib Administrasi Bidang Hubungan Industrial dan Update Data Perusahaan ke Perusahaan PT. Agrimita Persada	173
Gambar 3.61	Monitoring tentang Update Data Perusahaan ke PT.Bumi Sarimas Indonesia dan PT.Usaha Inti Padang	173
Gambar 3.62	Penyerahan Uang Duka dan Sembako Secara Simbolis Pada Acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan	174
Gambar 3.63	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	176
Gambar 3.64	Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	176
Gambar 3.65	Penyerahan Piagam Opini WTP	187
Gambar 3.66	Pembukaan Rekonsiliasi Dana BOS di Hall Saiyo Padang	187
Gambar 3.67	Saat Penginputan RAK di Hall BPKD	188
Gambar 3.68	Penerimaan Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Pengelolaan Dana Desa Terbaik Pertama dari Kementerian Keuangan	188
Gambar 3.69	Pada Saat Acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	189
Gambar 3.70	FGD Penyusunan PPBR BPKD dengan Tim Inspektorat	189
Gambar 3.71	Penginputan RAK di Hall Saiyo Sakato	189
Gambar 3.72	Rekonsiliasi Dana BOS	190
Gambar 3.73	Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	190
Gambar 3.74	Penghapusan Barang Milik Daerah	191
Gambar 3.75	Pemusnahan Barang Milik Daerah	191
Gambar 3.76	Inventarisasi Barang Milik Daerah	191
Gambar 3.77	Entry Meeting SAKIP Tahun 2022	193
Gambar 3.78	Evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2022 oleh KemenPANRB	197
Gambar 3.79	Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan oleh Inspektorat Tahun 2022	197

Gambar 3.80	Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Inspektorat Tahun 2022	198
Gambar 3.81	Evaluasi SAKIP DPMPTP oleh Inspektorat Tahun 2022	198
Gambar 3.82	Reviu LPPD	202
Gambar 3.83	Workshop Penyusunan LPPD	202
Gambar 3.84	Finalisasi Penyusunan LPPD	202
Gambar 3.85	Aplikasi SILPPD	204
Gambar 3.86	Piagam Penghargaan Terkait Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman	204
Gambar 3.87	Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan pemateri Bapak Hamza Fansur, S.Kom, M.sc dari Kementerian PANRB	216
Gambar 3.88	Studi Komparasi Penggunaan Aplikasi Srikandi	216
Gambar 3.89	Pelaksanaan pelatihan penggunaan dan pengelolaan teknis Command Center	216
Gambar 3.90	Bimtek Literasi Digital UMKM Se-Sumatera Barat Tahun 2022	217
Gambar 3.91	Bimtek Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Se-Sumatera Barat Tahun 2022	217
Gambar 3.92	Coaching Clinic Peyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	218
Gambar 3.93	Studi Tiru SPBE dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Republik KOREA Selatan, bersama Korean Kenaf Group (KKG) tahhun 2022	218
Gambar 3.94	MOU Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan PT ICON Net+	219
Gambar 3.95	Ruangan Command Center dan Digital Lounge, sebagai pendukung layanan IT yang terintegrasi se-Kabupaten Padang Pariaman	219
Gambar 3.96	Penghargaan sebagai peserta Gerakan Menuju 100 Smart City untuk dimensi Smart Branding Tahun 2021	220
Gambar 3.97	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Achievement Motivation Person dan Anugerah Buka Award tahun 2022	220
Gambar 3.98	Publikasi Hasil SKM dan Penandatanganan Janji Perbaiki Layanan Serta Forum Konsultasi Publik	224
Gambar 3.99	Penganugerahan Penghargaan Pelayanan Publik	226

Gambar 3.100	Pemeriksaan dan Skrening HIV pada Pasien TBC	230
Gambar 3.101	Pelacakan Kasus TBC	231
Gambar 3.102	Investigasi Kontak TBC	232
Gambar 3.103	Validasi Data TBC	232
Gambar 3.104	Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	233
Gambar 3.105	Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)	234
Gambar 3.106	Deteksi Dini Kusta	235
Gambar 3.107	Kegiatan Fogging	237
Gambar 3.108	3M Plus	237
Gambar 3.109	Pemeriksaan Ibu Hamil KEK	238
Gambar 3.110	Ibu Hamil yang mendapatkan TTD Min 90 Tablet	239
Gambar 3.111	Pemberian Vitamin A pada Bayi Usia 6-59 Bulan	239
Gambar 3.112	Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi 9	240
Gambar 3.113	Kunjungan Rumah untuk Mengetahui Permasalahan Kesehatan yang Ada di Masyarakat	241
Gambar 3.114	Kegiatan Posyandu	242
Gambar 3.115	Implementasi Germas	242
Gambar 3.116	Piagam Penghargaan Harapan III dari Kementerian Kesehatan RI	244
Gambar 3.117	Piagam Penghargaan NPAFP dari Kementerian Kesehatan RI	244
Gambar 3.118	Penghargaan dari Bupati Kabupaten Padang Pariaman kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2022	245
Gambar 3.119	Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara II Lomba Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri	245
Gambar 3.120	Penghargaan Bupati Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Predikat AA SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021	246
Gambar 3.121	Penghargaan Bupati Bupati Padang Pariaman sebagai Daerah Inovatif Ke-3 Tahun 2021 dan Tahun 2022	247
Gambar 3.122	Kegiatan Gerakan Gemar Makan Ikan	250
Gambar 3.123	IBU CANTIK (Ikuti Buka Cermati Buku KIA Pilihan Ibu Bijak)	251
Gambar 3.124	GEMOI CANTIK PAPA (GERakan Pemeriksaan Calon Pengantin Cegah Penyakit Infeksi Menular Seksual Padang Pariaman)	252

Gambar 3.125	Pemberian Pelayanan KB, Penyediaan Tenaga Pelaksana KB, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan KB	265
Gambar 3.126	Sosialisasi pentingnya untuk melaksanakan KB terutama Metoda Operasi Pria (MOP)	266
Gambar 3.127	Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB	266
Gambar 3.128	Tim penggerak PKK Kabupaten Menggerakkan Masyarakat untuk Aktif Ber-Kb	267
Gambar 3.129	Pemilihan Genre Kabupaten Padang Pariaman	268
Gambar 3.130	Bina Keluarga Remaja	269
Gambar 3.131	Penghargaan dari BKKBN Pusat Favorit Duta GenRe Indonesia Putera 2022	272
Gambar 3.132	Penghargaan Ayah Bunda GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	272
Gambar 3.133	Penghargaan Kabupaten terbaik 1 pengelolaan UPPKA Tingkat Provinsi Sumatera Barat	273
Gambar 3.134	Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Runner Up 2 Duta GenRe Putra Sumatera Barat Tahun 2022	273
Gambar 3.135	Pembangunan Jaringan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Pedesaan	278
Gambar 3.136	Proses Pembentukan Nagari Tangguh Bencana	283
Gambar 3.137	Proses Pembentukan Nagari Tangguh Bencana	284
Gambar 1.138	Pembentukan Desa Tangguh Bencana	290
Gambar 3.139	Kegiatan Sosialisasi SI SIGAB	290
Gambar 3.140	Kegiatan Program LENCANA	291
Gambar 3.141	Aplikasi SIAP AMAN	291
Gambar 3.142	Pusat Pelaporan Siaga Darurat Bencana	292
Gambar 3.143	Aplikasi SIMUNA	292
Gambar 3.144	Website PUSDAKA	293
Gambar 3.145	Pengelolaan Sentra IKM Coklat Malibau Anai lokasi Nagari Guguak Kec. 2x11 Kayu Tanam	297
Gambar 3.146	Dermaga Wisata Muara Anai	298
Gambar 3.147	Wisata Alam (Resort) dan Real Estate/Perhotelan/Convention Hall	298
Gambar 3.148	Tambak Udang Vaname	298

Gambar 3.149	Wisata Tiram	299
Gambar 3.150	Piagam Penghargaan DPM-PTSP Kabupaten Padang Pariaman sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima	303
Gambar 3.151	Penyerahan Piagam Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Tahun 2022	304
Gambar 3.152	Penyerahan Piagam Oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022	304
Gambar 3.153	Penyerahan Piagam Hasil Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	305
Gambar 3.154	Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko	305
Gambar 3.155	Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengimputan LKPM	306
Gambar 3.156	Pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam pengurusan izin dan peralihan aplikasi terkait LKPM	306

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	: Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2022	5
Grafik 1.2	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2022	6
Grafik 1.3	: Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman Atas Harga Konstan Tahun 2016-2022	6
Grafik 1.4	: Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 – 2022	8
Grafik 3.1	: Capaian Kinerja Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten dibandingkan dengan Capaian Provinsi Tahun 2022	64
Grafik 3.2	: Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022	70
Grafik 3.3	: Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2022	93
Grafik 3.4	: Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Tahun 2022	100
Grafik 3.5	: Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2022	110
Grafik 3.6	: Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 dan Target 2022	115
Grafik 3.7	: Perbandingan Capaian IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022	116
Grafik 3.8	: Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/Income Per Kapita	136

Grafik 3.9	: Capaian Kinerja IPLM Kabupaten dibandingkan Capaian Provinsi dan Capaian Nasional Tahun 2022	145
Grafik 3.10	: Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022	156
Grafik 3.11	: Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2022	157
Grafik 3.12	: Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021	166
Grafik 3.13	: Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2022	167
Grafik 3.14	: Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022	228
Grafik 3.15	: Capaian UHH 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022	229
Grafik 3.16	: Perbandingan Realisasi LPP Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022	263
Grafik 3.17	: Capaian Realisasi Kinerja Nagari Tangguh Bencana	281
Grafik 3.18	: Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022	282
Grafik 3.19	: Peningkatan Investasi Daerah	295



BAB I
PENDAHULUAN

padang-pariaman
berjaya!

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Good Governance and Clean Government merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal ini selaras dengan amanat Pasal 58 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas.



Foto : Bupati Padang Pariaman Memberikan Beasiswa Kepada Hafizh / Hafizhah

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi adalah adanya kewajiban setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Laporan Kinerja tahunan secara periodik.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Bupati/ Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan pemerintah Kabupaten/ Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Menindaklanjuti amanat peraturan perundangan tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dengan bertitik tolak pada Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 dimaksudkan untuk menjelaskan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman atas pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan serta dikaitkan dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Sebagai media komunikasi atas kinerja yang telah dilaksanakan kepada para stakeholder maka penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Padang Pariaman ini memiliki 2 (dua) dimensi fungsi, yaitu :

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja (dimensi eksternal), aspek ini bermakna bahwa Laporan Kinerja merupakan sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada seluruh pihak eksternal (stakeholder) atas capaian kinerja selama periode tahun 2022. Keberadaan LKjIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah terkait di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman. Esensi laporan capaian kinerja merujuk sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran selama periode pelaporan.
- 2) Aspek Manajemen Kinerja (dimensi internal), aspek ini bermakna bahwa Laporan Kinerja Kabupaten Padang Pariaman merupakan sarana evaluasi pencapaian kinerja bagi segenap aparatur Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sebagai landasan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Padang Pariaman secara geografis memiliki luas wilayah 1.343,09 Km² dengan panjang garis pantai 42,11 Km yang membentang hingga wilayah gugusan Bukit Barisan. Luas daratan daerah ini setara dengan 3,2 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Barat. Wilayah Kabupaten Padang Pariaman terletak pada ketinggian 0 -1925 m dari permukaan laut. Posisi astronomis Kabupaten Padang Pariaman terletak antara 0°19' 15,68" - 0° 48'

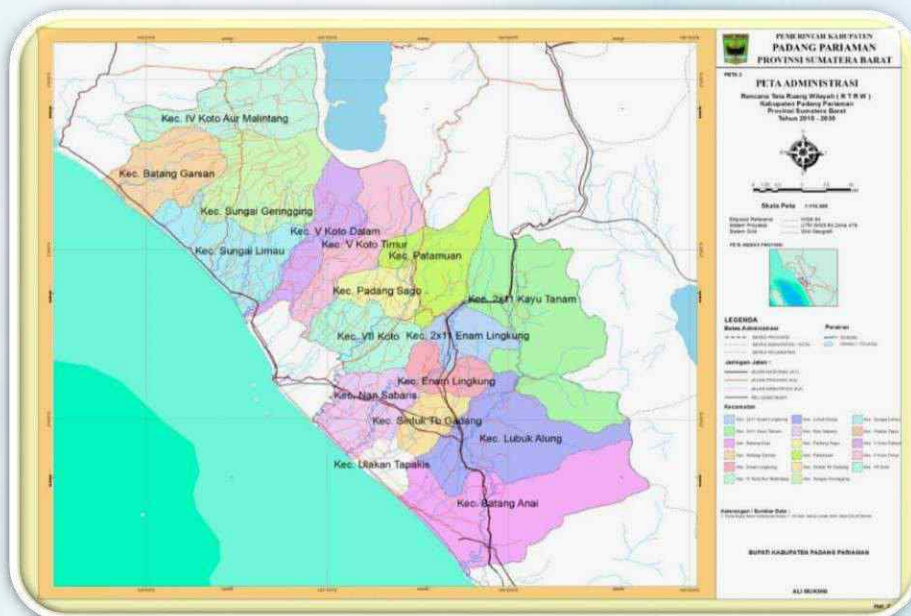
59,868” Lintang Selatan (LS) dan 99° 57’ 43,325”-100° 27’ 28,94” Bujur Timur (BT).

Secara administrasi Kabupaten Padang Pariaman memiliki batas wilayah administratif, yaitu :

- Sebelah Utara : Kabupaten Agam
- Sebelah Selatan : Kota Padang
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kota Pariaman dan Samudera Indonesia

Rata-rata suhu udara di Padang Pariaman berkisar 26,0 °C dan rata-rata kelembaban udara yang tertinggi yaitu 85,0 % dengan tekanan udara rata-rata berkisar 995,8 mb. Sedangkan rata-rata suhu maksimum 31.080 C dan rata-rata suhu minimum yaitu 21.340 C.

Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Peta RTRW Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

Berdasarkan data BPS, rata-rata curah hujan tercatat 4,678 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 246 hari dalam 1 tahun. Dilihat dari topografi wilayah, Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari wilayah daratan pada daratan Pulau Sumatera dan 6 pulau-pulau kecil, dengan 40 % daratan rendah yaitu pada bagian barat yang mengarah ke pantai.

Daerah dataran rendah terdapat disebelah barat yang terhampar sepanjang pantai dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan laut, serta 60% daerah bagian timur yang merupakan daerah bergelombang sampai ke Bukit Barisan. Daerah bukit bergelombang terdapat disebelah timur dengan ketinggian 10 - 1000 meter di atas permukaan laut.

Kabupaten Padang Pariaman termasuk beriklim tropis besar yang memiliki musim kering yang sangat pendek dan daerah lautan sangat dipengaruhi oleh angin laut. Rata-rata curah hujan secara keseluruhan untuk Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2021 adalah sebesar 288 milibar (mb), dengan rata-rata hari hujan sebanyak 15 hari per bulan. Temperatur rata-rata untuk Kabupaten Padang Pariaman adalah 26,0 °C dengan kelembaban relatif 87 persen dan tekanan udara rata-rata 995,8 milibar. Kabupaten Padang Pariaman sampai tahun 2022 memiliki 17 Kecamatan, dan 103 nagari sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/453/PEM-2016 tanggal 26 Mei 2016. Luas wilayah dan jumlah nagari setiap kecamatan berbeda- beda.

Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam merupakan Kecamatan dengan wilayah terluas yakni 188,55 Km² sedangkan Kecamatan Ulakan Tapakis merupakan kecamatan dengan luas terkecil, yakni 23,01 Km². Kecamatan yang paling banyak memiliki nagari adalah Kecamatan VII Koto dengan 12 (dua belas) nagari, sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki nagari adalah Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung dan Batang Gasan yang masing-masing hanya terdiri dari 3 (tiga) nagari.

1.2.2 Kondisi Demografis

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Data ini akan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola pemukiman penduduk dan struktur ruang daerah. Jumlah penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah 447.170 jiwa yang terdiri dari 223.792 jiwa laki-laki dan 223.378 jiwa perempuan. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 438.022 jiwa yang terdiri dari 218.717 jiwa laki-laki dan 219.305 jiwa perempuan. Penyebaran jumlah penduduk bervariasi setiap kecamatannya.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Lubuk Alung	24.520	24.047	48.567
2	Batang Anai	27.368	26.874	54.242
3	Nan Sabaris	15.455	15.737	31.192
4	2 x 11 Kayu Tanam	14.611	14.559	29.170
5	VII Koto Sungai Sarik	18.638	18.864	37.498
6	V Koto Kampung Dalam	12.363	12.133	24.496
7	Sungai Geringging	16.618	16.602	33.220

8	Sungai Limau	15.480	15.210	30.690
9	IV Koto Aur Malintang	10.822	11.034	21.856
10	Ulakan Tapakis	10.705	10.578	21.283
11.	Sintuak Toboh Gadang	10.136	10.277	20.413
12.	Padang Sago	4.503	4.733	9.236
13.	Batang Gasan	5.953	5.731	11.684
14.	V Koto Timur	7.701	7.674	15.375
15.	2 x 11 Enam Lingkung	9.518	9.747	19.265
16.	Patamuan	8.989	9.061	18.050
17.	Enam Lingkung	10.416	10.517	20.933
JUMLAH		223.792	223.378	447.170

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

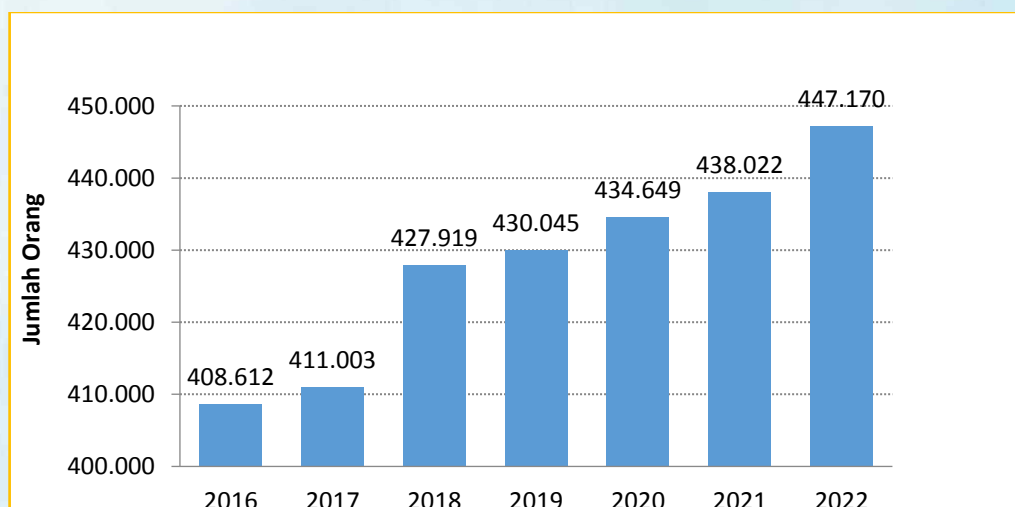
Jika dilihat tren perkembangan penduduk 5 tahun terakhir diketahui bahwa penduduk Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan tren peningkatan dari 427.919 tahun 2018 menjadi 447.170 pada tahun 2022. Untuk laju perkembangan penduduk Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagaimana tabel 1.2.

Tabel 1.2
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Tahun	Penduduk			Sex Rasio	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
2018	213.647	214.272	427.919	99,70	322
2019	214.251	215.794	430.045	99,28	323
2020	216.961	217.688	434.649	99,66	320
2021	218.717	219.305	438.022	99,73	322
2022	223.792	223.378	447.170	100,1	332

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2022

Grafik 1.1
Perkembangan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2022



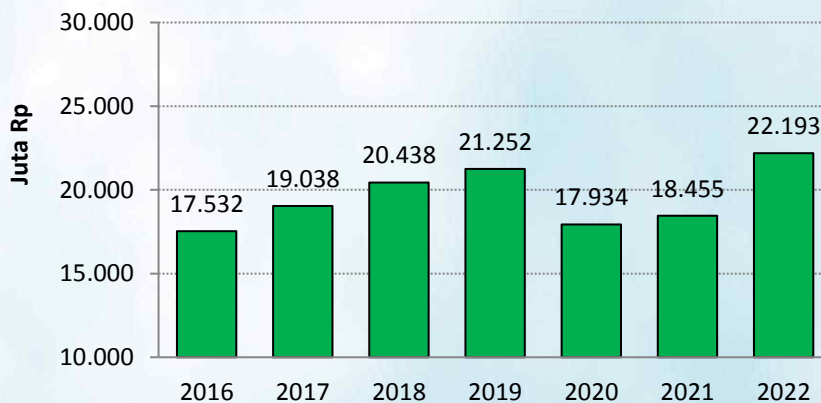
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2022

1.2.3 Produk Domestik Regional

Produk Domestik Regional Bruto menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Dalam penyusunan PDRB dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

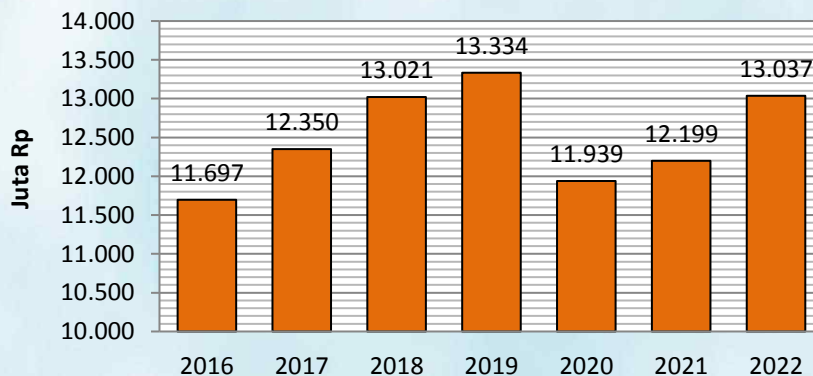
Nilai PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat dari grafik sebagai berikut :

Grafik 1.2
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Berlaku Tahun 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Grafik 1.3
Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman
Atas Harga Konstan Tahun 2016-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan harga konstan mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020 perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan harga konstan mengalami penurunan. Lalu pada tahun 2021 dan tahun 2022 perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku dan harga konstan mengalami kenaikan kembali sesuai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman. Perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga berlaku mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.738.000 (pembulatan), sedangkan perkembangan PDRB Kabupaten Padang Pariaman atas harga konstan mengalami peningkatan juga sebesar Rp. 838.000 (pembulatan).



Foto : Penyerahan proposal pengembangan pasar rakyat oleh Bupati Padang Pariaman ke Kementerian Perdagangan RI

1.2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Laju dari pertumbuhan ekonomi ini dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

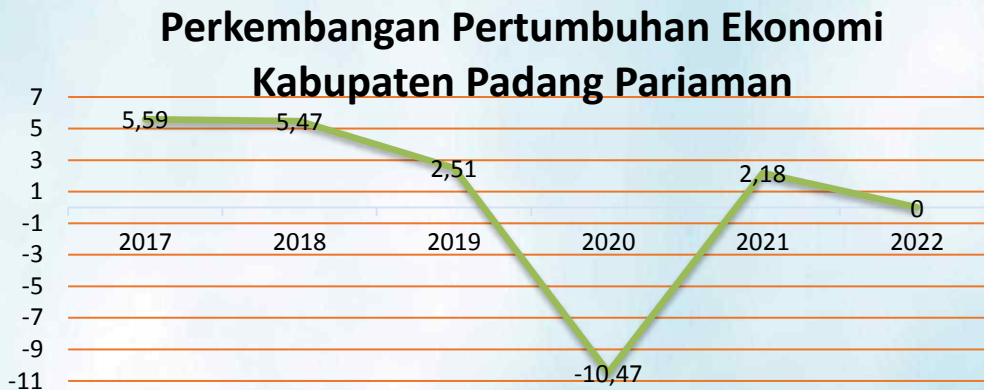
Peranan PDRB pada tahun 2022 menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Pariaman atas Harga Berlaku didominasi oleh :

- Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 21,37% ;
- Kategori Transportasi dan Pergudangan 19,34% ;
- Kategori Industri Pengolahan 10,92%,
- Kategori Perdagangan Besar dan Eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,44% ;
- Kategori Kontruksi 9,82% ;
- Kategori Pertambangan dan Penggalian 6,71%.

Peranan PDRB pada tahun 2022 menurut lapangan usaha di Kabupaten Padang Pariaman atas Harga Konstan didominasi oleh :

- Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 31,41 % ;
- Kategori Transportasi dan Pergudangan 24,26% ;
- Kategori Jasa Perusahaan 7,24% ;
- Kategori Jasa Lainnya 11,72%.

Grafik 1.4
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 – 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman, 2022

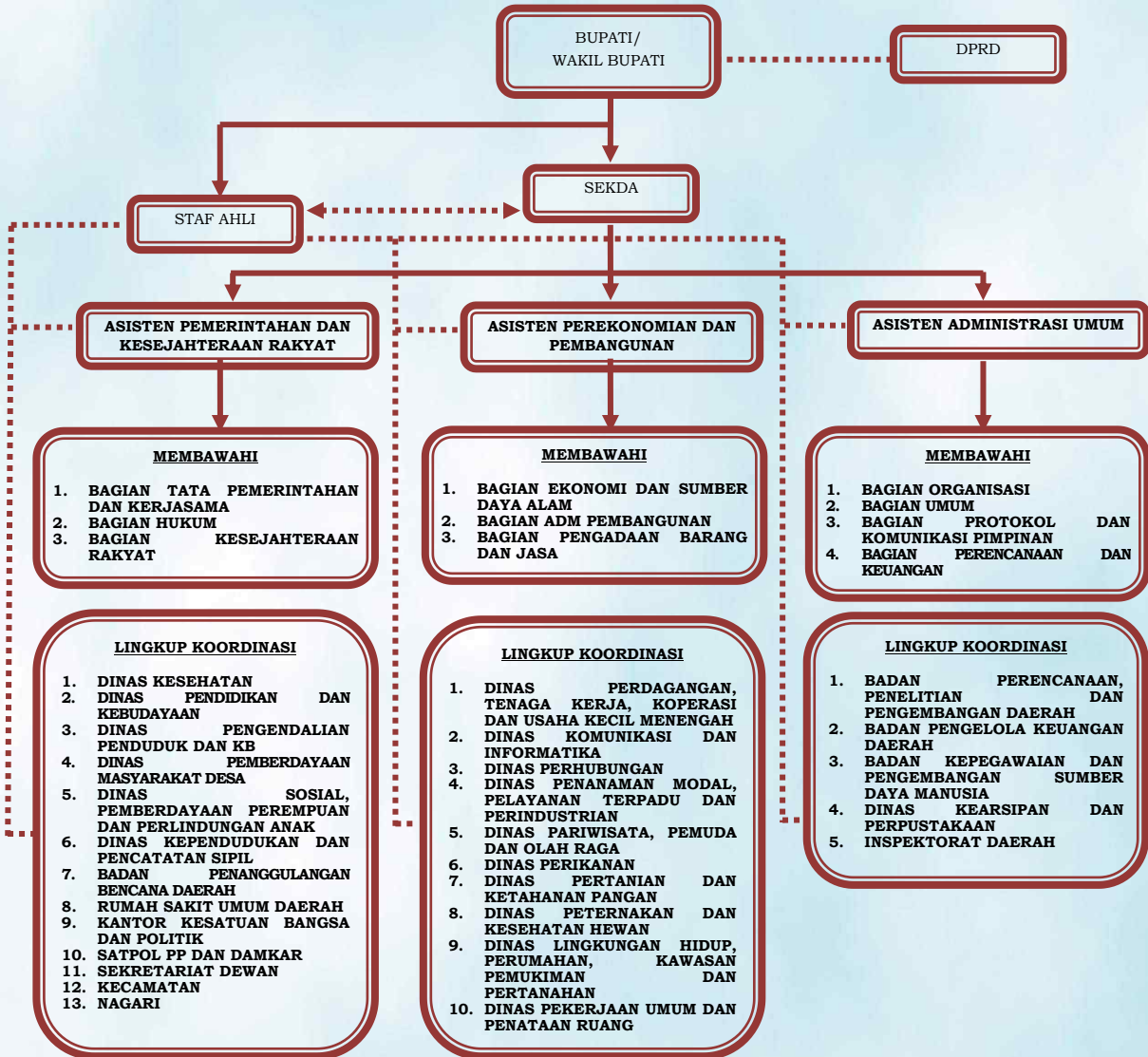
1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki struktur organisasi yang mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dibantu oleh :
 - Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - Bagian Hukum
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dibantu oleh :
 - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - c. Asisten Administrasi Umum dibantu oleh :
 - Bagian Umum
 - Bagian Organisasi
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan

- d. Staf Ahli terdiri dari :
 - Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan
 - Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Sumber Daya Manusia
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh terdiri dari :
 - a. Bagian Fasilitasi Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
 - b. Bagian Umum
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan
3. Inspektorat
4. Badan Daerah, terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - d. Dinas Perhubungan
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - g. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 - h. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM
 - i. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu dan Perindustrian
 - j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - k. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - m. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 - n. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - o. Dinas Perikanan
 - p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8. 17 (Tujuh Belas) Kecamatan dan 103 Nagari.

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : *Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022*

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas sangat menentukan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang sebanyak 5.435 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.424 orang (26,20%) dan perempuan sebanyak 4.011 orang (73,80%).

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	SD/Sederajat	6	3	9
2.	SLTP/Sederajat	29	4	33
3.	SLTA/Sederajat	224	135	359
4.	Diploma I	3	18	21
5.	Diploma II	32	107	139
6.	Diploma III	78	688	766
7.	Diploma IV/Strata I	867	2.851	3.718
8.	Strata II	184	205	389
9.	Strata III	1	0	1
Jumlah		1.424	4.011	5.435

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas diketahui bahwa PNS di Kabupaten Padang Pariaman sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Diploma IV/Strata I dengan jumlah 3.718 orang (68,40%), diikuti Diploma III sebanyak 766 orang (14,09%) dan Strata II sebanyak 389 orang (7,16%). Tingkat pendidikan PNS ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Secara umum, kualitas PNS di Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup baik dengan banyaknya PNS yang berpendidikan di atas SLTA sederajat mencapai 5.034 orang (92,26%).

1.5 ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. RPJMD 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan 5 Tahunan akan dijabarkan pada perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Adapun isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dalam RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
1.	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada sektor perdagangan dan industri kecil/menengah.	Pemberdayaan UKM, Industri Kecil Menengah, Koprasidan pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri
		Mengembangkan Industri pengolahan berbasis komoditi unggulan
		Pemerataan ekonomi
		Kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal
		Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
		Peningkatan kapasitas pelatihan kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru
		Peningkatan kesempatan berusaha
		Peningkatan kegiatan ekonomi produktif
		Peningkatan jiwa kewirausahaan
2.	Peningkatan Potensi sektor Pariwisata Unggulan, Ekonomi Kreatif dan investasi daerah.	Kemudahan berinvestasi di daerah
		Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah
		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta optimalisasi perlindungan konsumen
		Mengembangkan investasi yang sesuai dengan potensi sumber daya daerah
		Mengembangkan Destinasi Wisata yang layak
		Meningkatkan kompetensi peran pelaku wisata
3.	Peningkatan Produktifitas sektor pertanian, peternakan dan perikanan	Peningkatan pelaku ekonomi kreatif
		Upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi komoditas pangan daerah
		Peningkatan produksi komoditi unggulan
		Peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan
		Meningkatkan sarana dan Prasarana produksi pertanian
		Meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi unggulan daerah
		Daya saing produk pertanian relatif masih rendah
		Belum berkembangnya nilai tambah produk pertanian
		Produktivitas, pertanian, perkebunan dan populasi peternakan dan perikanan masih perlu peningkatan
		Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, pemasaran dan permodalan terbatas
Konsumsi ikan masyarakat masih potensial untuk Ditingkatkan		

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		<p>Kualitas SDM (nelayan dan pembudidaya ikan) yang masih perlu ditingkatkan</p> <p>Kurangnya kapasitas kelembagaan produksi dan pemasaran</p>
<p>4.</p>	<p>Meningkatkan tata kehidupan masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah.</p>	<p>Upaya peningkatan kualitas dan pengelolaan pendidikan agama</p> <p>Upaya peningkatan peran lembaga sosial keagamaan</p> <p>Peran aktif lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama di daerah</p> <p>Peningkatan kerukunan Dalam Kelompok Masyarakat dalam upaya menjaga dan mempertahankan tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat</p> <p>Pengembangan dan pelestarian budaya daerah</p> <p>Belum optimalnya pengembangan seni dan budaya</p> <p>Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga keagamaan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran agama</p> <p>Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan social</p> <p>Masih rentannya karakter masyarakat terutama pemuda dipengaruhi oleh budaya asing dan pergaulan bebas dan narkoba</p>
<p>5.</p>	<p>Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia berakhlak mulia ,sehat, unggul dan berdaya saing.</p>	<p>Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing</p> <p>Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Padang Pariaman</p> <p>Peningkatan Profesional dan kuantitas guru sebagai Pendidik</p> <p>Belum tuntasnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>Peningkatan profesional pengelola & kualitas manajemen pendidikan</p> <p>Belum optimalnya penduduk usia sekolah yangmendapatkan layanan pendidikan</p> <p>Ketimpangan distribusi guru di beberapa wilayah.</p> <p>Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</p> <p>Meningkatnya prestasi olahraga</p> <p>Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana serta keluarg sejahtera yang berwawasan kependudukan</p>
<p>6.</p>	<p>Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana publik yang berkualitas berbasis lingkungan dan tata ruang.</p>	<p>Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan</p> <p>Pengembangan daerah baru yang strategis</p> <p>Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan danjembatan</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi</p> <p>Peningkatan akses Universal</p>

No.	Prioritas Pembangunan Kab. Padang Pariaman Tahun 2022	Isu Strategis dan Permasalahan Daerah
		Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
		Mengembangkan Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis
		Meningkatkan kualitas perencanaan ruang
7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, efektif dan Profesional.	Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
		Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah
		Meningkatkan kualitas manajemen keuangan daerah
		Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah
		Peningkatan kualitas pelayanan publik
		Pengembangan e-gov dan implementasi smart city Kabupaten Padang Pariaman
8.	Peningkatan Pelayanan Dasar dan mewujudkan kemandirian masyarakat tangguh bencana.	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan
		Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan
		Permasalahan Penanggulangan HIV/AIDS
		Pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal
		Masih kurangnya sarana dan prasarana Rumah Sakit
		Tingginya status gizi buruk masyarakat dan prevalensi balita pendek belum dapat dikendalikan secara maksimal (Stunting)
		Pengelolaan abrasi pantai
		Kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan kebencanaan
		Pengembangan Nagari Tangguh bencana
		Peningkatan penanganan siaga tanggap darurat
		Optimalisasi pemulihan kawasan pasca bencana
		Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan
		Perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk menurunkan jumlah penduduk miskin
		penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif

Sumber : RKPD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

1.5.2 Permasalahan Pembangunan

Pada pelaksanaan pembangunan periode 2016-2021 masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Hal tersebut menjadi bahan analisa dalam merumuskan isu strategis perencanaan dan prioritas permasalahan pembangunan pada awal pelaksanaan RPJMD periode 2021-2026. Beberapa prioritas permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman pada RKPD tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor- sektor ekonomi potensi lokal dan strategis dimana laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan.
2. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dimana IPM Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi Sumbar (Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman masih dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi, Angka Harapan Hidup dibawah rata-rata Nasional dan Propinsi).
3. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Melambatnya penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.
5. Angka sanitasi layak Kabupaten Padang Pariaman yang masih dibawah Propinsi Sumatera Barat.
6. Angka air minum layak Kabupaten Padang Pariaman yang masih dibawah Propinsi Sumatera Barat.
7. Upaya meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif.
8. Upaya menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas.
9. Meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia agar dapat bersaing dipasar global, kualitas produk hasil olahan belum berdaya saing dan masih berorientasi lokal.
10. Perlunya penguatan agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan.
11. Peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
12. Pembangunan infrastruktur lebih memperhatikan fungsi lingkungan.
13. Kemudahan berinvestasi didaerah.
14. Peningkatan kualitas kehidupan beragama.
15. Masih maraknya penyakit masyarakat dan permasalahan sosial.
16. Masih kurangnya regulasi dan koordinasi penanggulangan kebencanaan.

Fokus Prioritas Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 adalah :

1. Pembinaan dan Peningkatan terhadap Nilai Moral dan Agama di Kalangan Generasi Muda dan Masyarakat.
2. Peningkatan capaian indikator makro daerah yang masih dibawah rata-rata capaian nasional dan Propinsi Sumbar (Peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, penurunan tingkat kemiskinan, Angka Sanitasi layak, Angka air minum layak).
3. Peningkatan capaian sasaran kinerja RPJMD 2016-2021 yang masih dibawah target yang telah ditetapkan.
4. Pencapaian target sasaran kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 periode tahun awal.
5. Peningkatan Infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan Perekonomian Masyarakat.
6. Peningkatan Produktivitas di sektor Bidang Perekonomian (Pertanian, Peternakan, Pariwisata, dan Usaha Kecil Menengah).
7. Penurunan Jumlah Rumah tidak Layak Huni.

A scenic view of a waterfall cascading over a large, reddish-brown rock formation. The water is white and frothy as it falls into a pool of clear, greenish water below. The background is filled with lush green trees and foliage under a clear blue sky.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

*padang pariaman
berjaya!*

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dilaksanakan melalui tujuh Misi. Untuk itu strategi dan arah kebijakan merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistis dan komprehensif. Kabupaten Padang Pariaman telah menetapkan RPJMD Tahun 2021-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang merupakan periode keempat dari RPJPD.

Ditetapkannya RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, diikuti dengan penetapan Indikator Kinerja Utama melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman selanjutnya dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh Bupati Padang Pariaman dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi, Peningkatan kualitas pelayanan publik, Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 dan mengacu kepada RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010. Pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026 sudah menjabarkan tiga pertanyaan dasar, yakni :

- 1) Apa yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun mendatang;
- 2) bagaimana cara mencapainya dan
- 3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tersebut tercapai.

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Visi adalah kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk

rencana kerja. Visi juga dapat diartikan sebagai arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction) yang menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka visi Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026, yaitu :

PADANG PARIAMAN “BERJAYA”

Visi “Padang Pariaman Berjaya” merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan menjadi Kabupaten terdepan dari Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Unggul **BERkelanjutan** : Menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- **Religius** : Kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- **SeJAhtera** : suatu kondisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sector ekonomi, pendidikan, kesehatan dan social budaya.
- **BerbudaYA** : suatu gambaran kondisi masyarakat yang mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Sebagaimana diketahui, bahwa Visi merupakan arah Pembangunan atau kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Visi tersebut, harus bisa menjawab permasalahan Pembangunan Daerah atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Serta sejalan dengan visi dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

2.1.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 7 misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur.

Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**MISI
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- 01** • Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
- 02** • Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
- 03** • Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat.
- 04** • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal.
- 05** • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
- 06** • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat.
- 07** • Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mencapai sesuatu yang dicita-citakan dalam masa jabatan sesuai dengan Visi-Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun maka perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel 2.1 dan dibawah ini :

Tabel 2.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Visi : Padang Pariaman Berjaya (unggul BERkelanjutan, Religius, seJAhtera dan berbudaYA)		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban umum.	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.	Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber daya Air
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
		Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang
Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan ,Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin
		Peningkatan daya beli masyarakat
		Kemandirian Desa
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan pergerakan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Penguatan layanan kebencanaan
		Pengurangan resiko kebakaran
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat

Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Peningkatan penanganan masalah sosial Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan nilai investasi/penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

2.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah kebijakan merupakan cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, realistis, analitik, dan komprehensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam bentuk suatu kebijakan dan program merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Strategi pembangunan dan arah kebijakan sangat erat kaitannya karena arah kebijakan pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah untuk dapat melaksanakan strategi pembangunan yang telah disusun. Dengan mengaitkan antara strategi dan arah kebijakan tersebut, maka pencapaian sasaran pembangunan akan menjadi lebih terjamin.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien guna mewujudkan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan melalui Tujuh Misi maka strategi dan arah kebijakan dirumuskan terhadap aspek yang memberikan dampak besar dan mempunyai daya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Selanjutnya hubungan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada setiap tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut :



Foto : Musrenbang Penyusunan RKPD Tahun 2023

Tabel 2.2
Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Jangka Menengah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-
2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
1,1 Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradab dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat	Jumlah Hafiz dan Hafizah yang bersertifikat at Gebu Pafa	1.1.1 Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	1.1.1.1 Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	1.1.1.1 Meningkatkan nilai-nilai keimanan kepada masyarakat melalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama	1.1.1.1.1 Penguatan Tata kehidupan masyarakat agamais dan berbudaya	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Kesra
			1.1.1.2 Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	1.1.1.2 Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.	1.1.1.2.1 Peningkatan kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multy culture	Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Kesra
					1.1.1.2.2 Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Kesbangpol
					1.1.1.2.3 Peningkatan Pemahaman Sejarah, Seni tradisional dan Warisan Budaya	kebudayaan	Disdikbud

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
	Penurunan Jumlah Tindak Pidana	1.1.2 Peningkatan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1.1.2.1 persentase penegakkan perda	1.1.2.1 Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan	1.1.2.1.1 Penguatan wawasan kebangsaan, toleransi serta kemitraan dengan masyarakat dan instansi lainnya	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Pol PP Damkar
			1.1.2.2 persentase gangguan transtibum dan linmas yang dapat diselesaikan	1.1.2.2 Meningkatkan pengendalian gangguan transtibum dan linmas	1.1.2.2.1 Penguatan peran serta sumber daya linmas (perlindungan masyarakat) dalam pengendalian transtibum dan linmas	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Pol PP Damkar
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1.1.2.3 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	1.1.2.3.1 Peningkatan kelembagaan pengarusutan gender	Pemberdayaan Perempuan	Dinsos P3A
			Persentase penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak	1.1.2.4 Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1.1.2.4.1 Peningkatan Perlindungan perempuan dan anak	urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Dinsos P3A

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
2.1 Terwujudnya infrastruktur dan ruang yang berwawasan lingkungan	Persentase Pemenuhan Infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	2.1.1 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	2.1.1.1 persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	2.1.1.1.1 Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kabupaten	pekerjaan umum penataan ruang	PU PR
			2.1.1.2 Rasio Konektivitas kabupaten	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat	2.1.1.2.1 Pemerataan sarana dan prasarana pendukung transportasi umum	perhubungan	Dishub
2.1	2.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	2.1.2.1 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	2.1.2.1 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten	2.1.2.1.1 Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	pekerjaan umum penataan ruang	PU PR
			2.1.2.2 Rasio Luas Kawasan Permukiman yang terlindungi Wilayah Sungai (WS)	Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir	2.1.2.2.1 Peningkatan infrastruktur bantaran dan tanggul sungai akibat daya rusak air	pekerjaan umum penataan ruang	PU PR
2.1	2.1.3 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman	2.1.3.1 Persentase drainase dalam kondisi baik	2.1.3.1 Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	2.1.3.1.1 Penyediaan dan Peningkatan jaringan drainase skala kawasan dan skala kota	pekerjaan umum penataan ruang	PU PR

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.3.2 Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan	2.1.3.2.1 Peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan dan pengolahan sampah berbasis teknologi	pekerjaan umum dan penataan ruang dan lingkungan hidup	DPUPR dan DLHPKPP
				2.1.3.3 Menyiapkan dan menerapkan regulasi tentang lingkungan hidup	2.1.3.2.2 Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	
					2.1.3.3.1 Pengembangan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Lingkungan Hidup	DLHPKPP
					2.1.3.3.2 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	DLHPKPP
			Persentase areal kawasan kumuh	2.1.3.4 Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	2.1.3.4.1 Pengurangan luas permukiman kumuh	perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	DLHPKPP

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	<p>Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rincinya</p> <p>Persentase luas lahan Milik Pemda bersertifikat</p>	<p>2.1.4.3 Meningkatkan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital</p>	<p>2.1.4.3.1 Penyediaan informasi rencana tata ruang (RTR) beserta rincinya melalui peta analog dan peta digital</p>	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
				<p>2.1.4.4 Meningkatkan fasilitas kepengurusan sertifikat tanah Pemda</p>	<p>2.1.4.4.1 Pendataan kepemilikan lahan bersertifikat milik Pemda</p>	pertanahan	DLHKPP
3.1 Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Laju pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	<p>Kontribusi ekonomi pertanian/p erkebunan terhadap PDRB</p>	<p>3.1.1.1 Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman</p>	<p>3.1.1.1.1 Peningkatan pemberdayaan petani pada sektor komoditi unggulan</p>	pertanian	Distan KP / Peternakan dan Kesehatan Hewan
				<p>3.1.1.2 Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat</p>	<p>3.1.1.2.1 Penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui diversifikasi dan intensifikasi pangan</p>	pangan	Distan KP / Peternakan dan Kesehatan Hewan

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
				3.1.1.6 Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif	3.1.1.6.1 Pembinaan kelembagaan koperasi dan UMKM	koperasi dan UMKM	Disdagnakerkop UKM
			Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	3.1.1.7 Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri	3.1.1.7.1 Pengembangan Pusat pertumbuhan baru sesuai dengan potensi wilayah masing-masing	perindustrian	DPMPTP
			Jumlah Kunjungan Wisata	3.1.1.8 Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata	3.1.1.8.1 Pelestarian kawasan wisata	pariwisata	Disparpora
				3.1.1.9 Melakukan promosi wisata dan ekonomi kreatif	3.1.1.9.1 Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	pariwisata	Disparpora
					3.1.1.9.2 pengoptimalan alokasi dana nagari untuk peningkatan sarana prasarana wisata dan ekonomi kreatif	pariwisata	Disparpora

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah																																																												
4.1 Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca	Peningkatan kuantitas dan kualitas bahan bacaan	perpustakaan	Dinas Arsip dan Perpustakaan																																																												
								Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	Peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendidikan	pendidikan	Disdikbud																																																						
														Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Urusan Penunjang	Setda Bagian ekonomi																																																
																				Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	sosial	Dinsos P3A																																										
																										Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari	pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD																																				
																																Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Urusan Penunjang	Setda Bagian ekonomi																														
																																						Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	sosial	Dinsos P3A																								
																																												Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari	pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD																		
																																																		Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Urusan Penunjang	Setda Bagian ekonomi												
																																																								Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	sosial	Dinsos P3A						
																																																														Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari	pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD
Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	sosial	Dinsos P3A																																																														
						Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Meningkatkan perekonomian desa/nagari	Pemanfaatan potensi desa/nagari	pemberdayaan masyarakat dan desa	DPMD																																																								
												Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (ADHB)	Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perekonomian masyarakat	Urusan Penunjang	Setda Bagian ekonomi																																																		
																		Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunkan angka kemiskinan	Penerapan regulasi pengentasan kemiskinan	sosial	Dinsos P3A																																												

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
			Rata-rata lama sekolah	4.1.2.3 Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	4.1.2.3.1 Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi	pendidikan	Disdikbud
				4.1.2.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4.1.2.4.1 Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD	pendidikan	Disdikbud
		4.1.3 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1.3.1 Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	4.1.3.1.1 Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
					4.1.3.1.2 Perluasan kesempatan kerja	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
		4.1.4 Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	4.1.4.1 Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan dalam pembangunan	4.1.4.1.1 Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial	Kepemudaan	Disparpora
				4.1.4.2 meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	4.1.4.2.1 Peningkatan kualitas SDM pemuda	Kepemudaan	Disparpora

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
			Rata-rata lama sekolah	4.1.2.3 Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan	4.1.2.3.1 Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi	pendidikan	Disdikbud
				4.1.2.4 Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD	4.1.2.4.1 Peningkatan mutu relevansi dan daya saing PAUD	pendidikan	Disdikbud
		4.1.3 Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.1.3.1 Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja	4.1.3.1.1 Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan melaksanakan berbagai program-program yang relevan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
					4.1.3.1.2 Perluasan kesempatan kerja	tenaga kerja	Disdagnakerkop UKM
		4.1.4 Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah	Jumlah pemuda berkarakter mandiri	4.1.4.1 Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaan dalam pembangunan	4.1.4.1.1 Pengembangan kewirausahaan pemuda milenial	Kepemudaan	Disparpora
				4.1.4.2 meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda	4.1.4.2.1 Peningkatan kualitas SDM pemuda	Kepemudaan	Disparpora

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
5,1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	5.1.1 Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	4.1.4.3 Mengembangkan dukungan sarana dan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah	4.1.4.3.1 Pembibitan atlet muda secara berjenjang dan terintegrasi;	Olahraga	Disparpora
				5.1.1.1 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	5.1.1.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis IT yang Terintegrasi	fungsi lain (keuangan)	BPKD/Inspektorat
5,1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	5.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan barang daerah milik	Tingkat Kapabilitas APiP	5.1.1.2 Meningkatkan pengelolaan barang daerah milik	5.1.1.2.1 Peningkatan perencanaan pemanfaatan dan inventarisasi aset	fungsi lain (keuangan)	BPKD, Bag. Keuangan, DLHPKPP (Bid. Pertanahan)
				5.1.1.3 Mengoptimalkan peran APiP	5.1.1.3.1 Peningkatan kapabilitas APiP	fungsi lain (pengawasan)	Inspektorat
5,1	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	5.1.1.4 Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	5.1.1.4 Meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah	5.1.1.4.1 Peningkatan komitmen implementasi dan dokumentasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	fungsi lain (pengawasan)	Inspektorat

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	5.1.1.5 Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan	5.1.1.5.1 Peningkatan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT	Non Urusan	Seluruh OPD
				5.1.1.6 Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.6.1 Peningkatan pelaksanaan fungsi DPRD secara efektif dan efisien	Fungsi Penunjang	Setwan
					5.1.1.6.2 Peningkatan penataan Produk Hukum Kab Padang Pariaman	Fungsi Penunjang	Setda Bag Hukum
				5.1.1.7 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah	5.1.1.7.1 Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	fungsi lain (perencanaan)	Bapelitbangda, Bag. Fispra
					5.1.1.7.2 Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)	fungsi lain (penelitian dan pengembangan)	Bapelitbangda
			5.1.1.8 Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa	5.1.1.8.1 Peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa	fungsi lain (perencanaan)	Bag. PBJ

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
			Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	5.1.1.9 Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.1.1.9.1 Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. PUM, Kecamatan
		5.1.2 Birokrasi yang kapabel	Indeks Profesionalitas ASN	5.1.2.1 Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah	5.1.2.1.1 Peningkatan kapasitas aparatur dan Pempatan Sumber Daya Aparatur sesuai Analisis Jabatan	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Organisasi dan PANRB
					5.1.2.1.2 Peningkatan sistem manajemen kepegawaian	fungsi lain (kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan)	BKPSDM
					5.1.2.1.3 Peningkatan Budaya kerja yang profesional	fungsi lain (kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan)	BKPSDM
			Indeks E-Government /SPBE	5.1.2.2 Meningkatkan infrastruktur e-Gov yang terintegrasi	5.1.2.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana IT	Komunikasi dan informatika	Diskominfo

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
						Komunikasi dan Informatika, fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Diskominfo, Bag. Humas dan Protokoler
					5.1.2.2.2	Persandian	Diskominfo
						Statistik	Diskominfo
					5.1.2.3.1	kearsipan	Dinas Arsip dan Perpustakaan
				Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan	Peningkatan Pengamanan data daerah		
			Indeks Kearsipan	5.1.2.3	Peningkatan manajemen kearsipan berbasis IT pada masing-masing Perangkat Daerah		
					5.1.3.1.1	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)	Bag. Organisasi
			Indeks Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan manajemen penyelenggaraan pelayanan publik		
		5.1.3		5.1.3.1			
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas					
					5.1.3.1.2	fungsi lain (penelitian dan pengembangan)	Bapelitbangda
						pengembangan inovasi pelayanan publik	

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
6.1	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	6.1.1 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	6.1.1.1 Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan	5.1.3.1.3 Peningkatan Tertib administrasi dan pemanfaatan database kependudukan dan pencatatan sipil	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					5.1.3.2 Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business	5.1.3.2.1 Penerapan SOP di sektor pelayanan publik	fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Sekretariat Daerah)
6.1	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	6.1.1.2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	6.1.1.2 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.1.1.1.1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan	kesehatan	Dinkes/RSUD
					6.1.1.2.1 Peningkatan Pemenuhan Tenaga Kesehatan Sesuai standar	kesehatan	Dinkes
6.1	Persentase pelayanan dasar yang memenuhi standar	6.1.1.3 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	6.1.1.3 Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	6.1.1.3.1 Peningkatan Pemenuhan Penyediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman	kesehatan	Dinkes

BAB II PERENCANAAN KERJA

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
				6.1.1.4 Meningkatkan Budaya Hidup Sehat	6.1.1.4.1 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	kesehatan	Dinkes
	6.1.2 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	6.1.2.1 Menurunkan Total fertility rate (FTR)	6.1.2.1.1 Peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan KB dan Kesehatan Reproduksi Remaja	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DPPKB
	6.1.3 Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum		Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	6.1.3.1 Meningkatkan akses terhadap layanan air minum	6.1.2.1.2 Peningkatan advokasi dan pergerakan pengendalian penduduk, KB dan pembangunan keluarga	pengendalian penduduk dan keluarga berencana	DPPKB
					6.1.3.1.1 Peningkatan infrastruktur dan teknologi penyediaan air minum	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
					6.1.3.1.2 Penguatan kelembagaan KPSPAM dan kapasitas SDM penyediaan air minum		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
		6.1.4 Peningkatan pengelolaan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.1.4.1 Meningkatkan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	6.1.4.1.1 Penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	pekerjaan umum dan penataan ruang	PU PR
	6.1.5 Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni		Rasio rumah layak huni	6.1.5.1 Menyediakan rumah yang layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	6.1.5.1.1 Peningkatan perbaikan rumah tidak layak huni	perumahan rakyat dan kawasan permukiman	DLHPKPP
	6.1.6 Penguatan layanan kebencanaan		Nagari tangguh bencana	6.1.6.1 Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana	6.1.6.1.1 Peningkatan pemahaman masyarakat terkait kebencanaan	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	BPBD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
		6.1.7 Pengurangan resiko kebakaran	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen kebakaran (WMMK)	6.1.7.1 Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran	6.1.7.1.1 Peningkatan penguatan jumlah lokasi/nagari pengurangan resiko bencana	ketenteraman ketertiban umum perlindungan masyarakat	Pol PP Damkar
		6.1.8 Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat	Persentase PPKS Mandiri	6.1.8.1 Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar	6.1.8.1.1 Peningkatan kesejahteraan sosial	social	Dinsos P3A
		6.1.9 Peningkatan penanganan masalah sosial	Persentase penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial	6.1.9.1 Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan	6.1.9.1.1 Peningkatan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan	social	Dinsos P3A

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan	Perangkat Daerah
7.1 Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Rasio ketergantungan keuangan daerah	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah	Persentase peningkatan PAD	7.1.1.1 Meningkatkan PAD	7.1.1.1.1 Intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis IT	fungsi lain (keuangan)	BPKD
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7.2.1.1 Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi	7.2.1.1.1 Peningkatan promosi investasi di sektor primer dan jasa berbasis IT	penanaman modal	DPMPTP
7.2 Meningkatkan nilai investasi penanaman modal	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	7.2.1.2 Meningkatkan pelayanan investasi	7.2.1.2.1 Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT dengan memperhatikan kesesuaian rencana tata ruang dan kearifan lokal	penanaman modal	DPMPTP

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan serta merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Adapun Indikator Kinerja Utama Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel. 2.3
Indikator Kinerja Utama Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Kepribadian Masyarakat yang relegius, beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah
		Peningkatan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda
			Indeks Pembangunan Gender
2	Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang
		Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
		Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW
3	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
			Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
			Kontribusi ekonomi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB
		Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan
		Peningkatan Daya Beli Masyarakat	PDRB/Income Per Kapita
4	Membangun Masyarakat yang Cerdas, Terampil dan Berdaya Saing dengan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
		Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah

	Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka
5	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD
		Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	Indeks E-Government/SPBE
		Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik
6	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk
		Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
		Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana
7	Meningkatkan Nilai Investasi / Penanaman Modal	Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, penetapan Perjanjian Kinerja ini menjadi target kinerja yang harus diwujudkan oleh Bupati. Perjanjian Kinerja ini setiap akhir tahunnya akan dijadikan sebagai bahan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap Pemerintahan Daerah. Adapun Perjanjian Kinerja Bupati Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel. 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026
Kabupaten Padang Pariaman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	27%
2	Peningkatan Ketentraman,	Persentase Penegakan Perda	65%

	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks Pembangunan Gender	93,60
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58,72%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	68%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.796.247,14 (juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,58%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	12,60%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat kemiskinan	6,99%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	46,98 Juta
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,85
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	13,97 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7,15%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi KemenPAN RB	B
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	2,700 (tinggi)
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	2,44
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4,56
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	68,99 Tahun
16	Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3,39%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum Sehari-hari	90%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	16 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	403,3 Milyar

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Periode 2021-2026

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



padang.pariwisata
berjaya!

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Berdasarkan dokumen perjanjian kinerja tahun 2022, akuntabilitas kinerja Kabupaten Padang Pariaman berkaitan dengan informasi keberhasilan maupun kegagalan pencapaian 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama serta anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah digunakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber dana lainnya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut.



Adapun 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama serta penanggung jawab data kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja tersebut sebagaimana terlihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Penanggung Jawab

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	Disdikbud, Setda (Kesra), Kecamatan
2	Peningkatan ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	Satpol-PP Damkar
		Indeks Pembangunan Gender	Dinsos P3A

3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	Dis. PUPR
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	Dis. PUPR
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	Dis. PUPR
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Distan-KP, Disnakeswan
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Disdagnakerkop & UKM
		Kontribusi ekonomi Sektor Industri Pengelolaan Terhadap PDRB	Dis. PMPTP
7	Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	Dinsos P3A
8	Peningkatan Daya Beli Masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Setda Bag. Ekonomi
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Dis. Arsip & Perpus
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Disdikbud
11	Peningkatan Tenaga Kerja yang Terampil dan Berdaya Saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disdagnakerkop UKM
12	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/LPPD	Seluruh Perangkat Daerah
13	Birokrasi yang Efisien dan Efektif (Kapabel)	Indeks E-Government/SPBE	Diskominfo
14	Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah
15	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Dinkes/RSUD
16	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	DPPKB
17	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Dis. PUPR
18	Penguatan Layanan Kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	BPBD

19	Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Dis. PMPTP
----	--	---	------------

Sumber : RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *out put* dan *out come* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Kinerja}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi target penilaian yang lebih tinggi dari dua acuan antara **Keputusan Kepala LAN dan Peraturan Mendagri** dimaksud dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.2
Pengukuran Dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat / Kategori
$x > 100$	Sangat Berhasil
$75 < x < 100$	Berhasil
$55 < x < 75$	Cukup Berhasil
$x < 55$	Kurang Berhasil

Sumber : Keputusan Kepala LAN & Permendagri

3.2 PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Hasil pengukuran kinerja dievaluasi dan dianalisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya target yang ditetapkan.

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya untuk mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 pada 19 (sembilan belas) sasaran strategis dengan 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel 3.3 :

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	%	38%	27	27,02	100,07	Sangat Berhasil
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban	Persentase penegakan perda	%	25	65	59,29	91,20	Berhasil

	umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,69	93,6	92,78	99,12	Berhasil
Misi 2 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang								
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan								
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	%	65,3	67	62,02	92,56	Berhasil
2.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	69,30	58,72	69,47	118,30	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan perencanaan tata ruang	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	60,39	68,00	69,57	102,30	Sangat Berhasil
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasis pemberdayaan masyarakat								
Tujuan 1 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat								
1.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Juta	2,608,426.6	2,796,247.14	2,845,588.2	101,76	Sangat Berhasil
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,65	8,58	10,44	121,67	Sangat Berhasil
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	2,51	12,6	6,87	55	Kurang Berhasil
2.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	7,22	6,99	6,25	110,59	Sangat Berhasil
3.	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	Juta	42,62	46,98	*42,62	*95,49	Berhasil
Misi 4 : Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan								
Tujuan 1 : Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan keterampilan								
1.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	1,84	18,85	1,97	10,44	Kurang Berhasil
2.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	%	13,68	13,97	13,93	99,71	Berhasil
3.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,41	7,15	6,60	107,69	Sangat Berhasil

	dan berdaya saing							
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan								
Tujuan : Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien								
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	Berhasil
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	Nilai	B	BB	B	86,07	Berhasil
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD)	Nilai	*	2,700	*	*	(N/A)
2.	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks EGovernment /SPBE	Indeks	2,60	2,44	2,60	106,55	Sangat Berhasil
3.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,49	4,56	4,65	101,97	Sangat Berhasil
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat								
Tujuan 1 : Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal								
1.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,97	68,99	69,34	100,50	Sangat Berhasil
2.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,74	3,39	0,72	178,76	Sangat Berhasil
3.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%	72,05	90	72,05	80,05	Berhasil
4.	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari Tangguh Bencana	Nagari	15 Nagari	16 Nagari	16 Nagari	100	Berhasil
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja								
Tujuan : Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal								
1.	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Milyar	997,6	403,3	463,6	114,95	Sangat Berhasil

Sumber : Analisis Capaian IKU OPD & RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 1

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya

Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Lembaga pendidikan Al-Quran Yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah.

Lembaga Pendidikan Alqur’an merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah serta lulus dalam seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebu Pafa) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kehidupan masyarakat yang religius.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Alqur’an yang menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	%	27	27,02	100,07	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu 27,02%. Sedangkan target yang ditetapkan melalui RPJMD adalah 27% dengan kategori "Sangat Berhasil". Artinya dari 27 % target RPJMD didapatkan sebanyak 157 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an telah menghasilkan hafizh/hafizhah dari total 581 Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Adapun formulasi pengukuran capaian realisasi Indikator Kinerja Utama ini yakni :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Yang Menghasilkan Hafizh dan Hafizhah}}{\text{Jumlah Lembaga Pendidikan AlQur'an Keseluruhan}} \times 100 \%$$

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah pada tahun 2022 dengan Tahun 2021:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah	%	26	10,32	39,69	27	27,02	100,07

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yaitu sebesar 60,31%.

Peningkatan yang melonjak drastis dikarenakan adanya tambahan dana dari APBD Kabupaten Padang Pariaman di tahun 2022 serta tambahan bantuan dana dari BAZNAS, Bank Nagari serta donatur lainnya.

Keberhasilan peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya terutama Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/ Hafizhah bukan hanya tanggung jawab Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur

pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Target dan realisasi dapat tercapai sepenuhnya, berkat tingginya minat putra-putri Padang Pariaman dalam menghafal Al-Qur'an yang di dukung semakin banyaknya Lembaga Pendidikan Al-Qur'an di tingkat Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.1
Proses Belajar Mengajar di Lembaga Pendidikan Alquran



Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(c) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas efisiensi sumber daya, biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 195.500.000,-sedangkan target biaya untuk semua program pada APBD adalah Rp 83.600.000 dikarenakan APBD hanya menyediakan anggaran sebesar Rp. 83.600.000,- kemudian dilakukan pengajuan permohonan proposal kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para

Hafiz/Hafizah yang berasal dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran, sehingga didapatkan bantuan dari BAZNAS Padang Pariaman sebesar Rp. 96.900.000, Bank Nagari Rp. 10.000.000,- dan Donatur lain (Tokoh Masyarakat) Rp. 5.000.000.

Pada tahun 2021 Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafizh/Hafizhah tidak dianggarkan dalam APBD kemudian dilakukan penggalangan dana berupa pengajuan proposal Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) untuk beasiswa para Hafiz/Hafizah yang berasal dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran maka diperoleh bantuan dari BAZNAS Padang Pariaman sebesar Rp. 50.000.000, Bank Nagari Rp. 5.000.000,- dan Donatur lain (Tokoh Masyarakat) Rp. 5.000.000,- sehingga realisasi mencapai Rp. 60.000.000,- dari target yang dianggarkan APBD yaitu sebesar Rp. 0,-.

Berdasarkan realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 maka diperoleh efisiensi anggaran sebesar 135.500.000,-. Realisasi efisiensi ini secara teori sudah sangat baik, sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya.

(d) Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Untuk pembinaan lembaga pendidikan AlQur'an dan Tahfiz pada Bagian Kesra tidak ada penganggaran. Sementara Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari stake holder, yaitu :

- Adanya dukungan dari BAZNAS Padang Pariaman, Bank Nagari serta Tokoh Masyarakat (Donatur) yang ada di Kabupaten Padang Pariaman;
- Terjalinya Kejasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Guru Mengaji/Guru Tahfizh yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
- Komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan Iman dan Taqwa (IMTAQ) Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman sangatlah tinggi.
- Peran serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini melakukan upaya pembinaan terhadap semua sekolah untuk mewujudkan visi daerah "Religius", salah satunya dengan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler berupa lembaga pendidikan Al-Qur'an (Rumah Tahfiz) disetiap sekolah baik tingkat dasar maupun menengah disamping keberadaan sekolah islam terpadu yang menerapkan pendidikan agama serta Al-Qur'an dalam kurikulum pendidikannya.
- Peran serta kecamatan sebagai lembaga pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yaitu melakukan pendataan terhadap seluruh lembaga pendidikan Al-Qur'an diwilayah

kecamatan masing-masing serta menyampaikan sosialisasi program pemerintah kepada semua lembaga tersebut.

- Keberadaan Nagari sangat membantu terhadap keberlanjutan lembaga pendidikan Al-Qur'an, karena pada saat ini nagari menganggarkan insentif untuk guru mengaji. Besaran insentif serta banyaknya lembaga pendidikan Al-Qur'an yang dibantu sesuai dengan kemampuan anggaran nagari serta mengacu kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Inovasi Kegiatan Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) diluncurkan pada tahun 2020 bertujuan untuk memotivasi Lembaga Pendidikan Alqur'an yang ada di Kabupaten Padang Pariaman agar menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan cara memberikan beasiswa/reward kepada para Hafizh/Hafizah dan pada tahun 2021 dari 60 Lembaga Pendidikan Alquran telah menghasilkan 281 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 60.000.000.

Berikut adalah tabel 60 Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan Hafizh/Hafizah di tahun 2021 :

Tabel 3.6

Data Lembaga Penghasil Pendidikan Al-Quran Tahun 2021

NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN ALQURAN	ALAMAT	Jumlah Hafizh / Hafizhah
1	MDTA BAHRUL ULUM	LUBUK PANDAN, 2X11 ENAM LINGKUNG	4
2	MDTA DARUL MUKMININ	LUBUK PANDAN, 2X11 ENAM LINGKUNG	7
3	MDTA Madani Darul Fikri	KAMPUNG GELAPUNG, ULAKAN TAPAKIS	2
4	MDTA AL HIDAYAH RIMBO DADOK	RIMBO DADOK, ENAM LINGKUNG	1
5	MDTA Al-Hidayah	VII KOTO	1
6	MDTA Istiqomah Pilubang	KETAPING, BATANG ANAI	3
7	MDTA Khairu Ummah	SANDI ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	4
8	MDTA Mandiri Baitul Hidayah Sei. Pinang	KASANG, BATANG ANAI	6
9	MDTA Raudhatul 'Ilmi	SINTUAK, SINTUK TOBOH GADANG	4
10	MDTA ULUL ALBAB	SICINCIN, 2X11 ENAM LINGKUNG	25
11	Nahawand	SUNGAI ASAM, 2X11 ENAM LINGKUNG	1
12	Nurul Berkah	SUNGAI ASAM, 2X11 ENAM LINGKUNG	6
13	Nurul Falah	TOBOH GADANG, SINTUK TOBOH GADANG	5
14	Nurul Yaqin	TOBOH GADANG, SINTUK TOBOH GADANG	5
15	Rumah Tahfiz Parit Malintang	PARIT MALINTANG, ENAM LINGKUNG	1
16	Pondok Pesantren Nurul Yaqin	SUNGAI GIMBA, ULAKAN TAPAKIS	3
17	Pondok Tahfiz Al-Amin Kp Apar	SUNGAI BULUAH UTARA, BATANG ANAI	9
18	Pondok Tahfiz Mujtahidin	BALAI BAIK, IV KOTO AUR	4

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

		MALINTANG	
19	Pondok Tahfizh Mumtazah Kasai	KASANG, BATANG ANAI	18
20	Pondok Tahfizh Nurul Huda	MALAI V SUKU TIMUR, BATANG GASAN	7
21	Pondok Tahfizh Surau Batu Ampalu	VII KOTO	9
22	PPNY Ambung Kapur	VII KOTO	5
23	Rodatul Islam	TOBOH GADANG, SINTUK TOBOH GADANG	2
24	RT Raudhatul 'Ilmi	SINTUAK, SINTUK TOBOH GADANG	7
25	Rumah Tahfizh Fajar Ilmi Kapalo Buayan	BUAYAN LUBUK ALUNG, BATANG ANAI	6
26	Rumah Tahfizh Rambai Madani	SANDI ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	2
27	Shohibul Quran	KAMPUNG GELAPUNG, ULAKAN TAPAKIS	2
28	Rumah Tahfizh Sicincin	2x11 ENAM LINGKUNG	1
29	SMPIT Cahaya Hati Pauh Kambar	PAUH KAMBAR, NAN SABARIS	1
30	Surau Bungo	ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	2
31	Surau Duku	ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	7
32	Surau Syekh Tibarau	ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	2
33	Tafhiimul Hifzhi	VII KOTO	24
34	Tahfihz Ar-Rasyid	MANGGOPOH, ULAKAN TAPAKIS	4
35	Tahfizh Shohibul Qur'an	SEULAYAT ULAKAN, ULAKAN TAPAKIS	2
36	TPA AISYIYAH	SICINCIN, 2X11 ENAM LINGKUNG	1
37	TPA NUR MUHAMMAD	LUBUK PANDAN, 2X11 ENAM LINGKUNG	1
38	TPA Nurul Iman	TAPAKIS, ULAKAN TAPAKIS	1
39	TPA Surau Ampalan	TAPAKIS, ULAKAN TAPAKIS	1
40	TPA Surau Jambu Aie	TAPAKIS, ULAKAN TAPAKIS	1
41	TPA Surau Kularai	GASAN GADANG, BATANG GASAN	3
42	TPA Surau Parit	MALAI V SUKU TIMUR, BATANG GASAN	5
43	TPA Surau Simaruok	MALAI V SUKU TIMUR, BATANG GASAN	10
44	TPA/TPSA Nurul Fadhillah	BALAI BAIK, IV KOTO AUR MALINTANG	3
45	TPA/TPSA AL Fatihah	2x11 KAYUTANAM	1
46	TPA/TPSA Al-Hidayah Sei.Ibur.1	VII KOTO	1
47	TPA/TPSA DARUSASSALAM	2x11 KAYUTANAM	1
48	TPA/TPSA NURUL IMAN	2x11 KAYUTANAM	1
49	TPA/TPSA Surau Koto Runciang Guguak	VII KOTO	1
50	TPA/TPSA Surau Koto Saiyo	SUNGAI GIMBA, ULAKAN TAPAKIS	2
51	TPA/TPSA Surau Pimpiang	VII KOTO	3
52	TPQ Ainul Yaqin	SINTUAK, SINTUK TOBOH GADANG	4
53	TPQ At-Taqwa Titian Akar	BUAYAN LUBUK ALUNG, BATANG ANAI	1
54	TPQ Nurul Huda Taniung Pisang	SINTUAK, SINTUK TOBOH GADANG	6

55	TPQ TPSQ Nurul Ilmi	2x11 KAYUTANAM	1
56	TPQ Yaraka	SINTUAK, SINTUK TOBOH GADANG	1
57	TPQ-TPSQ Shalaahuddin Panti Kayu	VII KOTO	4
58	TPQ/TPSQ Fisabilillah Surau Kp. Tengah	VII KOTO	21
59	TPQ/TPSQ Shalaahuddin Panti Kayu	VII KOTO	5
60	TPSQ NUR TANJUNG BERINGIN	TOBOH KETEK, ENAM LINGKUNG	10
JUMLAH			281

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Kemudian pada tahun 2022 dari 157 Lembaga Pendidikan Alquran menghasilkan 406 Hafiz/Hafizah yang lolos seleksi Gerakan Seribu Penghafal Alquran (Gebupafa) dan mendapatkan beasiswa/reward dengan total anggaran yang diberikan sebesar Rp. 195.500.000.

Tabel 3.7
Hafiz/Hafizah yang lolos Gebupafa 2022

No	KATEGORI HAFIZ/ZAH	JUMLAH (ORANG)
1	Kategori 1-4 Juz	323
2	Kategori 5-9 Juz	61
3	Kategori 10-19 Juz	8
4	Kategori 20-29 Juz	5
5	Kategori 30 Juz	9
Jumlah		406

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berikut adalah tabel 157 Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan Hafizh/Hafizah di tahun 2022.

Tabel 3.8
Data Lembaga Penghasil Hafiz/Hafizah Tahun 2022

NO	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JUMLAH Hafizh/Hafizah
1	TPQ Durian Dangka	V Koto Kampung Dalam	1
2	TPQ Kampung Pauh	V Koto Kampung Dalam	1
3	TPQ Kampung Qurani	Batang Anai	4
4	TPQ Kampung Tengah	V Koto Kampung Dalam	1
5	TPQ Lembak Pasang	Sungai Limau	1
6	TPQ Linggeh	V Koto Kampung Dalam	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

7	TPQ Madani Darul Fikri	Ulakan Tapakis	3
8	MAS kepala Hilalang	2x11 Kayu Tanam	1
9	TPQ Masjid Istiqamah	IV Koto Aur Malintang	4
10	TPQ MASJID RAYA PASIR BARU	Sungai Limau	1
11	MDA ALHIDAYAH TOBOH MANDAHILING	VII Koto Sungai Sarik	4
12	MDA BIRUL WALIDAIN	V Koto Timur	6
13	MDA GADUR	Enam Lingkung	1
14	MDA INSANUL KAMIL	VII Koto Sungai Sarik	1
15	MDA MADRASATUL ULUM	VII Koto Sungai Sarik	5
16	MDA Nuhayrun	V Koto Timur	3
17	MDTA Al iqra'	Patamuan	3
18	MDTA AL MUBARAQ	Ulakan Tapakis	6
19	MDTA AL-HUFAZ SYEKH BURHANUDDIN	Ulakan Tapakis	4
20	MDTA Ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	6
21	MDTA Baitul Hidayah Mandiri	Batang Anai	5
22	MDTA Ikrar	Patamuan	2
23	MDTA JADID AT TALAQI	Sintuk Toboh Gadang	7
24	MDTA Khairu Ummah	Ulakan Tapakis	1
25	MDTA Mujahidin	Lubuk Alung	2
26	MDTA Nurul Ilmi kampung Tanjung	Patamuan	1
27	MDTA Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	6
28	MITQ Ibnu Umar	Lubuk Alung	7
29	TPQ Mesjid Nurul Yaqin Buayan	Batang Anai	1
30	MTsN 1 PADANG PARIAMAN	2x11 Kayu Tanam	1
31	Pesantren Tahfiz Darul Mustofa	Padang Sago	4
32	Pondok Tahfiz Mumtazah	Batang Anai	4
33	PONDOK HAFIZ FISABILILLAH LIMPATO SEI. SARIAK	VII Koto Sungai Sarik	1
34	Pondok Pesantren Al Fath	Sungai Limau	1
35	Pondok Pesantren Bustanul Yaqin Punggung Kasik	Lubuk Alung	3
36	Pondok Qur'an Al-Mubaraq mudiak balai	Patamuan	1
37	Pondok quran kecamatan sungai geringging	Sungai Geringging	2
38	Pondok quran Malai III Koto	Sungai Geringging	8
39	Pondok Pesantren Al ukhwah	Nan Sabaris	1
40	Ponpes Baitul Makmur Padang Toboh Ulakan	Ulakan Tapakis	1
41	Ponpes Nurul Yakin Az-Zainiyah	Ulakan Tapakis	1
42	PONDOK PESANTREN SUBULUSSALAM	2x11 Enam Lingkung	1
43	Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-ringin	Enam Lingkung	6
44	Rumah Tahfiz Tartila	Ulakan Tapakis	1
45	Rumah Tahfiz SMPN 3 Lubuk Alung	Lubuk Alung	5
46	RTQ Birrul walidain	Patamuan	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

47	RTQ PONDOK TAHFIZH NURUL HUDA	Batang Gasan	8
48	Rumah Al-Qur'an Rahiman Raoyan	Nan Sabaris	6
49	Rumah Quran Daarul Fikri Ketaping	Ulakan Tapakis	1
50	Rumah tahfidz Nurul quran	Nan Sabaris	8
51	Rumah Tahfidz Raudhatul Ilmi	Sintuk Toboh Gadang	1
52	RUMAH TAHFIZ FISABILILLAH	VII Koto Sungai Sarik	3
53	RUMAH TAHFIZ LIMPATO	VII Koto Sungai Sarik	1
54	RUMAH TAHFIZ NURUL YAQIN	VII Koto Sungai Sarik	1
55	RUMAH TAHFIZ SHOhibUL QUR'AN	Ulakan Tapakis	8
56	Rumah Tahfizh Arun arasyid	2x11 Kayu Tanam	8
57	Rumah Tahfizh Madani Darul Fikri	Ulakan Tapakis	2
58	RUMAH TAHFIZH RAMBAI MADANI	Ulakan Tapakis	11
59	Samaratul ikhlas	2x11 Enam Lingkung	1
60	SD IT NUR HIDAYAH PUNGGUANG KASIAK	Lubuk Alung	2
61	SDIT Ash Habul Kahfi	Lubuk Alung	4
62	SDIT CAHAYA HATI PAUH KAMBAR	Nan Sabaris	1
63	SDIT Nur Hidayah	Lubuk Alung	9
64	Simpang III Palanggaran	V Koto Kampung Dalam	1
65	Simpang Setia	V Koto Kampung Dalam	2
66	SMP IT NUR HIDAYAH PUNGGUANG KASIAK	Lubuk Alung	1
67	SMP Tahfizh MADANI	Lubuk Alung	1
68	SMPIT Cahaya Hati Pauh Kambar	Nan Sabaris	1
69	SMPIT MADINAH ALFATIH	Nan Sabaris	4
70	Sungai Janiah	V Koto Kampung Dalam	2
71	Surau Batuang	IV Koto Aur Malintang	6
72	SURAU BUNGO	Ulakan Tapakis	4
73	SURAU KALAMPAIAN	Ulakan Tapakis	1
74	Surau kelok	2x11 Enam Lingkung	1
75	Surau Lenggek	IV Koto Aur Malintang	1
76	Surau Nurul Ikhlas	Lubuk Alung	5
77	Surau Tibarau	Ulakan Tapakis	1
78	Toboh Marunggai	V Koto Kampung Dalam	1
79	TPA Mesjid Raya Ketaping	Batang Anai	1
80	TPA AISYIYAH	2x11 Enam Lingkung	4
81	TPA AMPALAM	Ulakan Tapakis	1
82	TPA Arrahman	Padang Sago	2
83	TPA ARRASYID	Ulakan Tapakis	2
84	TPA ashabul Kahfi	2x11 Enam Lingkung	6
85	TPA Baitul Ilmi sungai durian	Patamuan	1
86	TPA Baitul Mardiah	Lubuk Alung	1
87	TPA Baitul Wustha	Enam Lingkung	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

88	TPA BUSTANUL ULUM	VII Koto Sungai Sarik	3
89	TPA DARRUL HUFUZ SYEKH BURHANUDDIN	Ulakan Tapakis	5
90	TPA Darunnashihin	Patamuan	1
91	TPA istiqamah bari	2x11 Enam Lingkung	1
92	TPA KHAIRUL UMMAH	Ulakan Tapakis	1
93	TPA Koto Saiyo Sikabu Mudiak	Ulakan Tapakis	1
94	TPA KULARAI	Batang Gasan	7
95	TPA lubuk pandan	2x11 Enam Lingkung	2
96	TPA Masjid Darussalam	Nan Sabaris	2
97	TPA masjid jami	2x11 Enam Lingkung	1
98	TPA Masjid Raya Suger	Sungai Geringging	3
99	TPA Nurul Yaqin sungai kasikan	Patamuan	2
100	TPA simpang malai	Sungai Geringging	3
101	TPA sungai asam	2x11 Enam Lingkung	1
102	TPA SURAU ASAM LIMAU SUNDAI	VII Koto Sungai Sarik	1
103	TPA SURAU DIAUR	Ulakan Tapakis	1
104	TPA SURAU DUKU	Ulakan Tapakis	3
105	TPA Surau Jambu Air	Ulakan Tapakis	1
106	TPA SURAU KAMPUANG TANGAH LIMPATO	VII Koto Sungai Sarik	2
107	TPA surau tapi sawah	Patamuan	1
108	TPA SYEKH TIBARAU	Ulakan Tapakis	1
109	TPA/ TPSA AINUR ROYYAN	Sungai Limau	5
110	TPA/ TPSA AL MUNAWWARAH	Sungai Limau	2
111	TPA/ TPSA DINUL MAKRUUF	Sungai Limau	6
112	TPA/ TPSA MASJID RAYA LOHONG	Sungai Limau	1
113	TPA/ TPSA NURUL ANHAR	Sungai Limau	1
114	TPA/ TPSA SURAU BATU	Sungai Limau	1
115	TPA/ TPSA SURAU CAMIN	Sungai Limau	1
116	TPA/ TPSA SURAU TELENG	Sungai Limau	1
117	TPA/TPSA ABU HANI	V Koto Timur	2
118	TPA/TPSA AL KAUSAR	Sintuk Toboh Gadang	1
119	TPA/TPSA BAITUL HADI	Sintuk Toboh Gadang	1
120	TPA/TPSA DARUL MAKMUR	Sintuk Toboh Gadang	2
121	TPA/TPSA JABAL FIIL	VII Koto Sungai Sarik	6
122	TPA/TPSA NURUL FALAH	Sintuk Toboh Gadang	2
123	TPA/TPSA NURUL YAQIN	Sintuk Toboh Gadang	2
124	TPA/TPSA RAUDHATUL ISLAM	Sintuk Toboh Gadang	1
125	TPA/TPSA RAUDHATUL JANNAH	Sintuk Toboh Gadang	6
126	TPQ Al Amin Kampung Apar	Batang Anai	1
127	TPQ Al Huda Padang Manis	V Koto Kampung Dalam	1
128	TPQ al iman ladang rimbo	Sungai Geringging	1
129	TPQ AL-IQRA' NURUL HIDAYAH	Lubuk Alung	1

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

130	TPQ AR RASYIID	Ulakan Tapakis	1
131	TPQ Ar Rayyan Sikabu	Lubuk Alung	2
132	TPQ Aulia Mukminin	V Koto Kampung Dalam	1
133	TPQ Basung	V Koto Kampung Dalam	2
134	TPQ DAARUL WUSTHA	VII Koto Sungai Sarik	4
135	TPQ Darul Hikmah	Lubuk Alung	4
136	TPQ darussalihin	Enam Lingkung	2
137	TPQ Fastabiqul Khairat	Lubuk Alung	2
138	TPQ Jannatus Salam Kuliek	Batang Anai	6
139	TPQ Kairu Ummah Kasai	Batang Anai	1
140	TPQ Linggeh	V Koto Kampung Dalam	2
141	TPQ Mesjid Raya Toboh	V Koto Kampung Dalam	1
142	TPQ Mesjid Suhada Ps Usang	Batang Anai	1
143	TPQ Mujahidin	Lubuk Alung	3
144	TPQ Nurul Ikhlas	V Koto Kampung Dalam	1
145	TPQ Nurul Iman Kuliek	Batang Anai	1
146	TPQ Nurul Istiqamah	V Koto Kampung Dalam	1
147	TPQ Pintir Kayu	Nan Sabaris	1
148	TPQ Sabai Sabar	V Koto Kampung Dalam	1
149	TPQ Soetan Jalan	V Koto Kampung Dalam	2
150	TPQ Surau Hijau	Sungai Geringging	5
151	TPQ Taqwa Kp Tanjung	V Koto Kampung Dalam	2
152	TPQ Ujung Tanjung	V Koto Kampung Dalam	1
153	TPSA SURAU KOTO SAIYO	Ulakan Tapakis	4
154	TPSQ AN NAHL	Enam Lingkung	3
155	Tpsq Babul Istiqamah	Enam Lingkung	1
156	TPSQ NUR TANJUNG	Enam Lingkung	5
157	TPSQ SURAU JAWI-JAWI	2x11 Enam Lingkung	1
JUMLAH			406

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 1 yaitu : “ Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah Serta Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Persentase Penegakan Perda, dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Analisa capaian indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Persentase Penegakan Perda**

Perentase Penegakan Perda dan Perkada merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada khususnya.

Dalam konteks penegakan perda dan/atau perkada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat”.

(a) **Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2022**

Dalam rangka meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan pada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Salah satunya adalah meningkatkan Persentase Penegakan Perda dan Perkada.

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Persentase Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
Penegakan Perda dan Perkada Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	65,00	59,29	91,20	Berhasil

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Realisasi Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu 59,29% dari target yang ditetapkan sebesar 65% dengan interpretasi “ Berhasil”, artinya Persentase Penegakan Perda dan Perkada ini diukur dari jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan pada masyarakat yang ditindak lanjuti di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022.

(b) Perbandingan Realisasi Capaian IKU Pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi Penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2022 dengan Tahun 2021 :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Capaian IKU
Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	62,50	62,50	100	65,00	59,29	91.2	Berhasil

Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja Penegakan Perda dan Perkada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Penegakan Perda dan Perkada tahun 2021 yaitu sebesar 8,8%. Penurunan capaian Indikator Penegakan Perda dan Perkada pada tahun 2022 di sebabkan beberapa faktor antara lain :

1. Jumlah laporan dari masyarakat terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak seluruh laporan dapat di tindaklanjuti pemberkasannya karena tidak tindak terindikasi pelanggaran Perda dan Perkada.

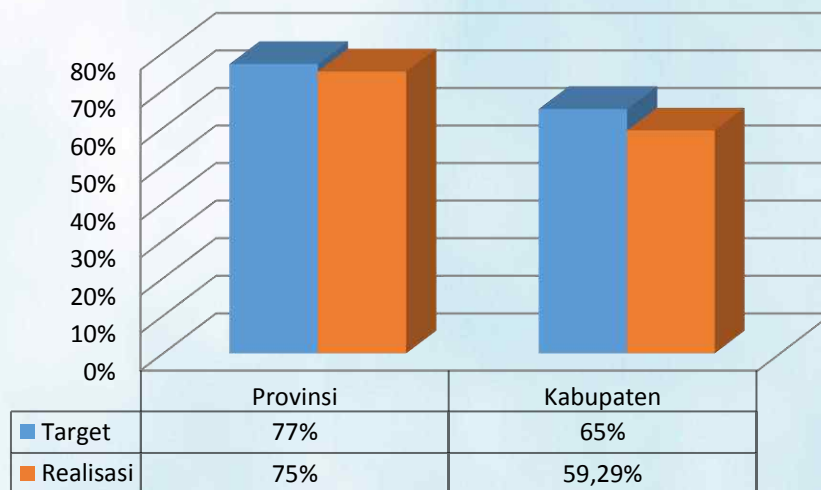
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana pendukung penegakan Perda dan Perkada dengan 1 Unit Mobil Patroli untuk luas wilayah Kabupaten Padang Padang Pariaman dengan 17 Kecamatan.
3. Keterbatasan SDM PPNS dalam pelaksanaan Penyidikan dan Pemberkasan pelanggaran Perda.
4. Terjadinya rasionalisasi Anggaran sehingga capaian indikator tidak tercapai dari target.

(c) Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Provinsi Dengan Kabupaten Pada Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi capaian indikator kinerja provinsi dengan kabupaten pada tahun 2022 :

Grafik 3.1 Capaian Kinerja Penegakan Perda dan Perkada Kabupaten dibandingkan dengan Capaian Provinsi Tahun 2022

Perbandingan Target dan Realisasi Capaian IKU Provinsi Dengan Kabupaten Pada Tahun 2022



Sumber : Provinsi Sumatera Barat & Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja Penegakan Perda dan Perkada tahun 2022 masuk kategori **“Berhasil”** dimana target Penegakan Perda dan Perkada Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 77% dan realisasi 75% dengan persentase capaian 97,4%. Sementara pada Kabupaten Padang Pariaman, targetnya sebesar 65% dan realisasi 59,29% dengan persentase capaian 91,2%.

Keberhasilan pencapaian IKU Persentase Penegakan Perda dan Perkada didukung melalui program meningkatkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan pada masyarakat, bukan hanya menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur Forkopimda, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai target harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

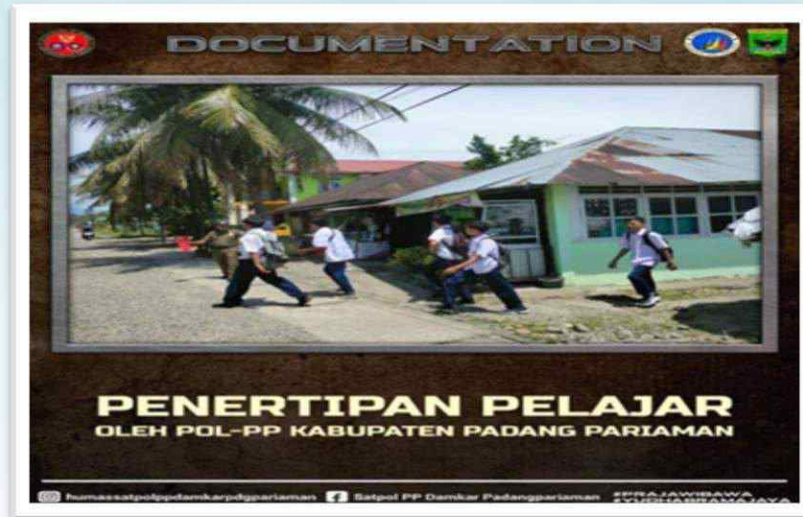
(d) Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Target Realisasi IKU Tahun 2022

Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Padang Pariaman dalam mencapai Penegakan Perda dan Perkada yang tinggi adalah peningkatan cakupan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dari stake *holder* lainnya, yaitu :

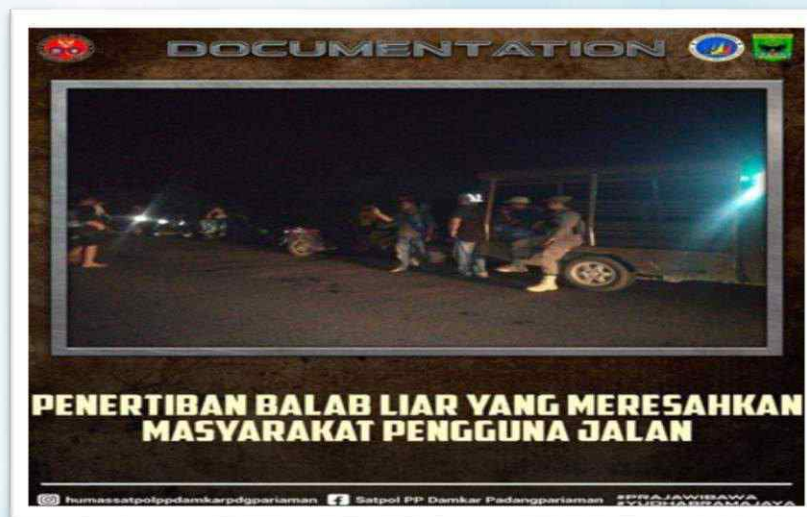
1. Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Pariaman melakukan pembinaan atas perilaku kenakalan yang dilakukan siswa yang sebelumnya telah dilakukan upaya pembinaan awal dengan pengaduan baik melalui media aplikasi email maupun whatsapp ataupun pengaduan langsung ke Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman;
2. Pihak sekolah juga dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran dalam alternatif yang inovatif untuk menunjang efektifitas operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Padang Pariaman;
3. Peran serta kecamatan dalam upaya penegakkan perda dan perkada antara lain : melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan; melakukan sosialisasi perda dan perkada kepada masyarakat; dan melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3.3
Melakukan Penindakan dan Penertiban Pelajar yang berkeliaran di Luar Jam Belajar



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.4
Melakukan Penindakan dan Penertiban Balap Liar



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.5
Melakukan Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Perkada Nomor Nomor 05 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.6
Melakukan Penindakan dan Penertiban Penyakit Masyarakat Pelanggaran Perda Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penidakan Pencegahan dan Penyakit Masyarakat



Sumber : Dinas Satpol PP & Damkar Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja ini adalah “Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Lingkungan Masyarakat”. Untuk mewujudkan pelaksanaan program tersebut, didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum” dengan anggaran sebesar Rp 356,329,850. Realisasi dari anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp 353.267.650 dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 98.69%.
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran Rp 584.010.380. Realisasi dari anggaran kegiatan tersebut adalah Rp 581.889.419 dengan capaian persentase realisasi anggaran sebesar 99.77%.

(f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 13.328.022.467,00 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 13.426.846.281,00. Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 0.74 % . Dibandingkan dengan tahun 2021 diperoleh efisiensi sebesar 4.41 % (anggaran sebesar Rp 11.681.152.940,00 realisasi sebesar Rp 11.166.130.495,00). Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, dan jauh lebih kecil dari tahun 2021 sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber baya biaya. Namun bila dilihat pada kegiatan dan hasil nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan Sasaran Strategis 2 dengan indikator kinerja utama “Indeks Pembangunan Gender. IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna.

(a) **Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022**

Adapun capaian realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Indeks Pembangunan Gender” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Interpretasi
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,60	92,78	99,12	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 Nilai Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai sebesar 92,78 dengan capaian capaian realisasi kinerja 99,12%.

(b) **Realisasi Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	93,3	92,69	99,34%	93,6	92,78	99,12%

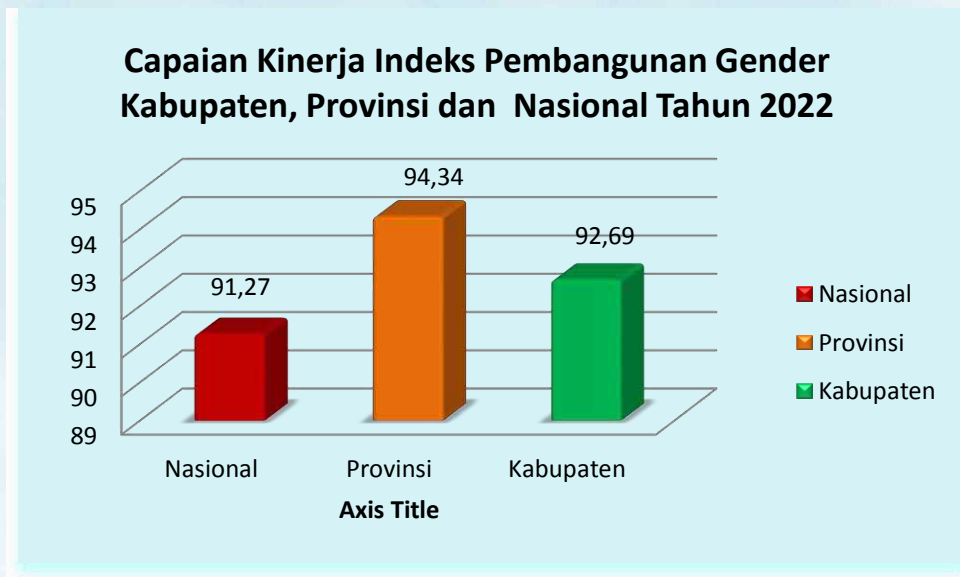
Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja IPG tahun 2022 mengalami peningkatan di bandingkan dengan capaian IPG tahun 2021 yaitu sebesar 0.09% . Pada tahun 2022 telah dilakukan Advokasi dengan seluruh OPD dan kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman untuk mengalokasikan anggaran kegiatan yang refonsif Gender baik itu berupa fisik maupun berupa kegiatan di OPD masing-masing.

(c) **Realisasi Capaian Indikator Kinerja Nasional, Provinsi. Dan Kabupaten Tahun 2022**

Adapun realisasi capaian indikator kinerja IPG Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.2
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian IPG Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dimana realisasi IPG Nasional tahun 2022 adalah 91,27% dan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 92,78%.

(d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Keberhasilan IPG tahun 2022 melampaui IPG tahun 2021 berkat kerjasama yang baik dilakukan oleh DINSOSP3A dengan 27 OPD dan 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Anggaran Refonsif Gender yang melonjak naik dari tahun 2021 yang hanya sebesar Rp. 1.584.444.598,- sedangkan tahun 2022 sebesar Rp. 48.850.010.604,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 47.265.566.006,- , dan ini menjadi salah satu penyebab keberhasilan pencapaian IKU terkait dengan IPG.

Beberapa faktor penghambat untuk mencapai target kinerja, yaitu : Masih banyaknya fasilitas umum maupun pemerintah yang belum ramah gender.

1. Fasilitas umum berbasis gender memiliki pesan khusus agar kelompok rentan dapat masuk dan menikmati taman terbuka, perkantoran, tempat wisata dengan menggunakan berbagai fasilitas yang ada. Kelompok gender ini rentan karena kondisi fisiknya yang memiliki kelemahan karena usia seperti yang dialami para lansia, karena kecacatan secara fisik seperti yang dialami para penyandang disabilitas atau karena perlu ke hati-hatian seperti bagi anak-anak yang harus didampingi.
2. Ruang area merokok bagi pria juga merupakan fasilitas khusus bagi para perokok mengisi waktu luang sambil menemani keluarga belanja di tempat wisata atau pun

diperkantoran khusus mengurus urusan pelayanan dasar masyarakat yang perlu ruang tersebut.

Solusi yang diterapkan untuk mencapai keberhasilan IPG sesuai dengan RPJMD 2021-2026 :

1. Membuat regulasi yang lebih berpihak pada pembangunan Gender.
2. Melakukan revisi target yang ditetapkan di RPJMD (menurunkan Target).
3. Menambah anggaran terkait dengan Program Gender di OPD dan Kecamatan.
4. Melakukan Kerjasama dengan dunia usaha dan pihak swasta lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan. Disamping Penanganan kasus kekerasan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memperhatikan tingkat pemberdayaan perempuan khususnya perempuan sebagai kepala keluarga dengan memberikan pelatihan berupa bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha.

Peran serta OPD lainnya dalam mencapai keberhasilan Indeks Pembangunan Gender, yaitu :

- **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan**

Terkait Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, adapun kegiatan yang dilakukan adalah melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang pendidikan dasar yang berada diluar sistem sekolah, baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender.

- **Crosscutting dengan 27 OPD dan 17 Kecamatan**

Dengan anggaran resposif Gender sebesar Rp. 48.850.010.604,-, dana digunakan untuk fasilitas yang ramah Gender dan kegiatan yang resposif Gender.

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/ Kegiatan
I.	Program Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	27.177.000	27.092.200	99,69	

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	10.177.000	10.158.000	99,81	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi PUG sebanyak 10 kali.
2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	17.000.000	16.934.200	99,61	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya Bimtek PUG dan PPRG sebanyak 30 orang peserta. • Terlaksananya Sosialisasi PUG dan PPRG sebanyak 30 orang peserta.
II.	Program Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.387.120	46.932.369	99,04	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	47.387.120	46.932.369	99,04	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya lomba pidato antar ketua DW tingkat OPD yang terdiri dari 26 peserta. • Telah dilaksanakan bimbingan manajemen usaha sebanyak 34 orang dan terbayarkan transportasi peserta sebanyak 34 Peserta.
IV.	Program Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.136.000	14.103.500	99,77	
5	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	14.136.000	14.103.500	99,77	Tersedianya buku Data Gender dan Anak sebanyak 60 Buah Buku.
V.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	94.684.000	93.002.000	98,22	
6	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	94.684.000	93.002.000	98,22	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan psikolog dengan jumlah peserta 5 orang yang terdiri dari anak korban sodomi dan orang tua. • Telah dilakukan respon kasus kekerasan seksual

					<p>terhadap anak sebanyak 6 kasus.</p> <ul style="list-style-type: none">• Rapat persiapan penilaian verifikasi KLA dengan peserta tim gugus tugas KLA.• Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diperoleh adalah Pratama.• Telah dilakukan capacity building Forum Anak sebanyak 40 anak perwakilan dari forum anak Kab. Padang Pariaman.• Telah dilakukan Sosialisasi dan penguatan KHA untuk mewujudkan SRA (Sekolah Ramah Anak)
--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun pengukuran persentase efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebagai berikut :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua Program terkait IKU IPG adalah Rp.63.304.596,- sedangkan target biaya untuk semua Program IKU IPG adalah Rp.74.564.120,- . Dengan rumus diatas diperoleh efisiensi biaya sebesar sekitar 0,84%. Dibanding dengan tahun 2021 realisasi Rp. 84.647.643,- dengan target sebesar Rp. 84.811.000,- diperoleh efisiensi sebesar 0,99%.

Persentase efisiensi ini secara Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/ Kegiatan secara teori masih sangat kecil, dan jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 umum tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

(F) Penghargaan

Gambar 3.7
Penerimaan Penghargaan KLA Tingkat Pratama



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten yang ramah terhadap anak baik dari tingkat kabupaten sampai ketinggian nagari, yang mana dibuktikan dengan ditetapkannya dua Nagari sebagai Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak (DRPPA) yaitu, Nagari Pauh Kamar dan Nagari Toboh Ketek.

Gambar 3.8
Launching Nagari Ramah Perempuan & Peduli Anak





Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Terakhir adanya penghargaan tingkat nasional yang diraih dari Kementerian PPPA yaitu penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya tingkat Madya Tahun 2021. Penghargaan ini merupakan komitmen daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Gambar 3.9 Penghargaan Anugerah Parahita Eka Praya



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang.

Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang merupakan salah satu indikator kinerja Kabupaten Padang Pariaman yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(a) **Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022**

Adapun capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	67,00	62,02	92,56	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Formulasi Pengukuran :
$$\frac{\text{Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang}}{\text{Panjang jaringan jalan kabupaten}} \times 100\%$$

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang” tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 62,02% dari target yang ditetapkan sebesar 67%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai terkait peningkatan kondisi fisik jaringan jalan baik dan sedang yaitu sepanjang 46,16Km jalan dengan 49 ruas jalan ditingkatkan kondisi fisik dan kelayakannya.

Selain kegiatan rehabilitasi jalan, pada tahun 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan rehabilitasi terhadap 11 unit jembatan dengan lokasi :

- (1) Rehabilitasi Jembatan lubuk Napa Kecamatan padang sago ;
- (2) Rehabilitasi Jembatan Buluh Apo ;
- (3) Rehabilitasi Jembatan Ampang sipinang ;
- (4) Rehabilitasi jembatan kubakan Sungai Geringging ;
- (5) Rehabilitasi Jembatan sungai gimba ;
- (6) Rehabilitasi Jembatan Sariak malai tengah ;
- (7) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Kp. Tanjung Korong Kp. Tanjung Nagari gasan Gadang Kec. Batang Gasan ;
- (8) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan korong kepala buayan nagari buayan ;
- (9) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Korong Surau Kadang Kec. ulakan tapakis ;
- (10) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan aie kelok Tandikek Kec. Patamuan ;
- (11) Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan lohong Kec. sungai limau.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Interprestasi
			Target	Realisasi	%	
Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	%	63,63	67,00	62,02	92,56	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang, mendapatkan capaian persentase sebesar 92,56 % pada tahun 2022. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja.
2. Pada tahun 2021 dengan target 65,03 mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 63,63 %. Capaian persentase pada tahun 2021 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 97,84%.

(c) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Untuk Penunjang IKU

Dalam pencapaian Indikator Kinerja, terdapat beberapa hambatan yang terjadi antara lain :

- Tingkat kerusakan jalan lebih cepat dibandingkan laju pembangunan jalan dan jembatan ;
- Seringnya terjadi bencana alam seperti banjir, longsor dan gempa bumi yang mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan ;
- Perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya genangan air saat musim hujan di badan jalan sehingga mempercepat proses kerusakan konstruksi jalan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya mencapai realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- Perbaiki kondisi jalan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki.
- Peningkatan kualitas kemantapan jalan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan.
- Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja ini yaitu :

- Pemeliharaan rutin jalan yang optimal turut mendukung dalam menjaga kondisi jalan tetap baik. Meskipun pada kegiatan pemeliharaan jalan ini hanya untuk permukaan jalan saja dan tidak mempunyai nilai konstruksi, tetapi dapat menutup lubang-lubang jalan yang ada, sehingga jalan menjadi lebih layak dilalui.

- Perencanaan teknis yang baik dan pengawasan yang tepat dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan.
- Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman melalui survei kondisi jalan dan jembatan secara berkala setiap tahun.
- Adanya dukungan dari Program “Penyelenggaraan Jalan” yang terlaksana dengan baik, serta dukungan dari beberapa kegiatan yakni : Survei kondisi jalan / jembatan, Pembangunan jalan, Rehabilitasi jalan, Pemeliharaan rutin jalan, pembangunan jembatan, dan kegiatan Rehabilitasi jembatan.

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

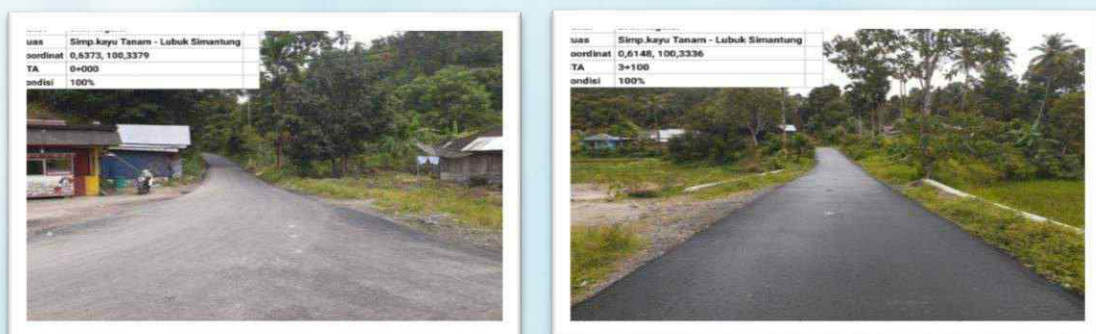
Pada tahun 2021 total anggaran Program “Penyelenggaraan Jalan” ini memiliki dana sebesar Rp. 63.565.810.401 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 55.571.639.806. Persentase capaian anggaran tersebut sebesar 87,42% dengan realisasi kinerja pembangunan infrastruktur sebesar 26,12 Km perbaikan kondisi fisik jalan.

Sedangkan total anggaran program pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 88.673.457.443 dengan realisasi anggaran Rp. 74.921.692.136. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 84,49%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai dari realisasi anggaran program pada tahun 2022 tersebut yaitu sepanjang 46,16 Km jalan dengan jumlah 49 ruas jalan yang ditingkatkan kondisi fisiknya.

Berdasarkan dari data realisasi anggaran dan realisasi kinerja tahunan diatas dapat diasumsikan bahwa penggunaan dana untuk pencapaian IKU "Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang" sudah efisien karena capaian kinerja yang dihasilkan juga meningkat.

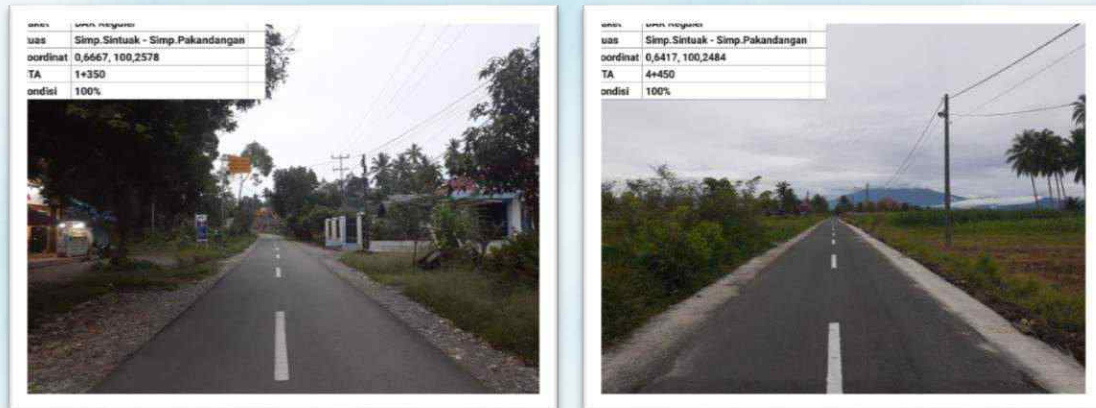
Berikut merupakan dokumentasi rehabilitasi jalan dan jembatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.10
Rehabilitasi Jalan Simpang Kayu Tanam – Lubuk Simantuang



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.11 Rehabilitasi Jalan Simpang Sintuak – Simpang Pakandangan



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.12 Rehabilitasi Jembatan Lubuk Napa Kecamatan Padang Sago



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 4

**Meningkatnya Infrastruktur
Sumberdaya Air**

Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik.

Jaringan irigasi merupakan saluran, bangunan dan struktur tambahan membentuk satu kesatuan untuk mengatur air irigasi mulai dari penyediaan, pengumpulan, pendistribusian, pengelolaan, penggunaan dan pembuangan. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik adalah indikator kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman yang perlu dilaksanakan demi pemberdayaan terhadap masyarakat. Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022

Adapun capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	58,72	69,47	118,30	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$$

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 69,47% dari target yang ditetapkan sebesar 58,72%. Persentase capaian realisasi lebih besar dari pada persentase target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik” ini mendapatkan kategori “Sangat Berhasil” dengan perbandingan antara target dan realisasi mencapai angka 118,30%.

Adapun 5 Daerah Irigasi (D.I) yang dikelola dan direhabilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kampung Manggis Barangan Kec. Batang Gasan ;
- Rehabilitasi Jaringan irigasi D.I Duku 1 SP 1 Kec. Sungai Limau ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Alahan Tabek Sikucur Kec. V koto Kampung Dalam ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Kasang 1 ;
- Rehabilitasi jaringan irigasi D.I Bandar Tantabek.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	69,30	58.72	69,47	118,30

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Infrastruktur Sumber Daya Air dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik, mendapatkan capaian persentase sebesar 118,30 % pada tahun 2022. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Sangat Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja karena sudah melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Pada tahun 2021 dengan target 54,82 mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 69,30 %. Capaian persentase pada tahun 2021 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 126,41%. Capaian persentase pada tahun 2021 ini juga termasuk kedalam kategori “Sangat Berhasil”.

(c) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Pencapaian IKU

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yang ada diantaranya adalah :

- Belum semua kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air yang memiliki standar operasional yang baku ;
- Banyaknya Sumber daya Air yang terletak pada tanah milik penduduk sehingga perlu pembebasan tanah agar Pemda dapat mengelola SDA secara optimal.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan diatas, dilakukan beberapa upaya yakni :

- Peningkatan Peraturan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan Sumber Daya Air ;
- Pemanfaatan lahan sub-optimalisasi melalui revitalisasi ;
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan irigasi.

Adapun faktor penyebab keberhasilan yang menyebabkan realisasi indikator kinerja bisa tercapai adalah sebagai berikut :

- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data melalui e-PAKSI yang merupakan aplikasi survey berbasis Android yang digunakan untuk pengambilan data survey inventaris aset Jaringan Irigasi, Aset Non Jaringan Irigasi dan Kinerja Irigasi ;
- Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara berkala.

Pengelolaan efisiensi penggunaan sumber daya ini melalui Program “Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan Kegiatan “Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota”, dimana kegiatan ini memiliki 3 sub kegiatan yaitu ;

- (a) Pembangunan jaringan irigasi;
- (b) Rehabilitasi jaringan irigasi,
- (c) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 total anggaran Program “Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)” ini memiliki dana sebesar Rp. 13.413.804.084 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.697.956.846. Persentase

capaian anggaran tersebut sebesar 87,20% dengan realisasi kinerja sebesar 902 Ha daerah pengelolaan sumber daya air.

Sedangkan total anggaran program pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 9.295.288.970 dengan realisasi anggaran Rp. 8.174.043.508. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 87,93% dengan realisasi kinerja sebanyak 430,9 Ha daerah pengelolaan sumber daya air.

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan rehabilitasi jaringan daerah irigasi pada beberapa lokasi di Kabupaten Padang Pariaman :

Gambar 3.13

Rehabilitasi Daerah Irigasi Alahan Tabek Sikucur



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.14

Rehabilitasi Daerah Irigasi Kampung Manggis Barangan



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.15
Rehabilitasi Daerah Irigasi Tantabek
Kecamatan IV Koto Aur Malintang



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.16
Rehabilitasi Daerah Irigasi Duku Sp. 1
Kecamatan Sungai Limau



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.17
Rehabilitasi Daerah Irigasi Kasang
Kecamatan Batang Anai



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 5**MENINGKATNYA PEMANFAATAN KAWASAN
SESUAI DENGAN PERENCANAAN TATA
RUANG**

Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Perencanaan Tata Ruang merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 2 yaitu : “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Publik Secara Berkelanjutan Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Penataan Ruang”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah Persentase Ketaatan Terhadap RTRW.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan. Penataan ruang merupakan proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang. Persentase ketaatan terhadap RTRW merupakan salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman. Rencana tata ruang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. Konsekuensi logisnya adalah seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2022

Adapun capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	68,00	69,57	102,30	Sangat Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100\%$$

Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” tahun 2022 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman mencapai realisasi kinerja sebesar 69,57% dari target yang ditetapkan sebesar 68,00%. Persentase capaian realisasi lebih besar dari pada persentase target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Ketaatan Terhadap RTRW” ini mendapatkan kategori “Sangat Berhasil” dengan perbandingan antara target dan realisasi mencapai angka 102,30%.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi IKU Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	%
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	%	60,39	68,00	69,57	102,30

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Meningkatkan Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang, dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Ketaatan terhadap RTRW, mendapatkan capaian persentase sebesar 102,30 % pada tahun 2022. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Sangat Berhasil” untuk pencapaian sebuah indikator kinerja.
2. Pada tahun 2021 dengan target 63,00 mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 60,39 %. Capaian persentase pada tahun 2021 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 95,85%.

(c) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Upaya Yang Dilakukan Dalam Menunjang IKU

Dalam pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat beberapa hambatan-hambatan yaitu :

- Konflik kepentingan para pihak dalam pemanfaatan ruang (ketidak seimbangan kepentingan Ekonomi, Ekologi, Sosial Budaya dan Institusional);
- Kurang pahamnya masyarakat terhadap rencana Tata Ruang ;
- Dinamika perkembangan pembangunan yang sangat cepat.

Adapun beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja adalah :

- Penyusunan kebijakan strategi pengembangan infrastruktur wilayah (perencanaan program dan pembiayaan) ;
- Sinkronisasi program pengembangan infrastruktur secara terpadu ;
- Meningkatkan sinergi perencanaan dan pemanfaatan ruang wilayah.

Selain upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses pencapaian realisasi indikator kinerja, terdapat juga beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja antara lain :

- Adanya kolaborasi Akademisi, Birokrasi, Dunia Usaha, Masyarakat (NGO Lingkungan) dan Dunia Pers dalam penyusunan rencana rinci Tata Ruang ;
- Melakukan updating rencana tata ruang secara berkala ;
- Peran aktif dari Program “Program Penyelenggaraan Penataan Ruang” dengan Kegiatan “Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota” yang terlaksana dengan efektif dan efisien ;
- Peran serta dari Kementrian ATR/BPN dalam melaksanakan rapat lintas sektor yang melibatkan Kementerian/Lembaga ditingkat pusat dan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten. Pembahasan lintas sektor dilaksanakan untuk memastikan bahwa dokumen Tata Ruang yang disusun sudah mengakomodir dan selaras dengan prioritas kepentingan pemerintah pusat ;
- Peran serta dari Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan (DLHPKPP) Kabupaten Padang Pariaman dalam pengembangan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang terkait pertanahan yang tertib administrasi ;
- Peran serta dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu, dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padang Pariaman dalam mengoordinir semua OPD terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKRP) yang merupakan tahap awal dalam proses perizinan. Perizinan yang dimaksud adalah kegiatan berusaha maupun kegiatan non berusaha ataupun kegiatan yang bersifat strategis nasional ;

- Peran serta dari Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman terkait dokumen perencanaan tata ruang yang merupakan dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan ruang. seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus terlebih dahulu memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan proses dalam mewujudkan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun 2021 memiliki total anggaran Program untuk indikator kinerja ini adalah sebesar Rp. 988.434.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 525.373.483. Persentase capaian anggaran tersebut sebesar 53,15%.

Sedangkan total anggaran program pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.414.003.820 dengan realisasi anggaran Rp. 2.014.873.954. Persentase yang dicapai dari perbandingan antara total anggaran dengan realisasi anggaran tersebut adalah sebesar 83,46%.

(e) Dokumentasi Kegiatan

Berikut merupakan dokumentasi peninjauan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.18
Peninjauan Lapangan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.19
Rapat Lintas Sektoral Oleh Kementerian ATR/BPN Tentang Penyusunan
RDTR Rencana Detil Tata Ruang



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata

PDRB (*Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product*) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan, di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Penentuan PDRB atas harga konstan, biasanya diperlukan untuk mengeluarkan pengaruh inflasi daerah sehingga menjadikan PDRB sebagai suatu sasaran strategis. Sehingga, PDRB dapat mengukur kondisi ekonomi suatu daerah dari kontribusi berbagai sektor ekonomi.

Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata merupakan sasaran strategis yang terdapat pada Misi 3 yaitu : “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait sasaran strategis ini adalah : Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB, Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, dan Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB. Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Kontribusi Ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB**

Kontribusi Ekonomi Pertanian/ Perkebunan terhadap PDRB didukung 3 Sub Sektor Utama, yaitu: Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan, Sub Sektor Perikanan dan Sub Sektor Perternakan. Dimana capaian kontribusi Pertanian/Perkebunan tersebut dapat di lihat pada uraian berikut ini.

(a) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022**

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU ini pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Juta	2,796,247.14	2,845,588.2	101,76%	Sangat Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tahun 2022 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB mendapatkan realisasi kinerja sebesar Rp. 2.845.588,2 dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.796.247,14. Hal ini termasuk kategori yang “Sangat Berhasil” dengan persentase pencapaian sebesar 101,76%.

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB adalah rasio antara nilai PDRB sektor Pertanian/Perkebunan dengan nilai PDRB kabupaten yang dinyatakan dalam persentase. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :

Nilai PDRB Sektor Pertanian /
Perkebunan

(b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB” tahun 2021 dengan tahun 2022.

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	Juta	2,731,777.20	2,608,426.6	2,796,247.14	2,845,588.2

Sumber : BPS Padang Pariaman & Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar Rp. 237.161,6.

(c) **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2022**

Berikut ini akan disajikan grafik mengenai perbandingan realisasi capaian indikator kinerja Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022.

Grafik 3.3

Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2022

Nilai PDRB Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Pada tahun 2022 Nilai PDRB Sektor Pertanian / Perkebunan Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 60,51 (Triliun) dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 2.845.588,2 (Juta). Pada sektor ini, ditahun 2022 nilai PDRB Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan sebesar $\pm 1,10\%$ dan Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan sebesar $\pm 1,09\%$ dibandingkan dengan nilai PDRB pada tahun 2021.

Terdapat 2 (dua) sub sektor pendukung yang berkontribusi terhadap PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan yaitu Sub Sektor Peternakan dan Sub Sektor Perikanan.

➤ **Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Peternakan :**

Realisasi Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Peternakan pada tahun 2021 menghasilkan produksi daging sebanyak 18.667,02 daging/ton. Sedangkan jumlah produksi daging tahun 2022 mengalami sedikit penurunan sebanyak 2.439,79 daging/ton dibandingkan realisasi tahun 2021 yang mana pada tahun 2022 produksi daging hanya sebanyak 16.227,23 daging/ton.

Di sisi lain jumlah produksi telur mengalami peningkatan hasil produksi sebesar 1.542,407 ton, dimana pada tahun 2022 jumlah produksi telur mencapai angka 31.036,534 ton dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya mencapai angka 29.494,127 ton.

- Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Perikanan :

Realisasi Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian/Perkebunan Sub Sektor Perikanan pada tahun 2021 menghasilkan produksi perikanan tangkap sebanyak 18.112,5 ton dengan target sebesar 18.441,90 ton. Dari perbandingan antara target dan realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 ini mendapatkan capaian persentase sebesar 98,21% dengan kategori “Berhasil”.

Sedangkan jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 sebanyak 19.130,50 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 18.810,73 ton. Hal ini menyebabkan kategori yang dicapai oleh Sub Sektor Perikanan terhadap produksi perikanan tangkap adalah “Sangat Berhasil” dengan perbandingan antara target dan realisasi capaian sebesar 102 %.

(d) Faktor Penghambat Capaian Kinerja IKU PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan Tahun 2022

Tidak tercapainya target produksi dan produktivitas tanaman pangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya terjadinya penurunan luas tanam, serangan hama penyakit (OPT), dan terjadinya penundaan musim tanam karena adanya dampak fenomena iklim.

Berikut dirincikan faktor-faktor yang ditenggarai sebagai penyebab tidak tercapainya target dan turunnya produksi tanaman padi pada tahun 2022:

1. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Padang Pariaman, setelah dilakukannya *ground check* ulang dilapangan terjadi pengurangan yang signifikan dimana yang semula 22.856 Ha menjadi 18.289 Ha ;
2. Luas tanam tanaman padi mengalami pengurangan akibat berbagai faktor diantaranya adanya fenomena perubahan iklim, luas tanam pada tahun 2021 seluas 49.514 Ha, turun menjadi 47.892 Ha pada tahun 2022, atau berkurang 1.622 Ha ;
3. Akibat berkurangnya luas tanam, tentu berimplikasi terhadap luas panen. Dimana luas panen pada tahun 2022 seluas 46.016 turun dibandingkan tahun 2021, pada tahun 2021 seluas 55.426 Ha, atau berkurang seluas 9.410 Ha ;
4. Terjadinya serangan hama tikus di beberapa kecamatan di Padang Pariaman. Luas areal sawah yang mengalami serangan 19,7 Ha dan luas tanaman yang terancam serangan seluas 425,5 Ha ;
5. Disamping serangan hama tikus, juga terjadi serangan hama wereng coklat. Areal sawah yang terserang seluas 14,5 Ha dan luas tanaman yang terancam seluas 36 Ha ;
6. Pada bidang perkebunan yang menjadi perhatian adalah penurunan populasi tanaman kelapa yang merupakan salah satu ikon perkebunan Padang Pariaman ;

7. Luas kebun kakao rakyat cenderung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya serangan hama penyakit yang menyebabkan penurunan produksi kakao.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Peningkatan produksi tanaman pangan diwujudkan dalam hal penyediaan bibit/benih unggul, peningkatan sarana dan prasarana pertanian seperti sarana irigasi, jalan usaha tani, pengadaan mesin dan alat-alat pertanian, pemberantasan hama penyakit, penerapan teknologi dalam budidaya ;
2. Meningkatkan kapabilitas dan kompetensi personil DistanKP melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya penyuluh pertanian di kecamatan/lapangan ;
3. Peremajaan tanaman kelapa secara bertahap. Disamping itu, dalam upaya meningkatkan produktivitas tanaman kelapa DistanKP terus berupaya menggandeng kelompok tani untuk memberantas tupai yang merupakan hama utama tanaman kelapa.

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Akuntabilitas keuangan menyajikan besarnya anggaran, realisasi anggaran dan realisasi fisik dari segenap kegiatan yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten Padang Pariaman, sudah termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian. Dimana secara keseluruhan persentase realisasi anggaran belanja langsung atau kegiatan sebesar 96,91%. Secara fisik realisasi sebesar 100%. Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.22
Realisasi Fisik dan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022

Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi			Sisa DPA	Ket
		Fisik	Keuangan			
			%	(Rp)		
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	206,967,010		206,303,010	99.68	664,000	
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	68,011,010		67,867,010	99.79	144,000	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9,538,000	100.00	9,518,000	99.79	20,000	
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	39,236,010	100.00	39,179,010	99.85	57,000	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	19,237,000	100.00	19,170,000	99.65	67,000	
					-	
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	138,956,000		138,436,000	99.63	520,000	
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	12,000,000	100.00	11,820,000	98.50	180,000	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	126,956,000	100.00	126,616,000	99.73	340,000	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19,999,850		19,999,850	100.00	-
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	19,999,850		19,999,850	100.00	-
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	19,999,850	100.00	19,999,850	100.00	-
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40,000,000		39,150,500	97.88	849,500
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000		39,150,500	97.88	849,500
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	10,000,000	100.00	9,960,000	99.60	40,000
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	100.00	29,190,500	97.30	809,500
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11,452,845,510		11,291,541,886	98.59	161,303,624
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93,395,790		89,671,990	96.01	3,723,800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38,179,770	100.00	38,024,770	99.59	155,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,216,020	100.00	51,647,220	93.54	3,568,800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,595,088,800		10,451,618,032	98.65	143,470,768
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	10,466,220,440	100.00	10,322,908,572	98.63	143,311,868
Penyediaan administrasi pelaksana tugas ASN	116,740,000	100.00	116,640,000	99.91	100,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12,128,360	100.00	12,069,460	99.51	58,900
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,800,000		1,640,000	58.57	1,160,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2,800,000	100.00	1,640,000	58.57	1,160,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	316,076,640		307,069,860	97.15	9,006,780
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,648,000	100.00	4,648,000	100.00	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95,138,340	100.00	88,165,000	92.67	6,973,340
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16,817,500	100.00	16,807,500	99.94	10,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,600,000	100.00	7,950,000	82.81	1,650,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,425,000	100.00	7,358,450	99.10	66,550
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182,447,800	100.00	182,140,910	99.83	306,890
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33,165,000		31,517,800	95.03	1,647,200
Pengadaan Mebel	-	0.00	-	0.00	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,900,000	100.00	19,350,000	92.58	1,550,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,265,000	100.00	12,167,800	99.21	97,200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282,729,280		281,594,973	99.60	1,134,307
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27,418,080	100.00	27,398,580	99.93	19,500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31,000,000	100.00	30,458,793	98.25	541,207
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,080,000	100.00	18,636,000	97.67	444,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	205,231,200	100.00	205,101,600	99.94	129,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129,590,000		128,429,231	99.10	1,160,769
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129,590,000	100.00	128,429,231	99.10	1,160,769
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1,714,918,230		1,708,191,111	99.61	
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	802,476,900		799,477,650	99.63	2,999,250
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	184,712,500	100.00	182,473,750	98.79	2,238,750
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	617,764,400	100.00	617,003,900	99.88	760,500

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	912,441,330		908,713,461	99.59	3,727,869
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	197,141,930	100.00	196,824,061	99.84	317,869
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	110,300,000	100.00	109,852,000	99.59	448,000
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	604,999,400	100.00	602,037,400	99.51	2,962,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3,556,918,550		3,188,860,690	89.65	368,057,860
Pengembangan Prasarana Pertanian	75,757,250		75,627,250	99.83	130,000
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	23,561,250	100.00	23,481,250	99.66	80,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	52,196,000	100.00	52,146,000	99.90	50,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	3,481,161,300		3,113,233,440	89.43	367,927,860
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	781,556,300	100.00	778,424,100	99.60	3,132,200
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	349,990,000	100.00	346,279,000	98.94	3,711,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	2,349,615,000	100.00	1,988,530,340	84.63	361,084,660
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	133,921,400		133,642,950	99.79	278,450
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	133,921,400		133,642,950	99.79	278,450
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	133,921,400	100.00	133,642,950	99.79	278,450
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	3,985,000		3,985,000	100.00	-
Penerbitan Izin usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3,985,000		3,985,000	100.00	-
Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	3,985,000	100.00	3,985,000	100.00	-
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	355,359,520		353,548,020	99.49	1,811,500
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	355,359,520		353,548,020	99.49	1,811,500
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	139,659,520	100.00	138,885,520	99.45	774,000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	95,000,000	100.00	93,962,500	98.91	1,037,500
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	120,700,000	100.00	120,700,000	100.00	-
JUMLAH	17,484,915,070	100.00	16,945,223,017	96.91	539,692,053

Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) Penghargaan Tahun 2022

Selama tahun 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Padang Pariaman memperoleh satu penghargaan berupa:

1. Peringkat I Penyuluh Pertanian PNS Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat an. Reci Cani, S.ST, MM.
2. Pelaku Ketahanan Pangan Terbaik Tahun 2022 an. Kelompok Wanita Tani (KWT) Khadijah Nagari Padang Bintungan Kec. Nan Sabaris.
3. Pembina Ketahanan Pangan Terbaik Tahun 2022 an. Azri Wali Nagari Padang Bintungan Kec. Nan Sabaris.

Gambar 3.20

Piagam Penghargaan Peringkat 1 Penyuluh Pertanian PNS Teladan Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Distan KP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sektor perdagangan terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran : Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, rumah makan/restoran dan perhotelan.

(a) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi dan capaian IKU “Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8,58	10,44	121,67	Sangat Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tahun 2022, realisasi capaian indikator kinerja utama sektor perdagangan terhadap PDRB adalah sebesar 10,44% dari target yang ditetapkan sebesar 8,58%. Hal ini menjadikan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mendapatkan kategori “Sangat Berhasil” dikarenakan realisasi yang didapat melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 1,86%. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah rasio antara nilai PDRB sektor perdagangan dengan nilai PDRB kabupaten yang dinyatakan dalam persentase.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

(b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut akan ditampilkan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB” tahun 2021 dengan tahun 2022.

Tabel 3.24

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	10,65	8,58	10,44	121,67

Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

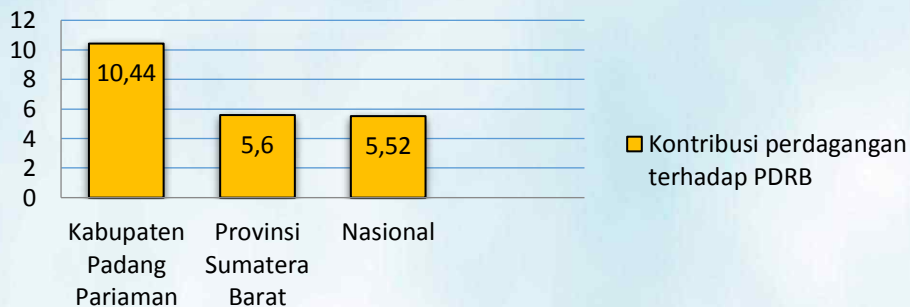
Berdasarkan tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa realisasi tahun 2021 sebesar 10,65% dan mampu melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 8,52%. Sedangkan realisasi tahun 2022 sebesar 10,44% dari target yang telah ditetapkan sebesar 8,58%. Berikut akan ditampilkan melalui garfik mengenai perbandingan realisasi nasional, provinsi, dan kabupaten terkait PDRRB pada tahun 2022.

(c) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Tahun 2022

Adapun Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4 Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Terkait PDRB Tahun 2022

Kontribusi perdagangan terhadap PDRB



Sumber : BPS Padang Pariaman & Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB antara lain terdiri dari 3 sub sektor yaitu perdagangan besar dan eceran, rumah makan/restoran dan perhotelan.

(d) Upaya-Upaya Dalam Mencapai Target Indikator Kinerja

Untuk mencapai target Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa upaya yaitu :

1. Melakukan Monitoring terhadap penyaliran pupuk bersubsidi.
2. Menerbitkan Rekomendasi bagi pembangunan dan perpanjangan izin Gudang yang akan diteruskan ke DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman.
3. Melakukan Revitalisasi Pasar Rakyat yang melibatkan Dinas PUPR Kabupaten Padang Pariaman.
4. Memantau Stabilitas harga kebutuhan Bahan Pokok.
5. Melakukan tera/tera ulang bagi alat ukur dan timbangan dalam upaya perlindungan konsumen.
6. Melakukan pemantauan terhadap pengepul dan eksportir.
7. Memfasilitasi promosi bagi produk unggulan daerah melalui berbagai event daerah/nasional.

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain adanya refocusing anggaran diantaranya :

- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 29.989.800
- Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Rp. 47.916.200

- Program Pengembangan Ekspor Rp. 15.539.800
- Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Rp. 49.999.900
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Rp. 48.529.760

(f) Program dan Hasil Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Untuk mencapai Indikator kinerja Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM melaksanakan beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran Rp. 29.989.800 dan realisasi anggarannya Rp. 29.849.800 atau dengan persentase 99,53 % dengan kegiatannya.
 - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya dengan anggarannya Rp. 29.989.800 dan realisasi anggarannya Rp. 29.849.800 atau dengan persentase 99,53 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggarannya Rp. 29.989.800 dan realisasi anggarannya Rp. 29.849.800 atau dengan persentase 99,53%.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya Pembuatan Proposal Pembangunan Pasar Rakyat yang representatif sebanyak 10 Proposal (Pasar Sungai Geringging, Pasar Sungai Limau, Pasar Kampung Dalam, Pasar Pauh Kamar, Pasar Pakandangan, Pasar Sintuk, Pasar Kp. Galapung Ulakan, Pasar Pasar Usang, Pasar Kayu Tanam, Pasar Sicincin).
- b. Adanya jumlah pasar yang di perdayakan / dibina, yaitu Pasar Batu Basa di Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Gambar 3.21

Pemantauan ke Sejumlah Pasar di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan anggaran Rp. 47.916.200 dan realisasi anggarannya Rp. 46.446.500 atau dengan persentase 96,93% dengan kegiatannya.
 - Kegiatan Pengendalian harga, dan Stik Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 22.964.200 dan realisasi anggarannya Rp. 22.739.500 atau dengan persentase 99,02% dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 22.964.200 dan realisasi anggarannya Rp. 22.739.500 atau dengan persentase 99,02%.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Target Jumlah Pasar yang dipantau ada 39 Pasar, tetapi hanya 22 Pasar yang tercapai pemantauannya.
- b. Target Operasi Pasar yang akan dilakukan 15 kali, tetapi hanya 7 kali Operasi Pasar yang terealisasi yaitu :
 - Pasar Pakandangan 2 Kali Pelaksanaan
 - Pasar Kayu Tanam 1 Kali Pelaksanaan
 - Pasar Sei. Limau 2 Kali Pelaksanaan
 - Didepan Kantor Camat Enam Lingkung 1 Kali Pelaksanaan
 - Di Nagari Padang Toboh Ulakan Kec. Enam Lingkung

Gambar 3.22
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggarannya Rp. 24.952.000 dan realisasi anggarannya Rp. 23.707.000 atau dengan persentase 95,01 % dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dengan anggarannya Rp. 24.952.000 dan realisasi anggarannya Rp. 23.707.000 atau dengan persentase 95,01 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah Distributor Pupuk yang memiliki legalitas lengkap sebanyak 7 Distributor.
- b. Jumlah Kios Pupuk bersubsidi yang memiliki legalitas lengkap.

Gambar 3.23

Kegiatan Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan dalam Rangka Survei ke Kios Pupuk



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran Rp. 15.539.800 dan realisasi anggarannya Rp. 15.434.800 atau dengan persentase 99,32 % dengan kegiatannya.
 - Kegiatan Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran Rp. 15.539.800 dan realisasi anggarannya Rp. 15.434.800 dengan persentase realisasi 99,32 % dari kegiatan tersebut terdapat sub Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 15.539.800 dan realisasi anggarannya Rp. 15.434.800 dengan persentase realisasi 99,32%.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Tercapainya koordinasi dengan instansi terkait dan pedagang komoditi tentang peningkatan dan pengembangan Ekspor daerah di 11 Kecamatan.
- b. Bertambahnya jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina, yaitu ada 4 pelaku usaha.

Gambar 3.24
Survei Komoditi Ekspor/Pinang



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran Rp. 49.999.900 dan realisasi anggarannya Rp. 49.954.456 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,91 % dengan kegiatannya.
 - Kegiatan Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan dengan anggaran Rp. 49.999.900 dan realisasi anggarannya Rp. 49.954.456 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,91% dari kegiatan tersebut terdapat sub kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dengan anggaran Rp. 49.999.900 dan realisasi anggarannya Rp. 49.954.456 atau dengan persentase realisasi anggaran 99,91%.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Terlayannya pemilik UTTP untuk permintaan tera/tera ulang UTTP nya.
- b. Tersedianya data UTTP yang telah ditera ulang di Kabupaten Padang Pariaman.
- c. Jumlah UTTP yang ditera/tera ulang tahun 2022 sebanyak 713 UTTP.
- d. Jenis UTTP yang ditera ulang adalah:
 - Pompa ukur BBM sebanyak 129 nozzle
 - Timbangan jembatan sebanyak 12 unit
 - Timbangan elektronik sebanyak 120 unit
 - Timbangan Ashpalt Mixing Plant (AMP) sebanyak 24 unit
 - Timbangan Batching Plant sebanyak 23 unit

- Anak timbangan sebanyak 151 unit
 - Timbangan pegas sebanyak 183 unit
 - Dacin logam sebanyak 15 unit
 - Timbangan sentisimal sebanyak 32 unit
 - Timbangan bobot ingsut sebanyak 2 unit
 - Neraca sebanyak 6 unit
 - Timbangan meja sebanyak 8 unit
 - Timbangan crane sebanyak 2 unit
 - Meter arus bahan bakar minyak sebanyak 6 unit
- e. Pasar-pasar yang dilaksanakan sidang tera, tera ulang adalah pasar batubasa, pasar pauh kamba, pasar lubuk alung, pasar sungai sarik, pasar lubuk alung, pasar padang sago, pasar sungai geringging, pasar sungai limau.
- f. Jumlah pelaksanaan tera, tera ulang pada UTTP terpasang sebanyak 18 perusahaan, 8 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, 3 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, 8 Pertashop, 1 Depot Pengisian Pesawat Udara, 1 Bandara dan 1 Bandara Cargo.
- g. Target UTTP yang ditera tahun 2022 adalah 1100 UTTP, realisasi tahun 2022 sebesar 719 UTTP jadi persentase 65,36%.
- h. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 36.279.700 dari target PAD sebesar Rp. 40.000.000 atau sebesar 90,699%.

Gambar 3.25**Pelaksanaan Kegiatan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

5. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran Rp. 48.529.760 dan realisasi anggarannya Rp. 48.004.560 atau dengan persentase realisasi anggaran 98,92 % dengan Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan sub kegiatan Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 48.529.760 dan realisasi anggarannya Rp. 48.004.560 atau dengan persentase realisasi anggaran 98,92 %.

Hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Pelaku UMKM yang terfasilitasi, yaitu dari Target 50 Orang Pelaku UMKM yang difasilitasi, tercapainya 120 Orang Pelaku UMKM yang di fasilitasi dalam acara Pameran/Event yang dilaksanakan.
- Bertambahnya tiap tahun jumlah Pameran/Event-Event yang diikuti, yaitu Inacraft di Jakarta, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) yang dilaksanakan di Padang, Minang Creft tang dilaksanakan di Padang dan Pedati yang dilaksanakan di Bukittinggi.
- Terlaksananya kegiatan Pelatihan untuk Kegiatan Promosi/Pameran untuk diikuti, yang di laksanakan di Hotel Bumi Minang di Padang sebanyak 2 kali yaitu : tanggal 08 Agustus 2022 dan 22 Agustus 2022.

Gambar 3.26

Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(g) Penghargaan

Dari kegiatan tersebut selain berdampak terhadap peningkatan kinerja juga melahirkan beberapa prestasi di sektor perdagangan pada Tahun 2022 seperti :

1. Juara III Lomba Pasar Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diraih oleh Pasar Batu Basa Kecamatan IV Koto Aur Malintang.

Gambar 3.27
Penghargaan Juara III Lomba Pasar
Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Juara III Lomba Booth Creative Pada Acara Minang Crev

Gambar 3.28
Penghargaan Juara III Lomba Booth Creative
Pada Acara Minang Crev



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Juara I Enumerator Terbanyak Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.29
Penghargaan Juara I Enumerator Terbanyak
Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	12,6	6,87	55%	Kurang Berhasil

Sumber : BPS Padang Pariaman & DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Nilai PDRB pada tahun 2022 memiliki target sebesar 12,6% dengan realisasi yang dicapai hanya 6,87%. Menurunnya PDRB diakibatkan oleh faktor kenaikan harga terhadap beberapa bahan baku yang digunakan oleh IKM sehingga mengakibatkan

IKM/pelaku usaha yang ada tidak melakukan proses produksi. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB adalah rasio antara nilai PDRB sektor industri pengolahan dengan nilai PDRB kabupaten yang dinyatakan dalam persentase. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kabupaten}} \times 100\%$$

Berikut akan disajikan perbandingan realisasi capaian Indikator Kinerja Utama “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” tahun 2021 dengan tahun 2022.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan target dan realisasi capaian IKU “Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB” pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	%	11,8	12,6	6,87	55%

Sumber : BPS Padang Pariaman & DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

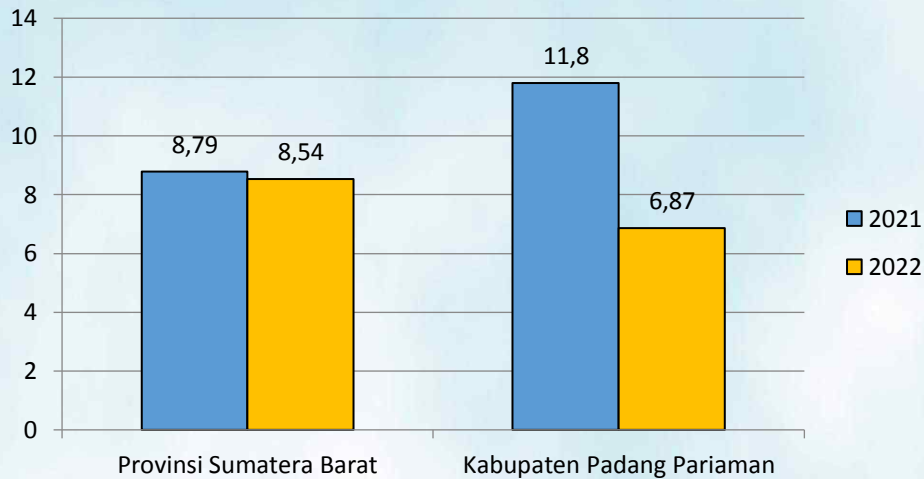
Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,93% dibandingkan tahun 2021. Persentase yang dicapai pada tahun 2021 adalah sebesar 11,8% sedangkan persentase pencapaian pada tahun 2022 hanya sebesar 6,87%. Tentu hal ini dikarenakan oleh faktor kenaikan harga bahan baku yang digunakan oleh pelaku usaha, sehingga mengakibatkan pelaku usaha tersebut mengalami kesulitan dalam proses produksi.

(c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2022

Berikut akan ditampilkan melalui garfik mengenai perbandingan realisasi nasional, provinsi, dan kabupaten terkait PDRRB pada tahun 2022.

Grafik 3.5

Perbandingan Realisasi Provinsi dan Kabupaten Terkait Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman

Jika dibandingkan persentase pencapaian Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Padang Pariaman terkait Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (nilai distribusi barang dan jasa) tahun 2021 dan tahun 2022 yakni sama-sama mengalami penurunan. Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sebesar 0,25% sedangkan Kabupaten Padang Pariaman mengalami penurunan sebesar 4,93%.

(d) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Capaian IKU

Dari hasil capaian dan interpretasi kinerja seperti uraian diatas dapat kita jelaskan beberapa hambatan yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman antara lain :

- Kenaikan harga bahan baku mempengaruhi jumlah produksi pelaku usaha Industri Kecil dan Menengah yang cenderung menurun pada Tahun 2022 ;
- Keterbatasan Modal yang dimiliki Pelaku Usaha Industri Kecil dan menengah mempengaruhi jumlah produk yang dihasilkan ;
- Keterbatasan sarana produksi berupa peralatan mesin dan pada umumnya masih mengolah produk dengan cara tradisional mengakibatkan terbatasnya hasil produk yang dibuat oleh pelaku usaha industri kecil dan menengah.

Sementara itu ada juga hal-hal mendukung capaian kinerja namun tidak signifikan mempengaruhi capaian kinerja antara lain :

- Keinginan IKM untuk tetap produksi ditengah kenaikan harga karena usaha mereka pada umumnya penunjang ekonomi keluarga ;
- Pada Umumnya usaha yang mereka rintis merupakan usaha keluarga dan cenderung kearifan lokal.

Gambar 3.30 Kunjungan Kelapangan Tentang Produk Olahan



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Upaya-Upaya Pendukung Capaian IKU

Adapun upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah dengan melakukan penyuluhan langsung yang dilakukan secara stimulan terhadap IKM yang terdampak dengan mensupport melalui bantuan pemasaran produk melalui online.

Gambar 3.31 Pembinaan IKM melalui Pelatihan Pengelolaan Bisnis dan Managemen Kewirausahaan



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM) meningkat pada tahun 2022 sebesar 18,72%. Meningkatnya jumlah industri yang ada di Kabupaten Padang Pariaman diakibatkan pada tahun anggaran 2022 Bidang Bina Industri DPMPTP mendapatkan DAK Non Fisik dari Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 2.079.900.000 sehingga banyak IKM yang mendapatkan pelatihan, pembinaan, pengawasan dan pengembangan terhadap IKM.

Sementara itu dari program/kegiatan mendukung capaian kinerja antara lain sebagai berikut :

(e) Progran-Program Pendukung Capaian IKU

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran DAK Fisik dan DAK Mom Fisik sebesar Rp.19.895.166.242,- terealisasi sebesar Rp. 16.573.337.102,- dengan Persentase 83,22%.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
 - Faktor Pendukung Keberhasilan yaitu di harapkan tersedianya APBD untuk sosialisasi dan pelaksanaan Perda yang ada dan Perlu di anggarkan kembali untuk sosialisasi perda RPIK di tahun 2023.
 - Faktor Penghambat capaian :
 - a. Tidak terlaksananya sosialisasi perda RPIK karena penetapan perda yang akan disosialisasikan tidak terlaksanan di tahun 2022 ;
 - b. Sinkronisasi program dan kegiatan antara OPD yang masih kurang ;
 - c. Ranperda yang dibuat tahun 2022 belum ditetapkan jadi perda di tahun 2022 (Belum ada Penomoran terhadap Naskah tersebut dari bagian Hukum Sehingga dana yang ada pada kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ini untuk Kegiatan sosialisasi Perda RPIK terhadap Stake holder tidak bisa dilakukan.
3. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
 - Faktor Pendukung Keberhasilan yaitu :
 - a. 23 IKM yang di usulkan untuk sertifikasi halal, sukses semua karena kesadaran IKM terhadap pentingnya sertifikasi produk sudah meningkat ;
 - b. Tersedianya dana DAK 2022 untuk kelanjutan pembangunan sentra IKM coklat.
 - Faktor Penghambat capaian:
 - a. Kemampuan IKM untuk memenuhi standarisasi sertifikat sangat sudah tinggi namun Anggaran yang tersedia sangat terbatas sehingga IKM yang terfasilitasi harus di seleksi berdasarkan kriteria yang sudah di tetapkan ;

SASARAN STRATEGIS 7**Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin**

Sasaran strategis “Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ketiga yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah Tingkat Kemiskinan. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut:

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat kemiskinan” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
Tingkat kemiskinan	%	6,99	6,25	110,59%	Sangat Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

**“Semakin Rendah Capaian Tingkat Kemiskinan
Maka Semakin Baik Capaian Kinerja”**

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target dan realisasi tahun 2022 bahwa Sasaran IKU Tingkat Kemiskinan dinilai berhasil dengan realisasi 6,25 % dari target 6,99% dengan persentase capaian sebesar 110,59%. Meskipun tahun 2022 diwarnai dengan inflasi yang cukup mengganggu perekonomian masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan tetap mencapai target karena bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tergolong kedalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berikut ini adalah perbandingan realisasi Tingkat Kemiskinan pada tahun 2022 dengan Tahun 2021:

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU “Tingkat kemiskinan” pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

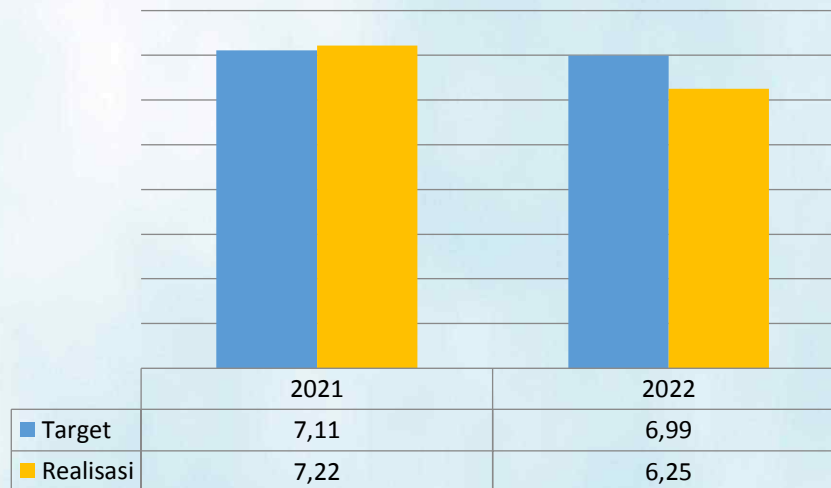
Tabel 3.28
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat kemiskinan	%	7,22	6,99	6,25	110,59	Sangat Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja Tingkat Kemiskinan tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 yaitu sebesar 0,97%. Ini membuktikan keberhasilan program yang berkaitan dengan PPKS terutama tentang bantuan sosial dan SPM.

Grafik 3.6
Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 dan Target 2022

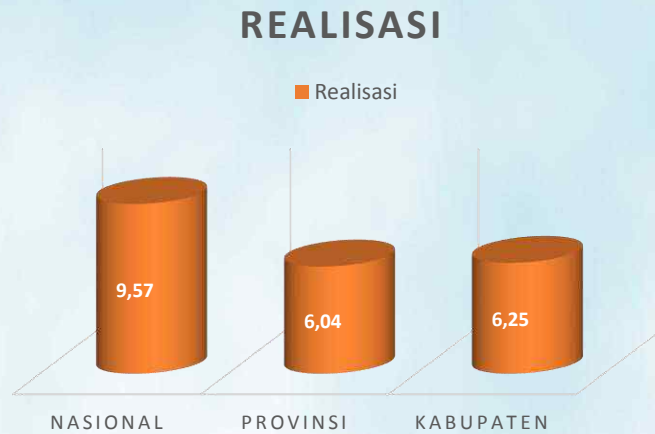


Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022

Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.7 Perbandingan Capaian IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman per September tahun 2022 berada di bawah angka tingkat kemiskinan nasional dengan selisih 3,32%. Namun, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat, tingkat kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 lebih tinggi 0,21%. Tingkat kemiskinan nasional yang naik dari data bulan Maret 2022 (9,54%) akibat inflasi kenaikan bahan pangan pokok seperti goreng dan cabai pada pertengahan tahun 2022. Padang Pariaman juga mengalami kenaikan yang awalnya berada pada angka 5,92 pada Maret 2022, namun kenaikan tersebut belum melewati tingkat kemiskinan nasional pada akhir tahun 2022.

**Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Jangka Menengah						Realisasi Jangka Menengah						Kategori
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Berkurangnya Jumlah Penduduk Miskin	Tingkat Kemiskinan	%	7,26	7,11	6,99	6,87	6,74	6,61	6,48	7,22	6,25	0	0	0	0	Berhasil

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Keberhasilan Padang Pariaman dalam menekan angka kemiskinan di Tahun 2022 hingga menjadi di bawah target yang ditetapkan sebelumnya tidak terlepas dari kerjasama dari berbagai pihak dalam pemerintahan Kab. Padang Pariaman dan stakeholders yang berasal dari luar pemerintahan. Dengan kolaborasi tersebut membantu jalannya kegiatan-kegiatan yang memberikan efek baik

secara langsung ataupun tidak langsung pada berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Padang Pariaman.

Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat dua inovasi daerah yang menjadi program yang diciptakan dengan istilah PLEASE CARE PAPA. Dimana program inovasi ini berupaya untuk mengakomodir semua pengaduan masyarakat baik itu masalah sosial maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian ada inovasi DUYAN BASO (PengaDUan dan PelaYANan BAntuan SOsial) dimana program inovasi ini berupaya untuk mengakomodir semua pengaduan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait bantuan sosial.

Gambar 3.32
Inovasi Please Care PAPA dan Duyan Baso



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(d) Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Untuk mewujudkan agar indikator ini tercapai, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan berbagai upaya. Adapun program yang dilakukan oleh yang mendukung untuk sasaran ini adalah :

- a. Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
 1. Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2022, disalurkan bantuan sembako pada masyarakat miskin sebanyak 20 orang dengan lokasi 7 Kecamatan yaitu Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kecamatan Lubuk Alung, Kecamatan Ulakan, Kecamatan Batang Anai, Kecamatan 2 X 11 Kayu Tanam, Kecamatan Enam Lingkung dan Kecamatan VII Koto. Penyerahan sembako langsung diserahkan oleh Ketua LKKS yaitu Ibu Yusrita Suhatri Bur dan didampingi Dinas Sosial P3A.

Gambar 3.33 Penyerahan Bantuan Sembako oleh Ketua LKKS



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2022 ini terjadi penurunan dalam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dimana pada tahun 2021 terdapat lebih kurang sejumlah 46.744 KPM jika dibandingkan dengan jumlah tahun 2022 sebanyak 18.503 KPM. Hal ini dikarenakan adanya graduasi KPM PKH yang terjadi di tiap triwulan.

Gambar 3.34 Penyaluran Jaminan Sosial Keluarga pada KPM PKH



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Penyaluran Bantuan Sosial Sembako. Penyaluran bantuan sembako ini diberikan kepada keluarga miskin berdasarkan data DTKS Kementerian Sosial RI, penyaluran bantuan melalui transfer rekening KPM untuk pembelian kebutuhan sembako di E-Warung yang ditunjuk. Nilai bantuan yang disalurkan sebesar Rp. 200.000,- per bulan. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 24.432 KPM.
4. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Untuk Tahun 2022 telah disalurkan BLT BBM bagi 70.083 KK miskin yang masuk ke dalam DTKS. Nilai bantuan sebesar

Rp. 150.000,- per bulan selama 3 bulan terhitung mulai September s.d November 2022.

Gambar 3.35
Penyaluran BLT BBM



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

b. Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan kegiatan diantaranya adalah :

1. Kegiatan Penyediaan Permakanan. Kegiatan ini melaksanakan pembinaan dan pemberian bantuan sembako pada anak terlantar diluar panti sebanyak 30 anak dengan rincian sebagai berikut :

- Panti Asuhan Aisyiyah Lubuk Alung sebanyak 5 anak asuh luar panti.
- Panti Asuhan Alkautsyar Pakandangan sebanyak 5 anak asuh luar panti.
- Panti Asuhan Mukarramah Pauh Kamar sebanyak 5 anak asuh luar panti.
- Panti Asuhan Mutiara Budi Lubuk Alung sebanyak 5 anak asuh luar panti.
- Panti Asuhan Amal Bakti Sicincin sebanyak 5 anak asuh luar panti.
- Panti Asuhan Bakti Wanita Islam Lubuk Alung sebanyak 5 anak asuh luar panti.

Selain kepada anak terlantar luar panti, juga diberikan bantuan permakanan kepada lansia terlantar di luar panti sebanyak 30 orang dengan rincian 10 lansia berasal dari Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, 10 lansia berasal dari Kecamatan Padang Sago, dan 10 lansia berasal dari Kecamatan Batang Gasan.

Gambar 3.36

Penyerahan Bantuan Permakanan untuk Lansia



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bantuan permakanan berupa sembako kepada 10 orang disabilitas terlantar di luar panti dengan rincian :

- 2 orang disabilitas terlantar di luar panti dari Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.
- 2 orang disabilitas terlantar di luar panti dari Kecamatan Ulakan Tapakis.
- 2 orang disabilitas terlantar di luar panti dari Kecamatan VII Koto.
- 3 Orang disabilitas terlantar di luar panti dari Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung.
- 1 orang disabilitas terlantar di luar panti dari Kecamatan V Koto Kampung Dalam.

Paket bantuan Sembako berupa bahan makanan dalam bentuk susu, beras, mie instan, minyak goreng, teh, gula dan telur. Bantuan tersebut diberikan secara bertahap melalui dana APBD 2021.

- c. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan penanganan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial, dengan program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya untuk membantu korban selama tahun 2022 dengan tiga kegiatan, yaitu Penyediaan Sandang, Penyediaan Makanan dan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan.

Gambar 3.37
Penyerahan bantuan bahan makanan dan logistik
oleh Bupati Padang Pariaman untuk Pondok Pesantren Nurul Yaqin yang
ditimpa Bencana Kebakaran



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.38
Penyerahan Bantuan Bahan Makanan dan Logistik
pada Korban Bencana Longsor di V Koto Kampung dalam



Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pencapaian target kinerja penyaluran bantuan bagi korban bencana tidak terlepas dari dukungan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kemanusiaan tersebut. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai merupakan syarat mutlak dalam memobilisasi bantuan bagi korban bencana. Dengan demikian masyarakat yang terkena bencana dapat terbantu tepat waktu. Disamping itu kesiapan Tim TAGANA juga tidak bisa dikesampingkan.

Gambar 3.39**TAGANA Kabupaten Padang Pariaman meraih Juara III dalam Lomba Manajemen Dapur Umum pada Apel Siaga Bencana Provinsi Sumatera Barat**

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Program yang mendukung untuk terlaksananya kegiatan ini adalah Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial. Selama tahun 2022 telah diberikan 62 perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial.

(e) **Crooscuting Bersama Unit Kerja Terkait**

Penangan masalah kemiskinan tidak hanya dibebani pada satu OPD Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, namun ada beberapa OPD lain yang terlibat (Crosscutting). Berikut adalah Crosscutting IKU Tingkat Kemiskinan dengan OPD lainnya :

a) Dinas Kesehatan

- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKPRujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk mencapai sasaran : Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Ukuran keberhasilan ini berupa Universal Coverage Visit Rage dan Universal Health Coverage. Indikator Universal Health Coverage tercapai sebesar 73,6 persen dari target 100 persen pada tahun 2021. Adapun upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kab. Padang Pariaman untuk pencapaian indikator ini adalah Rekonsiliasi data PBI JKN kabupaten bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Disdukcapil.

b) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

- Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah melanjutkan program beasiswa bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu termasuk beasiswa untuk menarik anak usia jenjang

pendidikan dasar yang berada diluar sistem sekolah, baik yang belum bersekolah maupun yang putus sekolah dengan tetap memberi perhatian pada keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai upaya yang dilakukan adalah dengan Pembangunan Gedung Ruang Kelas, Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik, Pengadaan Alat Praktek dan Penyelenggaraan Proses belajar pendidikan nonformal/kesetaraan.

c) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 ha dalam satu daerah dengan sub kegiatan pendukungnya yang berkaitan dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin adalah Pembangunan jaringan irigasi permukaan, Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, serta Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota. Pada program ini yang berkaitan dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin adalah pembangunan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan dan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin adalah Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman.
- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota. Output dari sub kegiatan ini adalah panjang drainase lingkungan yang dibangun, dimana sistem drainase ini sangat bermanfaat bagi penduduk miskin terutama untuk pencegahan bencana banjir yang berpotensi membuat masyarakat menjadi kelompok rentan.
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota. Terinventarisasinya informasi jalan dan jembatan di Kabupaten Padang Pariaman serta tercapainya berlalu lintas dan mempertahankan kondisi jalan dan jembatan

sehingga memudahkan proses distribusi barang dan jasa dalam mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.

d) Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

- Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha. Pada tahun 2021 rasio rumah layak huni tercapai 100 persen dengan interpretasi berhasil. Keberhasilan ini karena dukungan pemerintah kabupaten padang pariaman dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi yang diharapkan pada program ini yaitu meningkatnya kepemilikan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota. Kondisi yang diharapkan dari program ini yang berkaitan dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin yaitu meningkatnya ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap status baku mutu air.
- Pengelolaan Sampah. Pada program ini, mengoptimalkan penanganan sampah dengan tolak ukur kinerja persentase timbulan sampah yang dikelola. Sampah mempunyai potensi untuk mencemari air, artinya dapat mempengaruhi kualitas air. Untuk itu sampah perlu penanganan yang serius agar Indeks Kualitas Air dapat terjaga. Terjaganya Indeks Kualitas Air bisa meningkatkan kesehatan masyarakat dan ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah penduduk miskin.

e) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan. Kegiatan ini sangat berhubungan dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin karena dapat memantau pengaruh fluktuasi harga pangan dan pengaruhnya pada PPKS.

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Adapun upaya yang dilakukan pada program ini adalah melalui Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota. Dengan program ini, masyarakat bisa menggunakan sarana pertanian yang dikelola untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
- Pengembangan Prasarana Pertanian. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tersier berfungsi untuk masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan sebagai petani, buruh tani dan pekerjaan lainnya yang bisa mendukung pekerjaan masyarakat miskin tersebut.
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota. Upaya yang dilakukan dalam Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah Pemberian bantuan berupa bibit unggul yang tahan terhadap hama.
- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. Melalui pemberdayaan masyarakat petani, salah satunya pelaksanaan kegiatan Perkarangan Pangan Lestari (P2L) yang dilaksanakan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT), kegiatan ini berupaya meningkatkan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan potensi perkarangan yang ada. Pada kegiatan ini diberikan bantuan bibit tanaman dan pembangunan rumah produksi, sehingga dapat menekan pengeluaran keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disamping itu, kegiatan ini juga bisa menambah pendapatan keluarga.

f) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota. Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Keberdayaan Masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan terlepas dari jerat kemiskinan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan BUMNag.

g) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dengan kegiatan meningkatkan peserta KB aktif
- Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan sasaran PUS Keluarga miskin yang mendapatkan Pelayanan dan Alat kontrasepsi KB.

h) Dinas Perdagangan, Tenaga Kera, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK). Dalam rangka penyusunan rencana tenaga kerja dilakukan pendataan tenaga kerja yang Produktif yang menganggur di setiap Nagari, Kecamatan dan Potensi Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja yang akan di lakukan di Nagari dan Kecamatan tersebut sesuai dengan Minat Pencari Kerja, juga perlu perhatian pemerintah Daerah agar menyalurkan Dana yang optimal terhadap Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja yang berbasis di Nagari dan Kecamatan.
- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi. Kegiatan pelatihan ini membantu masyarakat memperdalam kompetensi mereka yang tentunya dapat mereka gunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi tersebut.
- Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota. Pencari Pekerjaan yang memiliki Kartu AK.I tentu bisa mendapatkan kesempatan kerja yang lebih besar lagi.
- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilakukan untuk Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Memberikan pembinaan kepada koperasi yang belum dan tidak melaksanakan RAT.
- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil. Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan Fasilitas Unit Usaha Mikro dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Kegiatan Fasilitas Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi melakukan Pembentukan Forum Komunikasi UMKM
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan. Pembangunan pasar rakyat di Kabupaten Padang Pariaman dialokasikan melalui dana DAU disamping juga sumber dana lainnya yang salah satunya dari dana DAK dan dana Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan serta dana DAK Kementerian Koperasi melalui penguatan modal koperasi pasar.
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

i) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

j) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan yakni terkait

dengan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang akan berdampak terhadap peningkatan jumlah investor dan nilai investasi di Padang Pariaman.

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi wisata.

- Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota.

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) yang terlatih dan tersertifikasi dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan baik manca negara maupun lokal. Pelatihan yang telah dilakukan berupa pelatihan pemandu wisata outbond, Pelatihan Pemandu Balawisata (Lifeguard), Pelatihan tata kelola destinasi pariwisata, pelatihan pemandu wisata selam, pelatihan mitigasi bencana, Pelatihan pengelolaan desa wisata, dan Pelatihan manajemen home stay.

k) Dinas Perikanan

- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dimaksudkan untuk fasilitasi pengurusan sertifikat hak atas tanah (SEHATKAN) sebanyak 100 persil untuk nelayan yang dapat dimanfaatkan sebagai akses perbankan guna peningkatan permodalan usaha yang bertujuan untuk peningkatan produksi perikanan tangkap. Sertifikat pengurusan sertifikat tanah bagi nelayan melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman. Sertifikat tersebut dapat digunakan sebagai jaminan bagi nelayan untuk mendapatkan modal dari pihak perbankan dalam mengembangkan usahanya.
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

- Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kegiatan ini dilaksanakan melalui peningkatan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil yang dimaksudkan untuk pengembangan wirausaha perikanan sebanyak 1 (satu) lokasi melalui pengadaan sarana produksi budidaya pembesaran ikan konsumsi (lele dan pakan ikan), dan pemberian pendampingan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk Temu lapang yang dilaksanakan untuk penerima bantuan sebanyak 1 kali dengan jumlah peserta 21 orang yang berasal dari 10 kelompok.
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah Penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dimaksudkan untuk rehabilitasi kolam atau bak pemisahan induk/calon induk/larva/tandon BBI Lubuk Alung dnegan luas 434,413 m2 yang didanai melalui DAK, Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan, yang dimaksudkan untuk operasional administrasi BBI Lubuk Alung, pengadaan sarana budidaya ikan air tawar untuk 17 Pokdaskan, pengadaan 261 kg induk unggul, pengadaan 42 unit kolam terpal, penyediaan 1,3 ton pakan ikan dan penyediaan 260.000 ekor benih ikan yang didanai melalu DAK, Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkugnan budidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, yang dimaksudkan untuk pelatihan pengendalian hama penyakit dengan jumlah peserta 20 orang dengan menyediakan 3 paket vitamin dan obat-obatan ikan, Perencanaan dan pengembagnan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan 1 (satu) kali pelatihan teknis pembenihan/budidaya ikan dengan peserta yang berasal dari pelaku usaha budidaya ikan/UPR sebanyak 15 orang
- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Pelaksanaan kegiatan berupa peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan melalui sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan) dan penguatan kelembagaan poklahsar.

1) Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian. Sub kegiatan Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak HPT, Bahan Pakan/Pakan berkaitan secara tidak langsung dengan sasaran berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan berupa pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya.
- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan terkait program ini adalah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis, pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular, penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan dan pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner.

m) Sekretariat Daerah

- Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam. Kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, perikanan, air dan lingkungan hidup.

(e) Realisasi Anggaran Terkait IKU Tahun 2022

Realisasi keuangan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 :

Tabel 3.30
Realisasi Anggaran untuk IKU Tingkat Kemiskinan Tahun 2022

NO	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)	Capaian Program/Kegiatan
VI.	Program Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	148.890.000	130.002.400	87,31	
14	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	18.490.000	15.846.500	85,70	<ul style="list-style-type: none">• Telah diikuti penilaian Pilar-Pilar sosial tingkat Propinsi yang diutus pada TKSK Kecamatan Ulakan Tapakis.• Telah dilakukan evaluasi kinerja TKSK, penggantian dan rekrutmen TKSK Kecamatan V Koto Kp. Dalam dan IV Koto Aur Malintang.
15	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	96.728.000	82.446.200	85,24	<p>a) Terlaksananya a monitoring sembako/ BPNT sebanyak 12 kali.</p> <p>b) Penyaluran BPNT melalui PT. POS sebanyak 24.374 KPM.</p> <p>c) Terlaksananya a monitoring dan evaluasi bantuan BLT BBM sebanyak 14 kali.</p>
16	Peningkatan	22.697.000	22.247.200	98,02	<ul style="list-style-type: none">• Tersalurnya

	Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				bantuan sembako pada masyarakat miskin sebanyak 20 orang/paket pada 7 Kecamatan.
17	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	10.975.000	9.462.500	86,22	Terlaksananya bimtek LK3 sebanyak 30 orang yang terdiri dari perangkat nagari, pemuka masyarakat, guru BK, dan pengurus LK3.
VII.	Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	136.882.500	134.921.465	98,57	
18	Penyediaan Permakanan	80.000.000	79.356.465	99.20	Tersalurnya bantuan sembako pada anak terlantar diluar panti sebanyak 30 anak.
19	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	7.820.000	7.637.600	97,67	Tersalurnya bantuan sembako pada penyandang disabilitas terlantar diluar panti sebanyak 10 orang.
20	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	37.035.000	36.517.400	98,60	Tersalurnya bantuan sembako pada lanjut usia terlantar sebanyak 30 orang.
21	Pemberian Layanan Data dan	12.027.500	11.410.000	94,87	• Jumlah Layanan Data

	Pengaduan				dan Pengaduan pada tahun 2022 sebanyak 2.365 orang
VIII.	Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	83.075.700	82.310579	99,08	
22.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	47.115.750	46.448.629	98,58	Jumlah DTKS Tahun 2022 sebanyak 68.443 KK / 212.929 jiwa
23.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	35.959.950	35.861.950	99,73	d)Telah dilaksanakan pendampingan PKH sebanyak 61 pendamping, 4 org operator, penerima PKH sebanyak 18.503 KPM.
IX.	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	135.496.500	134.351.969	99,16	
24	Penyediaan Makanan	66.275.700	65.685.929	99,11	Tersalurkannya bantuan makanan sebanyak 775 jiwa yang mengalami bencana alam dan bencana social.
25	Penyediaan Sandang	27.741.550	27.431.600	89,01	Tersalurkannya bantuan logistic/sandang sebanyak 775 jiwa yang mengalami bencana alam dan bencana social.
26	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	41.479.250	41.234.440	99,41	Tersalurnya bantuan rehab rumah korban

					kebakaran sebanyak 1 KK/1 rumah
X.	Program Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.350.000	7.006.000	95,32	
27	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	7.350.000	7.006.000	95,32	Terpeliharanya 3 TMP .

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Padang PARIaman, 2022

(f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\%$$

Pada tahun 2022 realisasi biaya untuk semua Program terkait IKU (tingkat kemiskinan) adalah Rp.410.022.813,- sedangkan target biaya untuk semua Program IKU (tingkat kemiskinan) adalah Rp.502.344.700- . Dengan rumus diatas diperoleh efisiensi biaya sebesar sekitar 0,81%.

Dibanding dengan tahun 2021 realisasi Rp. 566.234.685,- dengan target sebesar Rp. 641.853.700,- diperoleh efisiensi sebesar 0,88%. Persentase efisiensi ini secara Efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program/ Kegiatan secara teori masih sangat kecil, dan jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2021 sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2022 umum tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

SASARAN STRATEGIS 8**Peningkatan Daya Beli Masyarakat**

Sasaran strategis “Peningkatan Daya Beli Masyarakat” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi ketiga yaitu “Membangun Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Daya Dukung Sektor Primer dan Jasa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat”. Salah satu indikator tingkat perekonomian di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena, itu besar kecil nya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau per satu orang penduduk.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah PDRB/Income Per Kapita. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.31**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
PDRB/Income Per Kapita	Juta	46,98	*42,62	*95,49	Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

* : Data tahun sebelumnya

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Formulasi Pengukuran : } \frac{\text{Nilai PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat di lihat bahwa nilai target PDRB INCOME PERKAPITA Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 46,98 Juta yang mana data realisasi capaian indikator kinerja tahun 2022 belum di rilis. Oleh karena itu untuk realisasi PDRB INCOME PERKAPITA masih memakai data tahun sebelumnya yaitu data pada tahun 2021.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi PDRB pada tahun 2022 dengan Tahun 2021:

Tabel 3.32
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
PDRB/Income Per Kapita	Juta	42,62	46,98	*42,62	*95,49	Berhasil

Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

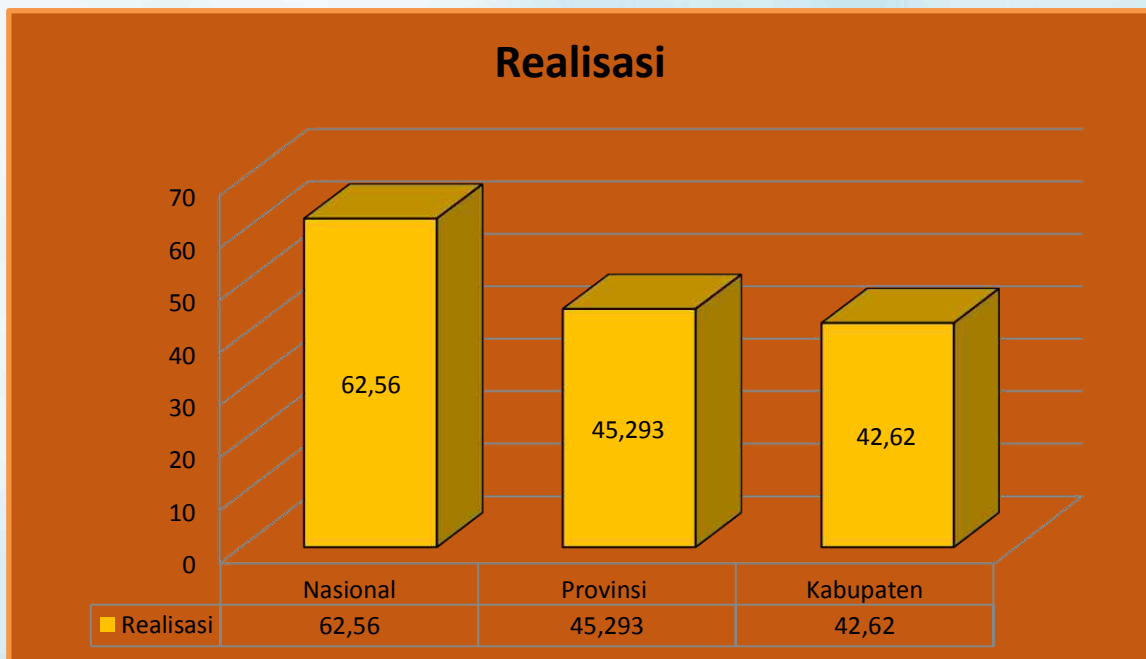
* : Data tahun sebelumnya

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa data capaian indikator kinerja PDRB/Income Per Kapita tahun 2022 belum rilis. Oleh karena itu masih memakai realisasi pada tahun 2021 yakni dengan target Indikator Kinerja Rp. 44,63 Juta mendapatkan realisasi sebesar Rp. 42,62 Juta dengan persentase capaian indikator kinerja sebesar 95,49%.

(c) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/Income Per Kapita

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/Income Per Kapita adalh sebagai berikut :

Grafik 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terkait PDRB PDRB/Income Per Kapita



Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian PDRB/Income Per Kapita Kabupaten Padang Pariaman sebesar pada tahun 2021 adalah Rp. 42,62 Juta/Tahun termasuk kategori “Berhasil”, dimana realisasi PDRB/Income Per Kapita nasional tahun 2022 adalah 62,56 juta/tahun dan realisasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebesar 45,293 juta/tahun.

Perekonomian Indonesia tahun 2021 yang di ukur berdasarkan PDB atas harga berlaku mencapai Rp.16.970.8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp.62,2 juta.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi di dibandingkan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 10,4655%, sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi di capai oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 24,04 persen.

(d) Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian

Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi di sebagian lapangan usaha, diantaranya :
 - a. Peningkatan sektor pertanian dan perkebunan.
 - b. Peningkatan sektor perikanan dan perdagangan yang mengalami peningkatan.
 - c. Peningkatan sektor kesehatan.

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, hampir semuanya mengalami percepatan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di capai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan kegiatan sosial sebesar 8,72 Persen dan paling rendah adalah lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar -10,54 persen. Membaiknya ekonomi masyarakat pulih sehingga meningkatnya kebutuhan dan pendapatan masyarakat, untuk komoditi hortikultura seperti cabe merah, cabe rawit, bawang merah dan bawang putih dan minyak goreng pada pertengahan tahun harganya naik sehingga daya beli masyarakat berkurang harga sudah turun dan stabil dan daya beli masyarakat kembali meningkat.

Selain faktor pendukung tersebut, terdapat beberapa hal yang menghambat pencapaian kinerja antara lain :

1. Tingkat perubahan harga yang naik dan tidak stabil;
2. Faktor iklim dan cuaca menyebabkan para petani mengalami gagal panen dan kematian mendadak pada hewan ternak ;
3. Banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, sehingga banyaknya masyarakat yang belum pasti memiliki pendapatan yang tetap.

4. Tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung tidak begitu tidak naik (tetap)
5. Tingginya tingkat konsumsi masyarakat yang bukan ke bahan pokok melainkan kehutangan (property, elektronik, pinjol dan hutang lainnya) yang banyak mengurangi pendapatan untuk melakukan pembayaran bunga ataupun pajaknya.
6. Investasi yang tidak pasti untuk menunjang perekonomian masyarakat

Adapun solusi yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian Nilai PDRB Income Per Kapita adalah sebagai berikut :

1. Menstabilkan harga kebutuhan pokok supaya daya beli masyarakat meningkat dengan cara menurunkan tingkat inflasi dengan menanam tanaman cabe, bawang dan sayur sayuran di pekarangan rumah.
2. Melakukan penanaman disaat iklim yang mendukung jika tidak bisa untuk mengganti dengan penanaman yang tahan terhadap iklim yang kurang baik (misal penanaman ubi kayu atau daun singkong) atau peningkatan produksi pada saat iklim baik dan bisa untuk melakukan penyimpanan cadangan pada saat iklim yang kurang baik.
3. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat supaya tidak terjadi lagi pengangguran.
4. Berhemat dalam konsumsi barang-barang yang kurang begitu penting, atau meningkatkan produktivitas untuk penambahan income (usaha tambahan dan pekerjaan part time)
5. Konsumsi kebutuhan yang akan lebih pentingnya (primer) dibandingkan dengan kebutuhan tersier .
6. Memberikan modal usaha kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dan Program dan Kegiatan untuk Menunjang Daya Beli Masyarakat :

Pada tahun 2022 di Dinas Perdagangan Tenaga kerja Koperasi dan UKM pada Bulan Maret 2022 mengadakan operasi pasar minyak goreng di Pasar Pakandangan Kecamatan Enam Lingsung, Pasar Kayu Tanam Kec. 2x11 Kayu Tanam, Pasar Sungai Limau, Kecamatan Sungai Limau. Pada bulan Mei 2022 mengadakan pasar murah sembako di Kecamatan Enam Lingsung. Pada bulan Desember 2022 kerjasama dengan Bulog, ITC, BPD cabang Lubuk Alung, Kecamatan Enam Lingsung, Kecamatan Sungai Limau kemudian diadakan pula di Pasar Sungai limau.

1. Kegiatan pengendalian distribusi dan perekonomian
 - Sub Kegiatan untuk pencapaian IKU dengan total anggaran Rp. 17.000.000 dan realisasi sebesar Rp. 16.800.000 dengan capaian 98,82%. Bagian perekonomian dan SDA dengan melakukan survey harga ke pasar-pasar nagari di

- lingkungan kabupaten Padang Pariaman (pasar Labuk alung, sicincin, kayutanam, sungai sariak, pekandangan, sungai limau, sungai geringging dan kampung dalam) selama 2022 dengan anggaran yang digunakan sebesar 11,6 juta rupiah, hal ini dilakukan agar para penjual tidak melakukan penimbunan stock barang dan menaikkan harga yang tidak wajar agar bisa terjadinya keseimbangan pasar.
2. Koordinasi, Sinkronisasi, monitoring dan Evaluasi kebijakn perikanan, pertanian dan perikanan (dana sebesar 4 juta rupiah).
 - Yang dilakukan melakukan kegiatan yang berasal dari dana alokasi khusus untuk kegiatan perikanan yaitu melakukan penyebaran bibit ikan gurami, lele dan ikan nila. Hal ini bertujuan untuk peningkatkan perekonomian masyarakat lingkungan setempat dan kelompok budidaya ikan, disaat sudah panen maka kelompok budidaya ikan bisa untuk melakukan budidaya kembali , penjualan dan pembagian hasil panen.
 - Yang dilakukan untuk kegiatan pertanian mengenai penanaman cabe, bawang dan sayur mayur yang dilakukan oleh kelompok wanita tani (KWT) guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lingkungan sekitar dan kelompok KWT dengan sistem penjualan hasil panen dan menanam hasil panen kembali.
 3. Koordinasi, sikronisasi, monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan hidup dan energy air (dana sebesar 2 juta rupiah).
 - Yang dilakukan melakukan koordinasi akan pengggunaan lahan yang sebelumnya tanah itu hutan lindung daerah yang digunakan untuk tanah produktif oleh petani, atau Tanah Objek Reformasi AGraria (TORA)
 - Melakukan koordinasi akan penggunaan air tanah dan tanah irigasi serta penggunaan sungai-sungai perairan akan pemanfaatan sungai oleh setiap masing-masing wali Nagari
 4. Kegiatan Dinas Perdagangan Tenaga kerja Koperasi dan UKM adalah operasi survei harga pasar di 17 Kecamatan dengan dana 25 juta rupiah.
 5. Rapat koordinasi dengan dinas terkait bazar kerjasama dengan antara BULOG, ITC, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BAZNAS, Bank Nagari , Nagari, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli dengan menggunakan anggaran dalam tahun 2022 sebesar 3 juta rupiah.

Gambar 3.40**Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait tentang Persiapan Acara Bazar Penyediaan Komoditas Pangan pada tanggal 29 November 2022**

Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

6. Kegiatan pemantauan harga pasar dan koordinasi dengan berbagai OPD yang terkait dari bagian Perekonomian dan SDA setdakab. Padang Pariaman yaitu sebesar 17 juta rupiah.

**Gambar 3.41
Survei Harga Pasar**

Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

7. Melakukan Penyebaran bibit ikan gurami bersama Dinas Perikanan di wilayah Ulakan tapakis, Lubuk Pandan dan Sungai Asam.
8. Melakukan Bazar di Pasar Pakandangan, Sungai Limau dan Kayu tanam (Bazar kerjasama antara BULOG, ITC, Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BAZNAS, Bank Nagari , Nagari, untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan daya beli.

Gambar 3.42
Kegiatan Bazar di Sejumlah Pasar Yang Ada di Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 9

Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja utama Kabupaten Padang Pariaman dengan Sasaran Strategis yakni Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat. Untuk mendukung indikator sasaran strategis Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman menjadikan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebagai Indikator Kinerja pada sasaran RPJMD Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat di Misi ke 4.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan data tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari Unsur -Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat. Karakteristik IPLM lebih menfokuskan pada sisi hulu yakni pengembangan dan penguatan kelembagaan dan infrastruktur perpustakaan.

Agar terwujudnya kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan tujuan pada Renstra 2021 s.d 2026 yakni Peningkatan Gerakan Literasi dan Budaya Membaca dengan sasaran Peningkatan Kualitas Layanan Perpustakaan dan Peningkatan Minat Baca Masyarakat. Dengan terukurnya tingkat pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman dapat dijadikan dasar sebagai pengembangan dan pembinaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat khususnya masyarakat Padang Pariaman.

Untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, mulai dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi perpustakaan, tenaga perpustakaan, pemustaka dan anggota perpustakaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan kajian Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat mulai dari tahun 2021 dan tahun 2022 yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur yakni :

1. UPLM 1 Pemerataan layanan perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan lembaga perpustakaan dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
2. UPLM 2 Ketercukupan koleksi perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan koleksi perpustakaan (satuan judul) dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
3. UPLM 3 Ketercukupan tenaga perpustakaan yaitu perbandingan antara ketersediaan tenaga perpustakaan (pustakawan dan tenaga teknis) dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
4. UPLM 4 Tingkat kunjungan masyarakat per hari yaitu perbandingan antara tingkat kunjungan masyarakat (pemustaka dan pengunjung), baik secara luring maupun daring, dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
5. UPLM 5 Jumlah anggota perpustakaan yaitu perbandingan antara jumlah anggota perpustakaan dengan aspek masyarakat berdasarkan jenis perpustakaannya.
6. UPLM 6 Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi yaitu perbandingan antara jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam sosialisasi dengan aspek masyarakat berupa jumlah populasi penduduk di suatu wilayah.
7. UPLM 7 Perpustakaan yang dibina sesuai standar yaitu perbandingan antara jumlah perpustakaan yang dibina sesuai standar, baik terakreditasi maupun belum terakreditasi, dengan aspek masyarakat berupa jumlah total perpustakaan per jenis yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan budaya literasi di Kabupaten Padang Pariaman Dinas Kearsipan dan Perpustakaan didukung oleh program dan kegiatan pada tahun 2022 berupa Program Pembinaan Perpustakaan dengan 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - ✓ Sub Kegiatan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan
 - ✓ Sub Kegiatan Pengembangan bahan pustaka

- ✓ Sub Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka
- 2. Kegiatan Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota
 - ✓ Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - ✓ Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca
 - ✓ Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diturunkan kedalam Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Target dan realisasi indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.33
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18,85	1,97	10,44	Tidak Berhasil

Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 tidak berhasil mencapai target RPJMD 2021-2026 dimana target dalam RPJMD sebesar 18,85 dan realisasi 1,97 dengan capaian persentase 10,44%.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022:

Tabel 3.34
Perbandingan Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1,84	18,85	1,97	10,44	Tidak Berhasil

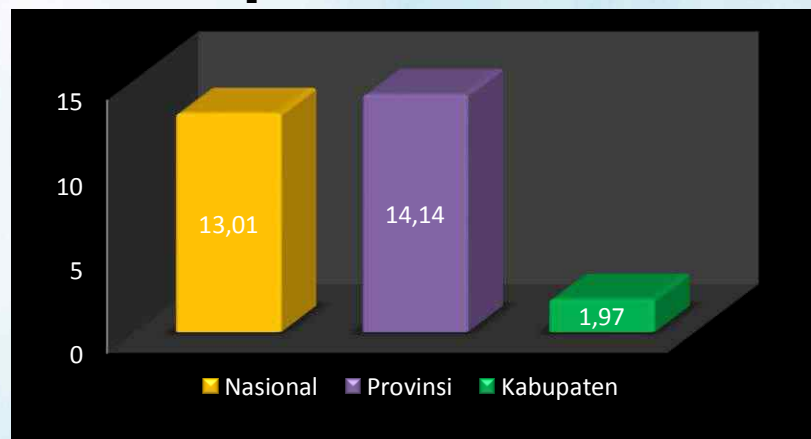
Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Terjadi peningkatan realisasi kinerja tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 1,84 dan tahun 2022 meningkat menjadi 1,97. Tetapi belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD

(c) Perbandingan Realisasi IKU Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan realisasi IKU Kabupaten dengan Nasional dan Provinsi tahun 2022 :

Grafik 3.9
Capaian Kinerja IPLM Kabupaten dibandingkan Capaian Provinsi dan Capaian Nasional Tahun 2022



Sumber : Dis. Arsip & Perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Realisasi IPLM tingkat Nasional adalah 13,01%, Provinsi Sumbar 14,14% dan Kabupaten Padang Pariaman 1,97%. Dari tabel tersebut dapat tergambar IPLM Kabupaten Padang Pariaman masih rendah dibandingkan dengan capaian realisasi IPLM Provinsi Sumbar dan Nasional untuk tahun 2022.

Indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan indikator kinerja utama Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026. Indikator ini ditetapkan karena merupakan isu strategis dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan menjadi indikator kinerja juga bagi Perpustakaan

Nasional Republik Indonesia dalam mengukur kinerjanya setiap tahun. Jika Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini tinggi maka dapat disimpulkan daerah tersebut merupakan daerah literasi yang akan berpengaruh terhadap wawasan masyarakat dan pendidikan masyarakat pada daerah tersebut. Terdapat 7 aspek dalam pengukuran IPLM tersebut yakni ; aspek Pemerataan layanan perpustakaan, aspek ketercukupan koleksi perpustakaan, Aspek Ketercukupan tenaga perpustakaan, aspek tingkat kunjungan masyarakat per hari, aspek perpustakaan yang ber SNP, aspek keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, dan aspek anggota perpustakaan.

Berikut rincian capaian kinerja ke 7 aspek IPLM di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 :

1. Aspek Pemerataan Layanan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui pemerataan layanan perpustakaan, sebaran perpustakaan, serta potensi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia baik perpustakaan umum, perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan khusus, diantaranya : Gedung, Infrastruktur IT, Anggaran dan Regulasi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio sebaran perpustakaan wilayahnya. Nilai pemerataan layanan perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1,27. Dimana angka tersebut didapat dari jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 559 perpustakaan per jumlah penduduk 438.022 jiwa di kali 1000.

2. Aspek Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan seluruh jenis perpustakaan, diantaranya ; jumlah koleksi (judul dan eksemplar), judul koleksi digital, berkala yang berlangganan, sirkulasi per bulan dalam 1 tahun dan anggaran pengadaan koleksi. Sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk per kapita dan rasio penduduk. Koleksi bahan perpustakaan berbasis wilayah. Capaian ketercukupan koleksi perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebesar 0,37%. Angka tersebut didapatkan dari jumlah koleksi 161.100 judul per jumlah penduduk 438.022 jiwa di Kabupaten Padang Pariaman.

3. Aspek Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan semua jenis perpustakaan, diantaranya ; Jumlah SDM, Kualifikasi SDM, Jumlah Pustakawan, Jumlah Pustakawan yang bersertifikasi, jumlah tenaga yang bersifat diklat, jumlah sdm yang bersertifikasi pustakawan. Sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga berbasis wilayah dan rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan berbasis lembaga. Capain kinerja ini berada pada angka

- 0,04 dengan rincian penghitungan 16 tenaga perpustakaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman per jumlah penduduk 438.022 jiwa di kali 1000.
4. Aspek Kunjungan Masyarakat Per hari
Aspek ini bertujuan untuk mengetahui pengunjung perpustakaan semua jenis perpustakaan, diantaranya ; jumlah kunjungan pemustaka per bulan/ tahun. Sehingga tergambar rasio penduduk, pemanfaatan perpustakaan berbasis wilayah, rasio penduduk, pemanfaatan perpustakaan basis lembaga. Untuk capaian kinerja ini adalah sebesar 5,60% dengan rincian penghitungan 24.582 kunjungan per jumlah penduduk 438.022 dikali 100%
 5. Aspek Perpustakaan yang dibina sesuai standar
Aspek ini bertujuan untuk mengetahui perpustakaan ber Standar Nasional Perpustakaan. Terdapat 9 Perpustakaan yang Ber-SNP di wilayah Kabupaten Padang Pariaman per jumlah penduduk 438.022 dikali 100% dengan nilai capaian 1,61%.
 6. Aspek Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi
Aspek ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan. Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi di Perpustakaan wilayah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2022 sebanyak 483 orang per jumlah penduduk 438.022 dikali 100% dengan nilai capaian 0,11%.
 7. Aspek Jumlah anggota perpustakaan
Aspek ini bertujuan untuk mengetahui Jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman. Jumlah anggota perpustakaan di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 20.894 Pemustaka per jumlah penduduk 438.022 dikali 100% dengan nilai capaian 4,77%.

Dari ke 7 rincian nilai aspek tersebut didapatkan total nilai IPLM Kabupaten Padang Pariaman sebesar 1,97%. Nilai tersebut naik dari tahun sebelumnya 1,84% namun belum mencapai RPJMD Kabupaten Padang Pariaman. Hal tersebut dikarenakan luasnya wilayah serta banyaknya jumlah penduduk yang belum sebanding dengan jumlah perpustakaan, jumlah koleksi perpustakaan, jumlah tenaga perpustakaan, jumlah kunjungan perpustakaan, jumlah anggota, jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi di perpustakaan dan jumlah perpustakaan yang Ber-SNP. Artinya belum terjadi pemerataan layanan perpustakaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Adanya renovasi gedung layanan perpustakaan Kabupaten Padang Pariaman juga menyebabkan rendahnya capaian IPLM Kabupaten Padang Pariaman, karena layanan perpustakaan hanya maksimal dilakukan pada bulan Januari sampai juni. Bulan juli sampai desember 2022 perpustakaan daerah Kabupaten Padang

Pariaman menggunakan gedung layanan sementara yang mengakibatkan berkurangnya jumlah pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan Daerah.

Untuk indikator IPLM ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan melakukan crosscutting dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait dengan penguatan Perpustakaan Sekolah, Perguruan tinggi dan Perpustakaan Nagari atau Desa. Dalam mencapai target kinerja IPLM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Sosialisasi Aplikasi Inlislite untuk mewujudkan perpustakaan elektronik
- Pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar
- Pengadaan koleksi bahan pustaka
- Layanan perpustakaan keliling
- Sosialisasi budaya baca dan literasi
- Pelaksanaan lomba bercerita Tk. SD/MI
- Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial

8. Layanan ekstensi Pojok Baca Digital (Pocadi) di Kantor Bupati Padang Pariaman. Untuk langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah memaksimalkan tenaga perpustakaan yang ada dan mengusulkan penambahan tenaga fungsional pustakawan berdasarkan kebutuhan ANJAB ABK. Selanjutnya dilakukan penetapan komitmen bersama Dinas Pendidikan dan DPMD untuk penguatan sarana prasarana dan SDM Perpustakaan sekolah dan Nagari yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

(d) Capaian Program Penunjang IKU

1. Berikut capaian Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota serta terdiri dari 8 sub kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Jumlah Perpustakaan Umum/ Sekolah yang berbasis IT sebanyak 40 Perpustakaan dengan persentase capaian 100%.
 - 2) Jumlah lokasi yang mendapatkan layanan mobil perpustakaan keliling sebanyak 60 Lokasi Layanan Puskel dengan Persentase Capaian 100%
 - 3) Jumlah perpustakaan sekolah, Nagari yang dibina, dinilai dan di evaluasi sebanyak 10 Perpustakaan dengan Capaian 100%
 - 4) Jumlah pengadaan bahan pustaka/ elektronik sebanyak 400 Eksemplar dengan Capaian 100%
 - 5) Jumlah koleksi buku yang terpelihara sebanyak 500 Eksemplar dengan Capaian 100%

- 6) Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi sebanyak 68 Peserta dengan Capaian 136%
- 7) Jumlah Peserta Lomba Bercerita SD/ MI sebanyak 34 Peserta dengan Capaian 100%
- 8) Jumlah SDM Pemustaka yang diberikan pelatihan/ keterampilan inklusi sosial sebanyak 173 Peserta dengan Capaian 346%

Secara keseluruhan capaian program, kegiatan dan sub kegiatan penunjang indikator kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan. Dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan, masih ada beberapa program yang belum tertampung dalam DPA tahun 2022, karena adanya pemotongan anggaran atau rasionalisasi. Hal ini berpengaruh besar terhadap capaian IPLM Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai 7 unsur aspek pembangunan literasi masyarakat tidak hanya didukung oleh anggaran dan SDM Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Padang Pariaman saja, tetapi juga harus didukung oleh anggaran dan SDM dari Perpustakaan Nagari, Sekolah, TBM dan Perguruan Tinggi di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

- A. Peran perguruan tinggi dalam pencapaian 7 unsur aspek pembangunan literasi masyarakat diantaranya adalah dengan :
 - a. Jadikan pustaka sebagai tempat belajar sendiri karena dapat membantu dalam melakukan eksplorasi terkait ilmu pengetahuan tertentu
 - b. Perpustakaan perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai tempat kursus yang terintegrasi karena setiap buku satu dengan buku yang lain saling melengkapi satu sama lain.
 - c. Perpustakaan perguruan tinggi menjadi sumber referensi dari segala tugas kampus sehingga menjadikan mahasiswa untuk mencari sumber jawaban pada perpustakaan
- B. Peran sekolah dalam pencapaian 7 unsur aspek pembangunan masyarakat diantaranya adalah :
 - a. menumbuhkan budaya literasi melalui upaya kegiatan-kegiatan sekolah
 - b. pelatihan guru dan tenaga kependidikan untuk dapat menerapkan literasi pada pembelajaran
 - c. Pembangunan sarana penunjang yang membentuk ekosistem kaya literasi untuk memperluas akses terhadap sumber belajar dan cakupan peserta belajar.
- C. Peran Nagari dalam pencapaian 7 unsur aspek pembangunan masyarakat diantaranya adalah :
 - a. Melakukan pendekatan secara langsung terhadap masyarakat sebagai objek dan subjek pelaksanaan kegiatan pengabdian

- kepada masyarakat yang memiliki kemampuan baca sederhana (kelompok yang telah bebas buta aksara).
- Himbauan dan dukungan tanpa unsur paksaan bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pembelajaran dan edukasi.
 - Pendekatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3.43
Sosialisasi Insilite



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.44
Layanan Perpustakaan Daerah



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.45
Layanan Perpustakaan Keliling



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.46
Lomba Perpustakaan Nagari



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.47
Pelatihan Budi Daya Jamur Implementasi Program TPBIS



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.48

Pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.49

Renovasi Gedung Layanan Perpustakaan Daerah



Sumber : Dis. Arsip & Perpus Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Penggunaan sumber daya pada urusan perpustakaan adalah sebesar Rp214.390.800,-. Jumlah ini mungkin sangat jauh dari harapan bagaimana bisa melakukan perubahan terhadap Pemerataan Layanan Perpustakaan Perpustakaan dan meningkatkan nilai Indek Pembangunan Literasi Masyarakat. Namun dengan adanya bantuan dari Pemerintah Pusat berupa Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan yang bersumber dari dana DAK sebesar 1.538.082.000,- tentunya merupakan langkah strategis yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam efisiensi anggaran untuk mewujudkan perpustakaan yang berstandar nasional perpustakaan.



Dalam mencapai target indikator kinerja utama IPLM Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adanya dukungan anggaran sebesar Rp214.390.800,- dengan 1 program 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Sedangkan pada tahun 2021 adanya dukungan anggaran sebesar Rp132.985.000,- dengan 1 program 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Dapat dilihat adanya penambahan anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp81.405.800,- untuk mencapai target IPLM Kabupaten Padang Pariaman. Dan hal tersebut dapat terjawab oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan naiknya nilai IPLM dari angka 1,84 menjadi 1,97.

SASARAN STRATEGIS 10**Peningkatan Mutu Pendidikan**

Indikator Kinerja Utama “Harapan Lama Sekolah” merupakan indikator kinerja dengan Sasaran Strategis “Peningkatan Mutu Pendidikan” dibawah Misi Kabupaten Padang Pariaman yang ke-4 yaitu “ Meningkatkan Potensi Daya Saing Daerah Melalui Pengembangan Pariwisata, Transportasi, Perdagangan, Penataan Ruang dan Pengelolaan Lingkungan. Harapan Lama Sekolah menunjukkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Harapan lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem Pendidikan di berbagai jenjang. Angka Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. Angka Harapan lama Sekolah merupakan komponen dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah Selama Tahun 2022 di Kabupaten Padang Pariaman bisa dikatakan Berhasil dengan capaian sebesar 13.93 dari Target 13,97 sehingga persentase ketercapaian nya sebesar 99,71%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati Pendidikan selama 13.93 tahun (hingga Diploma III). Untuk capaian dan target dari angka harapan lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.35

Capaian Target dan Realisasi Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Harapan Lama Sekolah	13.97	13.93	99,71	Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jika di tahun 2021 capaian Angka Harapan Lama sekolah sebesar 13,68 di bandingkan dengan

realisasi tahun 2022 yang mencapai 13.93 yang berarti Angka Harapan Lama Sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,25 poin.

(b) Perbandingan Realisasi IKU Harapan Lama Sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi IKU “Harapan Lama Sekolah” tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.36

Perbandingan Target dan Realisasi Harapan Lama sekolah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 & 2022

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Harapan Lama Sekolah	13.82	13.68	98,9	13.97	13.93	99,71	Berhasil

Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Angka Harapan Lama sekolah di Kabupaten padang pariaman masih bisa dikatakan cukup tinggi dibanding beberapa Kabupaten lain di Sumatera Barat seperti kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Solok, kab. Sijunjung, Kab. Agam, Kab, Pasaman , Kab. Solok Selatan, Kab. Dhamasraya, Kab. Pasaman Barat dan Kepulauan Mentawai yang rata-rata capaian Angka Harapan Lama Sekolah nya berada di bawah Kabupaten Padang Pariaman. Pada tahun 2021 kabupaten Padang Pariaman berada di Posisi 10 sementara untuk tahun 2022 setingkat lebih tinggi di posisi 9 diantara kabupaten dan kota lainnya. Untuk capaian tersebut dapat dilihat dari table dan grafik yang ada di bawah ini:

Tabel 3.37

Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 dan Tahun 2022 Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat

NO	PROVINSI KABUPATEN/ KOTA	Harapan Lama Sekolah [Tahun]	
		2021	2022
	Sumatera Barat	14.09	14,10
1	Kab. Kepulauan Mentawai	12.89	12.89
2	Kab. Pesisir Selatan	13.33	11.35
3	Kab. Solok	13.05	13.30
4	Kab. Sijunjung	12.38	12.64
5	Kab. Tanah Datar	14.34	14.59
6	Kab. Padang Pariaman	13.68	13.93
7	Kab. Agam	13.88	13.88
8	Kota Payakumbuh	14.27	14.29
9	Kota Solok	14.33	14.34

10	Kab. Pasaman Barat	13.68	13.69
11	Kota Padang Panjang	15.07	15.07
12	Kab. Lima Puluh Kota	13.30	13.40
13	Kota Sawahlunto	13.18	13.42
14	Kota Bukittinggi	14.98	14.99
15	Kota Padang	16.53	16.54
16	Kab. Pasaman	12.81	13.05
17	Kab. Solok Selatan	12.72	12.73
18	Kab. Dharmasraya	12.44	12.51
19	Kota Pariaman	14.55	14.61

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

(c) **Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022**

Adapun data terkait capaian angka terkait IKU “Harapan Lama Sekolah Se-Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Grafik 3.10
Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten dan Kota Se-Sumatera Barat Tahun 2022

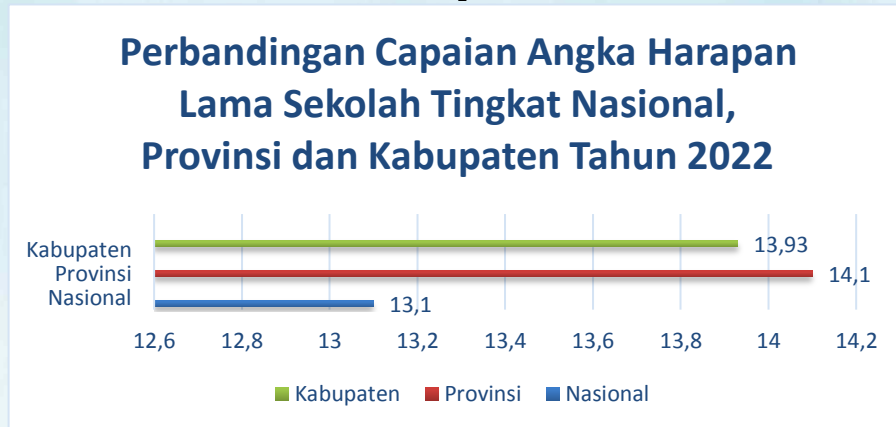


Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan data BPS tahun 2022, capaian Angka Harapan Sekolah Kabupaten Padang Pariaman memang masih berada dibawah capaian Provinsi dimana realisasi Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Sebesar 14,10 sementara Angka Harapan lama Sekolah Kabupaten sebesar 13,93. Namun capaian Angka Harapan Lama Sekolah Padang Pariaman masih tinggi Jika dibandingkan dengan Capaian Nasional dimana Angka Harapan

Lama Sekolah Nasional sebesar 13,10. Perbandingan capaian tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.11
Perbandingan Capaian Angka Harapan Lama Sekolah Tingkat Nasional,
Provinsi dan Kabupaten Tahun 2022



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(d) Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Padang Pariaman di tunjang oleh beberapa Program dan kegiatan yang berkaitan dengan mutu Pendidikan dan akses Pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah dapat dikategorikan “Berhasil” karena didukung oleh beberapa faktor berikut :

1. Mutu Pendidikan

Mutu Pendidikan menjadi indikator yang mempengaruhi harapan lama sekolah. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan mendukung ketercapaian Angka Harapan Lama Sekolah yang lebih meningkat. Banyak aspek yang terkait dalam mutu Pendidikan diantaranya :

- a) Peningkatan Manajemen Pelayanan Pendidikan Nilai/Mutu suatu satuan Pendidikan dilihat dari nilai Akreditasinya (A atau B) Akreditasi Sekolah merupakan proses penilaian komprehensif terhadap kelayakan satuan pendidikan atau program pendidikan meknismenya telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 Tentang Badan Akreditasi Nasional (BAN). Pada tahun 2022 akreditasi satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yaitu Akreditasi A : 51 Sekolah, akreditasi B : 299 Sekolah, dan Akreditasi C: 59 Sekolah. Sementara untuk akreditasi satuan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan Akreditasi A :19 Sekolah, Akreditasi B : 29 sekolah dan Akreditasi C :13 Sekolah. Program yang mendukung Manajemen pelayanan

Pendidikan bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan, pengelolaan dan pengawasan terhadap unsur-unsur Pendidikan mulai dari peserta didik, pendidik/tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana satuan Pendidikan. Program ini didukung dengan system aplikasi yaitu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Program ini di dukung dengan anggaran sebesar Rp. 83.523.250,-. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman penggunaan aplikasi DAPODIK dalam administrasi kependidikan melalui kegiatan sosialisasi dan memberikan akses langsung pelayanan DAPODIK bagi yang ingin berkonsultasi secara langsung di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Gambar 3.50

Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Dapodik di lingkungan Satuan Pendidikan Tahun 2022



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- b) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Non Formal yaitu Melalui Paket A,B dan C dan program pelayanan Pendidikan lainnya. Untuk memastikan setiap warga negara memperoleh Pendidikan terkhusus bagi warga yang mengalami putus sekolah. Pendidikan non formal ini ditujukan untuk penduduk yang berusia 7-18 yang belum menamatkan pendidikannya atau mengalami putus sekolah. Pendidikan Paket A diperuntukan setara Pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) , Program Paket B diperuntukan setara Pendidikan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Program Paket C di peruntukan setara Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan yang mendukung capaian tersebut yaitu Penyediaan Biaya Personil Peserta didik non formal/kesetaraan dimana pendanaannya bersumber dari dana hibah dari pemerintah pusat melalui Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan berupa Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diperuntukan bagi peserta didik di tingkat satuan Pendidikan nonformal/kesetaraan. Pada tahun 2022 BOP ini dianggarkan dengan pagu sebesar Rp. 1.289.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.137.900.000,- yang di salurkan untuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang ada di Padang Pariaman.

Gambar 3.51

Proses pembelajaran Paket B di PKBM Delima Bandara



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

c) Peningkatan mutu Pendidik

Pada program ini diutamakan untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik (guru) dengan mengutamakan beberapa program seperti peningkatan kapasitas dan kualitas guru mengajar melalui Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Selain itu program nasional yaitu guru penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengembangkan nilai kepemimpinan bagi pendidik. Kondisi keterbatasan tenaga pendidik di jenjang Pendidikan SD dan SMP dipenuhi dengan adanya tenaga pendidik dan Kependidikan yang bersifat honor yang didukung oleh anggaran berupa insentif yang di bayarkan kepada guru honor, operator dan penjaga sekolah. Pada jenjang SD diberikan pagu anggaran sebesar Rp.11.351.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp.10.761.094.000,- atau sebesar 94,8%. Sementara untuk jenjang SMP diberikan pagu sebesar Rp.2.490.000.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 2.405.500.000,- atau sekitar 96,6%.

d) Bantuan Pembiayaan Peserta Didik. Adanya bantuan pembiayaan pada peserta didik dari kalangan tidak mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). PIP merupakan program bantuan dari Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (kemendikbud) berupa uang tunai, perluasan akses bagi peserta didik. Peserta didik tingkat SD berhak menerima PIP pada tahun 2022 sebanyak 26.014 siswa dengan nilai 450.000/siswa. Sementara untuk tingkat SMP yang menerima PIP selama tahun 2022 sebanyak 8.268 siswa dengan nilai Rp.750.000/siswa. Dengan adanya bantuan ini dapat mengantisipasi terjadinya putus sekolah di kalangan keluarga yang kondisinya ekonomi nya lemah Sehingga dapat meningkatkan Angka harapan Lama Sekolah.

1. Akses Pendidikan merupakan kemampuan pemerintah dalam Peningkatkan akses Pendidikan memastikan ketersediaan satuan Pendidikan yang memadai untuk usia sekolah. Pemerataan akses Pendidikan menjadi faktor pendukung dalam pencapaian harapan lama sekolah. Jika satuan Pendidikan tersedia dan didukung oleh Kondisi sarana dan prasarana yang memadai sehingga penduduk usia sekolah dapat memperoleh Pendidikan yang layak. Meningkatnya kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan dengan kondisi baik, didukung oleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2022 kondisi sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan bangunan baik sebanyak 76% ,kondisi rusak sedang sebanyak 14% dan rusak berat sebanyak 10%. Pagu Anggaran dalam mendukung perbaikan kondisi sarana dan prasana di tingkat satuan SMP pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.756.779.800 yang dialokasikan dari pusat melalui dana DAK tahun 2022. Untuk satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan Kondisi ruang kelas baik yaitu sebesar 54%, kondisi rusak sedang 30% dan rusak berat 16% dengan pagu anggaran sebesar Rp.11.415.574.750 yang di gunakan untuk pembangunan ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah, ruang perpustakaan dan pembangunan sarana prasarana utilitas.

Gambar 3.52

Monitoring Dan Pengawasan Pembangunan Ruang kelas di Satuan Pendidikan SD yang berasal dari dana DAK tahun 2022



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Terkait IKU

Dalam pencapaian indikator Harapan Lama Sekolah ini masih terdapat beberapa hambatan berupa :

1. Masih tingginya angka putus sekolah baik di tingkat SD maupun SMP. Banyak faktor yang dapat menyebabkan angka putus sekolah yaitu :
 - a. Faktor ekonomi: banyak peserta didik yang akhirnya memilih untuk putus sekolah karena keterbatasan kemampuan ekonomi yang dimiliki. Karena keterbatasan itu banyak akhirnya yang memilih untuk bekerja dibanding menempuh Pendidikan.
 - b. Minat belajar dan faktor lingkungan juga mempengaruhi angka putus sekolah. Kemajuan teknologi digital memberikan dampak pengaruh menurunnya minat belajar karena peserta didik lebih memilih menghabiskan waktu untuk kegiatan lainnya serta kurangnya pengawasan dari lingkungan sekitar sehingga minat untuk belajar dan bersekolah semakin rendah.
2. Masih adanya sarana prasarana yang belum memadai dan membutuhkan rehabilitasi, karena kondisi bangunan sekolah masih ada yang berkategori Rusak berat baik di tingkat satuan SD maupun SMP.
3. Keterbatasan Jumlah pendidik (guru) dengan rombongan belajar yang ada. Idealnya tingkat Pendidikan SD harus memiliki 1 guru untuk 1 rombongan belajar. Namun masih terdapat di beberapa daerah dimana kondisi ketersediaan pendidik/guru yang ada kurang dari jumlah rombongan belajar yang tersedia
4. Masih adanya pendidik yang belum berkualifikasi S1

Adapun strategi pemecahan masalah dalam mengatasi hambatan-hambatan pencapaian IKU adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberantas angka putus sekolah dijenjang SD dilakukan pembinaan kepada anak dan orang tua dan apabila usia anak sudah melewati batas usia masuk SD maka anak ditampung di paket A. Selain itu juga diberikan beasiswa PIP dan Baznas kepada peserta didik yang kondisi ekonomi lemah/ berasal dari keluarga tidak mampu.
2. untuk memberantas angka putus sekolah dijenjang SMP yaitu :
 - a. motivasi kepada peserta didik untuk menumbuhkan minat melanjutkan ke jenjang selanjutnya sehingga di harapkan dapat menekan angka putus sekolah.
 - b. Apabila Anak yang sudah melewati usia memasuki SMP dapat ditampung di Paket B
 - c. Beasiswa PIP dan Baznas kepada peserta didik yang kondisi ekonomi lemah/ berasal dari keluarga tidak mampu.

3. Untuk pemenuhan guru per rombel harus dilakukan perekrutan tenaga pendidik agar kekurangan pendidik/guru di satuan Pendidikan di tingkat SD dan SMP dapat di penuhi.
4. Untuk Mendorong dan memberikan akses bagi Pendidik yang ingin melanjutkan Pendidik nya agar pendidik/guru yang ada di kabupaten padang pariaman memiliki kualifikasi minimal S1 guna meningkat mutu pendidik.

(f) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 tidak begitu signifikan. Hanya beberapa kegiatan yang mengalami efisiensi dalam penggunaan sumber daya namun masih tetap dapat mencapai output kegiatan. Salah satunya yaitu Program Pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama dengan target biaya Rp. 26.607.467.112 dan realisasi biaya sebesar Rp. 15.227.627.331.

(g) Prestasi Disdikbud Kab. Padang Pariaman Tahun 2022

1. Penghargaan sebagai pengelola Program Indonesia Pintar (PIP) Terbaik 3 tingkat provinsi Sumatera Barat. Penghargaan diberikan karena prestasi dalam Pengelolaan bantuan pembiayaan kepada peserta didik yang tidak mampu yang berasal dari Pemerintah Pusat.

Gambar 3.53
Penghargaan PIP Terbaik 3 Tingkat Sumbar



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(h) Inovasi Disdikbud Kab. Padang Pariaman

1. GEBU SIPAFA (Gerakan Seribu Siswa Penghafal Al Qur'an)
Gebu Sipafa ini merupakan Gerakan yang mengajarkan peserta didik mengenai pemahaman dan penghafalan Al-Qur'an. Peserta didik tingkat SD dan SMP sebelum memasuki kelas dan memulai pelajaran siswa diharuskan membaca beberapa ayat pendek dan menghafalkannya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menghafal Al-qur'an dan menerapkan nilai-nilai kebaikan terkandung di dalamnya.

Gambar 3.54
Prestasi Hafizh/Hafizhah Penghafal Al-Qur'an



Sumber : Disdikbud Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. SIDAGUTEK (Sistem Informasi Data Guru dan Tenaga Kependidikan (SIDAGUTEK)
SIDAGUTEK merupakan aplikasi berbasis digital yang memuat data-data Guru dan Tenaga Pendidikan yang ada di kabupaten Padang Pariaman. Dengan menggunakan aplikasi ini dapat mempermudah dalam pengambilan data karena bersifat terkini (update) terhadap semua perubahan kondisi guru dan tendik yang ada di satuan pendidikan
3. SIPINTAR (Siswa Praktek Ibadah Tiap Hari)
SIPINTAR merupakan kegiatan pembiasaan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan iman dan taqwa siswa. Praktek ibadah setiap hari siswa dapat memberikan tambahan ilmu baik dari segi gerakan dalam shalat maupun dalam segi hafalannya. Inovasi ini dibuat semenarik mungkin dengan tujuan :
 - a) Untuk mengetahui penerapan praktek ibadah siswa
 - b) Sebagai langkah untuk menanamkan nilai-nilai agama kepada siswa.



- c) Diharapkan siswa mampu melaksanakan praktek ibadah secara continue dan nyatasetiap hari.
- d) Siswa mampu mengembangkan potensi spritualitasnya dengan baik sesuai dengantingkat usianya.

SASARAN STRATEGIS 11

Peningkatan Tenaga Kerja Yang Terampil dan Berdaya Saing

Indikator Kinerja Utama “Tingkat Pengangguran Terbuka” dengan Sasaran strategis “Peningkatan Tenaga Kerja Yang Terampil dan Berdaya Saing” merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi keempat yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakkan sektor pendidikan non formal”. Adapun realisasi dan capaian kinerja sasaran strategis ini dapat dilihat sebagai berikut :

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi target dan realisasi IKU “Tingkat Pengangguran Terbuka” tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.38
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,15	6,60	107,69	Sangat Berhasil

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Adapun pengukuran indikator ini dilakukan dengan formulasi sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran :

$$\frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Dari tabel diatas dapat dijelaskan target dan realisasi tahun 2022 bahwa Sasaran IKU Tingkat Kemiskinan dinilai sangat berhasil dengan realisasi capaian 6,60% dari target 7,15%. Meskipun tahun 2022 diwarnai dengan inflasi yang cukup mengganggu perekonomian masyarakat, penurunan tingkat kemiskinan tetap mencapai target karena bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tergolong kedalam Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berikut ini adalah perbandingan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2022 dengan Tahun 2021:

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan target dan realisasi kinerja IKU tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

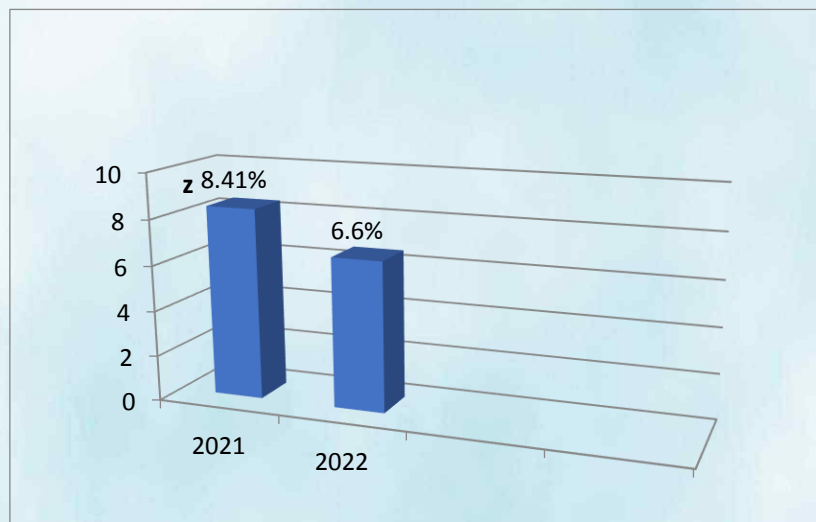
Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8,41	7,15	6,60	107,69	Sangat Berhasil

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dilihat dari capaian realisasi diatas, pada tahun 2022 indikator kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka” mengalami pencapaian yang sangat memuaskan dimana pada tahun 2021 mencapai realisasi 8,41% sedangkan pada tahun 2022 tercapai sebesar 6,60% dari target 7,15%. Apabila digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti berikut ini :

Grafik 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pencapaian tingkat pengangguran pada tahun 2022 merupakan pencapaian yang lebih rendah dari pencapaian tahun

2021 sebesar 8,41 %. Rendahnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan berkurangnya jumlah pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,28 % dan Tingkat pengangguran Terbuka Nasional 5,83%.

(c) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Padang Pariaman terkait IKU dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2022



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Padang Pariaman masih tinggi dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat dan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat sebesar 6,28 % masih lebih tinggi sebesar 0,32 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka nasional sebesar 5,83% perbandingannya masih tinggi sebesar 0,77%. Berdasarkan perbandingan tersebut Alternatif solusi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja harus segera dilakukan.
2. Memperbaiki instruktur, kemudian para siswa lulusan vokasi juga harus tersertifikasi untuk menjamin upah atau gaji yang diterima sesuai dengan keahliannya.

3. Untuk mengetahui tingkat pengangguran di sektor Tenaga Kerja perlu di lakukan pendataan tenaga kerja yang Produktif yang menganggur di setiap Nagari dan Potensi pengembangan Usaha yang akan di lakukan di Nagari tersebut sesuai dengan Minat peserta Pelatihan, dan juga perlu perhatian pemerintah Daerah agar menyalurkan Dana yang optimal terhadap Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja yang berbasis di Nagari.
4. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja.
5. Mengadakan bursa kerja.
6. Menjaln Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan dan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi).

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisis efisiensi penggunaan sumber daya antara lain adanya refocusing anggaran diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 197.552.829
2. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 46.618.324
3. Program Hubungan Industrial dengan anggaran Rp. 77.952.000

(e) Strategi Pencapaian IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja tersebut Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa strategi yaitu:

1. Melakukan MOU dengan Asosiasi pengusaha dan kerja sama dengan perusahaan.
2. Pemaksimalan Lembaga Kerja Swasta (LKS).
3. Meningkatkan Komentensi Calon Tenaga Kerja melalui Pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Latihan Kerja.
4. Melakukan Pembinaan bagi BLK Komunitas.
5. Memfasilitasi penerbitan Kartu Pencari Kerja (Ak1) bagi calon pencari kerja.
6. Melakukan pembinaan dan memberi bantuan peralatan bagi masyarakat.
7. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan perusahaan.

8. Memberikan bantuan berupa Layanan Konsultasi bagi Pekerja yang terkena PHK.
9. Memberikan Rekomendasi pelatihan dan informasi lowongan bagi Pekerja yang terkena PHK.
10. Memfasilitasi bagi Tenaga Kerja untuk bekerja di luar Negeri.
11. Melakukan Verifikasi terhadap Draf Peraturan Perusahaan yang bertujuan untuk menjamin hak pekerja.
12. Melakukan Pembinaan dan monitoring kepada perusahaan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

(f) Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka, Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi Dan UKM Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa program yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya :

1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan anggaran Rp. 197.552.829 dan realisasi anggarannya Rp. 196.735.886 dengan kegiatannya.
 - ✓ Kegiatan Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan anggaran sebesar Rp. 181.553.210 realisasi anggarannya Rp. 180.860.521 atau sebesar 99.62 % dan sub kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 181.553.210. capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2022 adalah sebanyak 256 orang di pelatihan di BLK dengan dana yang bersumber dari APBN. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Sebanyak 32 orang tenaga yang punya minat dan bakat tersebut telah meningkat keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki serta dapat hasil produksi jahitannya menjadi bagus dan berkualitas bahkan dapat menarik motivasi orang untuk memiliki (membeli).
 2. Sebanyak 256 orang dengan Tiap-tiap paket diikuti 16 orang sehingga total untuk 16 Paket di pelatihan di BLK dengan dana yang bersumber dari APBN. Dengan ketrampilan yang telah dimiliki diharapkan peserta dapat menumbuhkan jiwa wirausaha mandiri serta terwujudnya kualitas sumberdaya manusia yang terampil, kompeten dan produktif pada bidang masing-masing kejuruan.

Gambar 3.55**Pelatihan di BLK, Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi**

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.56**Serah Terima Mesin Jahit**

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- ✓ Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan anggaran sebesar Rp. 15.999.619 realisasi anggarannya Rp. 15.875.365 atau sebesar 99.22 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dengan anggaran Rp. 15.999.619 realisasi anggarannya Rp. 15.875.365 atau sebesar 99.22 %.

Gambar 3.57**Kegiatan Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta di pasar usang Batang Anai**

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Program Penempatan Tenaga Kerja

Anggaran untuk program ini adalah Rp. 46.618.324 dan realisasi anggarannya Rp. 46.024.300 atau dengan persentase sebesar 98,75% dengan kegiatan :

- ✓ Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 24.058.750 realisasi anggarannya Rp. 23.912.650 atau sebesar 99,39%. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja dengan anggaran sebesar Rp. 24.058.750 realisasi anggarannya Rp. 23.912.650 atau sebesar 99,39%.

Gambar 3.58

Koordinasi Dengan Perusahaan Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- ✓ Kegiatan Pengelolaan informasi pasar kerja
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 22.559.574 realisasi anggarannya Rp. 22.111.650 atau sebesar 98,01%. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah 2 sub kegiatan yaitu pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online dengan anggaran sebesar Rp. 7.560.000 realisasi anggarannya Rp. 7.490.000 atau sebesar 99,07 % dan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online dengan anggaran sebesar Rp. 14.999.574 realisasi anggarannya Rp. 14.621.650 atau sebesar 97,48 %. Dalam pelaksanaan kegiatan ini pencari kerja akan mendapatkan informasi peluang kerja baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri dan juga para pencari kerja akan mendapatkan kartu AK1 yang akan digunakan untuk pencari kerja melamar perusahaan atau penyedia jasa ketenagakerjaan. Untuk mendapatkan pelayanan informasi peluang kerja para pencari kerja harus masuk pada aplikasi siap kerja yang ada pada Kementerian Tenaga kerja dan juga untuk menerbitkan AK1 untuk pencari kerja juga melalui online

dengan masuk pada sistem aplikasi sisnaker kementerian. Jumlah AK1 yang diterbitkan pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.540 AK1 dari target sebanyak 2.400 AK1 atau dengan persentase realisasi sebesar 64,17 %.

Gambar 3.59
Pelayanan AK-1 Para Pencari Kerja
Didaftarkan Melalui Aplikasi Sisnaker Kementerian Ketenagakerjaan



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Program Hubungan Industrial

Anggaran untuk program ini sebesar Rp. 77.952.000 dan realisasi anggarannya Rp76.830.200 atau dengan persentase sebesar 98,56 % dengan rincian kegiatan:

- ✓ Kegiatan Pengesahan Peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja sama bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 35.952.000 realisasi anggarannya Rp. 35.806.160 atau sebesar 99,59 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah:
 - Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi Rp. 14.887.000 atau sebesar 99,25%. Metode pelaksanaan yang dilaksanakan yaitu Kunjungan lapangan ke Perusahaan (Kunjungan dalam rangka pendataan, pembinaan dan monitoring ke perusahaan tentang kelengkapan persratan kerja dan norma kerja), dan Konsultasi Ke Bidang HI Provinsi dan rapat-rapat koordinasi lainnya. Capaian kinerja untuk kegiatan ini dengan indikator Jumlah Perusahaan menerapkan K3, Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan pengesahan PP/PKB dan Jumlah PKWT dan PKWTT yang dicatatkan. Untuk Perusahaan menerapkan K3 dengan target untuk tahun 2022 sebanyak 75 perusahaan realisasi capaiannya sebanyak 78 perusahaan atau sebesar 104 %. Jumlah Perusahaan yang mendaftarkan pengesahan PP/PKB

pada tahun 2022 target sebanyak 12 perusahaan dan realisasi sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 83,3 %. Berdasarkan hasil kunjungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan telah diterbitkan PP, PKWT dan PKWTT, PKB dan PKPP tahun 2022 sebanyak 641. Adapun dokumentasi kegiatan dapat kita lihat dibawah ini :

Gambar 3.60
Monitoring tentang Tata tertib Administrasi
Bidang Hubungan Industrial dan Update Data
Perusahaan ke Perusahaan PT. Agrimita Persada



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.61
Monitoring tentang Update Data Perusahaan
ke PT.Bumi Sarimas Indonesia dan PT.Usaha Inti Padang



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan dengan anggaran sebesar Rp. 20.952.000 dan realisasi anggaran Rp. 20.919.160 atau sebesar 99,84%. Adapun dokumentasi terkait hal tersebut adalah kegiatan sosialisasi BPJS yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.62
Penyerahan Uang Duka dan Sembako Secara Simbolis
Pada Acara Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- ✓ Kegiatan Pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 35.952.000 realisasi anggarannya Rp. 35.806.160 atau sebesar 99.59 %. Sub kegiatan untuk kegiatan ini adalah :
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 21.330.000 realisasi anggarannya Rp. 20.894.000 atau sebesar 97.96 %. Adapun data terkait jumlah kasus hubungan sektor industrial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.40
Jumlah Kasus-Kasus Hubungan Industrial yang Di Fasilitasi

No	Tanggal	Nama Perusahaan	Jenis PHI	Tindaklanjut	Status
1.	15 Februari 2022	PT ISS Indonesia	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
2.	22 Maret 2022	PT Kunango Jantan	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi

3.	07 April 2022	PT Bumi Sarimas Indonesia	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
4.	21 Juli 2022	PT Jaya Sentrikon	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
5.	21 Juli 2022	PT Jaya Sentrikon	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
6.	26 Oktober 2022	PT Kunango Jantan	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
7	26 Oktober 2022	PT Kunango Jantan	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi
8	26 Oktober 2022	STIKES Nan Tongga Lubuk Alung	Pesangon PHK : 1 orang	Pelimpahan Kasus Ke Dinas Nakertrans Prov. Sumatera Barat	Telah selesai dimediasi

Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Adapun dokumentasi kegiatan terkait pencegahan kasus perselisihan terkait hubungan industrial dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.63

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- ✓ Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota anggaran sebesar Rp. 20.670.000 realisasi anggarannya Rp. 20.130.040 atau sebesar 97.39 %. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan hubungan Industrial yang harmonis dalam faslitasi penyelesaian Hubungan Industrial yang terjadi di Badan usaha di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dengan sasaran :
 1. Agar perselisihan hubungan industrial di perusahaan dapat terminimalisir dan adanya jaminan untuk suatu penyelesaian kasus bila ternyata tidak dapat dihindarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Agar setiap perusahaan bisa mempunyai lembaga/saran untuk menampung aspirasi-aspirasi pekerja dan pengusaha dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang damai dan harmonis.

Gambar 3.64

Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota



Sumber : Disdagnakerkop UKM Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(g) Faktor Penghambat dan Alternatif Solusi Penunjang IKU

Adapun Hambatan – Hambatan dalam Pelaksanaan Program/ Kegiatan dalam rangka Proses Pencapaian Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka antara lain :

1. Pelatihan yang diberikan kurangnya kecakapan dari masing masing anggota yang mendapatkan mesin jahit pada waktu penggunaan mesin jahit tersebut. Hal ini disebabkan dengan bertambah teknologinya mesin jahit yang kita berikan agar mempermudah cara cara bekerja dalam menjahit.
2. Sarana dan Prasarana pendukung pelatihan untuk dapat menjalankan pelatihan membutuhkan peralatan pendukung pelatihan yang sesuai dengan kompetensi pelatihan yang sesuai spesifikasi seperti pada pelatihan Juru Gambar Arsitektur, software yang perlu pembaharuan dan lain sebagainya, begitupun dengan pelatihan Teknik Informatika Komputer dimana dalam pelaksanaan pelatihan tersebut membutuhkan perangkat-perangkat pendukung namun peralatan tersebut belum tersedia seperti dalam pembuatan video perlu adanya kamera, lensa, audio, lighting, gimbal, tripod, drone dan laptop. Sementara dalam melaksanakan pelatihan pembuatan roti dan kue sangat membutuhkan peralatan-peralatan berupa oven, kompor, mixer, blender dan peralatan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pelatihan pembuatan roti dan kue. Sehingga peserta pelatihan memiliki kemampuan dan kompetensi sesuai dunia usaha dan kerja.
3. Dari kegiatan Pembinaan Lembaga Kerja Swasta tahun 2022 ini terdapatnya permasalahan banyaknya LPK yang mati suri karena pandemi covid-19 sehingga tidak adanya siswa yang mendaftar ke lpk tersebut.
4. Dari kegiatan Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja Kabupaten Padang Pariaman ini terdapatnya hambatan dengan keterbatasan dana yang ada sehingga untuk melakukan survei kelapangan menjadi sulit.
5. Jaringan internet yang tidak memadai sehingga kurang lancarnya pembuatan kartu AK1 secara online sehingga terpaksa membuat kartu AK1 secara manual.
6. Belum adanya Jabatan Fungsional Mediator d Kabupaten Padang Pariaman sehingga perselisihan antara pekerja dan perusahaan belum dapat diselesaikan secara maksimal.
7. Belum maksimalnya fungsi Tripartit dan bipartit dalam penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

Alternatif solusi yang perlu dilakukan untuk menanggulangi hambatan-hambatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja harus segera dilakukan
2. Memperbaiki instruktur, kemudian para siswa lulusan vokasi juga harus tersertifikasi untuk menjamin upah atau gaji yang diterima sesuai dengan keahliannya.
3. Untuk mengetahui tingkat pengangguran di sektor Tenaga Kerja perlu dilakukan pendataan tenaga kerja yang Produktif yang menganggur di setiap Nagari dan Potensi pengembangan Usaha yang akan dilakukan di Nagari tersebut sesuai dengan Minat peserta Pelatihan, dan juga perlu perhatian pemerintah Daerah agar menyalurkan Dana yang optimal terhadap Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja yang berbasis di Nagari.
4. Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan dan penempatan tenaga kerja
5. Mengadakan bursa kerja
6. Menjalin Komunikasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja (Perusahaan dan Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Provinsi)

SASARAN STRATEGIS 12

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran Strategis “Birokrasi yang bersih dan akuntabel” merupakan turunan dari Misi Kabupetn Padang Pariaman yang ke-5 yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis Melalui Penyelenggaraan Pemerintah Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan. Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu : Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, Nilai SAKIP Pemerintahan Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja merupakan salah satu upaya mewujudkan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman yang terletak pada Misi V, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Bersih, Berkeadilan, Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintah yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan. Selanjutnya tujuan tersebut dicapai dengan salah satu sasaran strategis pada RPJMD dan merupakan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2016-2021, yaitu: Birograsi Yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator sasaran yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Daerah yang merupakan salah satu IKU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan keuangan. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji materi. Oleh sebab itu, opini WTP merupakan keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman karena merupakan cerminan terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah yang efektif, akuntabel dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan juga terwujudnya pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dalam urusan penunjang dibidang keuangan telah melakukan berbagai strategi dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk kesekian kalinya berhasil kembali meraih Opini WTP terhadap Laporan Keuangan Daerah dari BPK RI. Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.41
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase
Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 dan tahun 2022 IKU “Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah” dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.42
Target dan Realisasi Tahun 2022 dan Tahun 2021

INDIKATOR	TAHUN 2021		TAHUN 2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Tabel 3.43
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Periode 2019 s/d 2022

NO	LKPD TAHUN	OPINI
1.	2019	WTP
2.	2020	WTP
3.	2021	WTP
4.	2022	WTP

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dilihat capaian indikator kinerja dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat bahwa capaian IKU ini konsisten dikarenakan realisasi yang didapatkan adalah sama yaitu “WTP”.

Adapun kriteria yang dijadikan perhatian BPK dalam memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia (SAP).
2. Kecukupan Pengungkapan.
3. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disamping keempat kriteria utama tersebut LKPD yang disajikan harus didukung dengan bukti-bukti audit yang mencukupi, tidak terdapat ketidakpastian dan kesalahan yang cukup berarti (**No Material Uncertainties**), pengelolaan atas **cash flow** dikontrol dengan baik, dan pengelolaan atas aset daerah dilengkapi dengan bukti-bukti administrasi yang lengkap. Artinya, laporan keuangan yang disajikan telah bebas dari kesalahan-kesalahan atau kekeliruan yang sifatnya material.

Terkait dengan penilaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 sudah mengatur tentang jenis opini yang diberikan sebagai salah satu bentuk hasil audit atas laporan keuangan Daerah yang terdiri atas sebagai berikut :

1. Wajar Tanpa Pengecualian / WTP (*Unqualified Opinion*)
2. Wajar dengan Pengecualian / WDP (*Qualified Opinion*)
3. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
4. Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*)

Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil penilaian kerja setiap pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang diamanatkan kepadanya, tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk menjelaskan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Opini LKPD ini menjadi ukuran penting dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan yang baik terhadap opini LKPD ini dari tahun ke tahun menjadi penting dari kondusifnya pemerintahan daerah yang sedang berlangsung. Tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bisa saja berbeda antar entitas pemerintah daerah yang satu dengan entitas pemerintah daerah lainnya, tergantung kualitas SDM, keterbatasan sarana dan prasarana, luasan wilayah, serta kompleksitas permasalahan yang ada di daerah.

(c) Upaya Penunjang IKU

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meraih kembali opini WTP atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Temuan BPK RI

Dalam menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun sebelumnya semua pihak terkait bersama-sama berperan aktif dalam menyelesaikan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya. Terkait tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK RI atas Laporan keuangan daerah

Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pemetaan terhadap Temuan atas Laporan Hasil Pemeriksaan. Status tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat berupa telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, dalam proses (belum selesai tindak lanjutnya), dan belum ditindaklanjuti.

2. Peningkatan Peran APIP

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diperkuatnya peran pengawasan internal pemerintah. Pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik sehingga dapat mengoptimalkan perannya dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. APIP juga melakukan review sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan keuangan, hingga pendampingan pada saat pemeriksaan oleh BPK. Kemudian dalam rangka pengawasan internal, inspektorat Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada terbatas pada kegiatan pengawasan/audit tapi juga melakukan fungsi pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH). Disamping itu Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah berupaya : Meningkatkan level SPIP , Meningkatkan Kapabilitas APIP, Meningkatkan Anggaran APIP sesuai dengan aturan yang berlaku, Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan Daerah. Untuk mencapai suatu tata kelola keuangan daerah yang handal dan profesional juga dilakukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara berkesinambungan berupa dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis terhadap aparatur pengelola keuangan, sehingga memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dalam Memanfaatkan Teknologi Informasi maka hal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten Padang Pariaman adalah menggunakan aplikasi SIPD, membangun Simda online yang terkoneksi dengan semua organisasi perangkat daerah di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Selain kedepan aplikasi Simda ini akan terintegrasi antara pengelolaan keuangan, pendapatan, dan barang daerah serta melaksanakan SP2D Online dengan Bank Nagari.

4. Koordinasi yang baik antara unit terkait baik internal maupun eksternal
Upaya yang tidak kalah penting dalam rangka meraih kembali opini WTP atas laporan keuangan daerah kabupaten Padang Pariaman adalah meningkatkan sinergi, koordinasi, dan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. "Ini sangat perlu dilaksanakan untuk keselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, sehingga menjadi komitmen dari semua pihak dalam rangka memperoleh kembali opini WTP.
5. Deteksi dini potensi permasalahan yang dapat menjadi temuan pemeriksaan
Menghindari potensi temuan tahun berikutnya, maka APIP berperan aktif dalam peningkatan efektifitas sistem pengendalian intern dan pencegahan pelanggaran kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

(d) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Badan Pengelola Keuangan Daerah pada tahun 2022 menyelesaikan banyak program pemerintahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Target kinerja tahunan dan juga penambahan beban kinerja tahun berjalan baik dari pemerintahan pusat melalui penerbitan regulasi baru terkait peraturan pengelolaan keuangan yang berdampak terhadap penyesuaian dan tindak lanjut yang melahirkan kebijakan-kebijakan ditingkat daerah. Selain itu juga faktor internal dan eksternal lainnya yang membutuhkan penanganan cepat, sehingga menambah beban kinerja ditahun 2022.

Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dan telah diturunkan melalui Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2021-2026, maka capaian target kinerja diakhir tahun anggaran telah dapat dicapai 100% dengan diraihnya opini WTP yang menjadi tujuan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Proses pelaksanaan program dan kegiatan ditahun 2022 yang disertai dengan adanya rasionalisasi anggaran, sehingga berdampak terhadap kinerja dari porsi anggaran yang telah disediakan. Dalam hal anggaran berbasis kinerja, dampak yang mempengaruhi anggaran sangat menentukan capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan capaian target kinerja, telah berhasil menggunakan efisiensi anggaran dan langkah efisiensi lainnya terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap diraihnya capaian kinerja serta IKU yang ditetapkan

100%. Target anggaran pada DPA Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun anggaran 2022 awal Rp.198.697.532.177,00 dan pada DPA Perubahan tahun 2022 Rp.195.224.294.452,00 atau berkurang sebesar Rp.3.473.237.725,00.

(e) **Program/Kegiatan Pendukung**

Pada dasarnya Program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Adapun Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Sebagai upaya memperoleh opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Padang Pariaman, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.44
Program dan Kegiatan Pendukung IKU Tahun 2022

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100%
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	100%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	100%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%

	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	100%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	100%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	100%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	100%
	Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas	100%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	100%
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	100%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	100%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100%

		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	100%
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%
		Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	100%
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%
		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%
		Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%
		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	100%
		Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	100%
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Standar Harga	100%
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	100%
		Pengamanan Barang Milik Daerah	100%
		Penilaian Barang Milik Daerah	100%
		Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	100%
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	100%
		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) Dokumentasi Kegiatan Pencapaian IKU

Berikut dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menjalankan sasaran strategis IKU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 :

Gambar 3.65
Penyerahan Piagam Opini WTP



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.66
Pembukaan Rekonsiliasi Dana BOS di Hall Saiyo Padang



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.67
Saat Penginputan RAK di Hall BPKD



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.68
Penerimaan Penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Pengelolaan Dana Desa Terbaik Pertama dari Kementerian Keuangan



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.69
Pada Saat Acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.70
FGD Penyusunan PPBR BPKD dengan Tim Inspektorat



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.71
Penginputan RAK di Hall Saiyo Sakato



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.72 Rekonsiliasi Dana BOS



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.73 Rapat Koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah



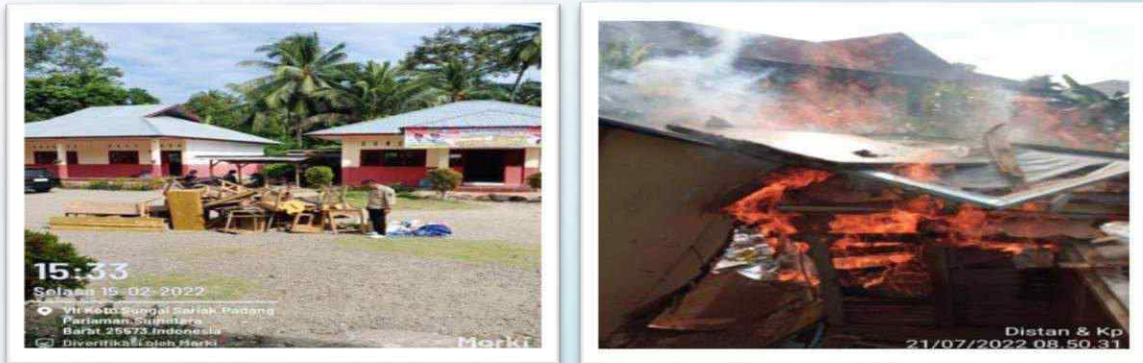
Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.74
Penghapusan Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.75
Pemusnahan Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.76
Inventarisasi Barang Milik Daerah



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(g) Penghargaan Yang Diterima

Salah satu tujuan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi birokrasi telah memiliki hasil yang nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance. ini dibuktikan diperolehnya beberapa penghargaan pada tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.45
Penghargaan yang Diterima Tahun 2022

NO	PENGHARGAAN
1.	Opini WTP atas LKPD Tahun 2021 dari BPK RI
2.	Tercepat I Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Triwulan II Tingkat Kabupaten se-Sumatera Barat dan Tercepat II Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022
3.	Penyaluran Dana Desa Tercepat 1 Tingkat Sumatera Barat Tahun 2022
4.	Perangkat Daerah Predikat AA Nilai SAKIP Tahun 2021
5.	Terbaik II Penilaian SPBE Tingkat Kabupaten Padang Pariaman
6.	Penyaluran DAK Fisik Tercepat 1 di wilayah KPPN Padang

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Selain opini WTP di terima ditahun 2022, Badan Pengelola Keuangan Daerah juga menerima beberapa penghargaan baik tingkat Kabupaten Padang Pariaman maupun tingkat provinsi Sumatera Barat serta dari instansi pemerintahan lainnya. Upaya dalam peningkatan sumber pendapatan daerah juga dilakukan secara intens dengan dibuktikan diterimanya penghargaan Tercepat I Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Triwulan II Tingkat Kabupaten se-Sumatera Barat dan Tercepat II Tingkat Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022 dari Gubernur Sumatera Barat.

Penghargaan selanjutnya yang diterima yaitu, Penyaluran Dana Desa Tercepat 1 Tingkat Sumatera Barat Tahun 2022 dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta Penyaluran DAK Fisik Tercepat 1 di wilayah KPPN Padang. Hal itu membuktikan Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam melakukan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan daerah telah memanfaatkan anggaran secara maksimal untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.

Penghargaan lainnya yang diterima sebagai wujud Badan Pengelola Keuangan Daerah telah melaksanakan tugas sesuai target yang ditetapkan adalah berupa diperolehnya penghargaan berupa Perangkat Daerah Predikat AA Nilai SAKIP Tahun 2021 dan Terbaik II Penilaian SPBE Tingkat Kabupaten Padang Pariaman.

2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Evaluasi akuntabilitas kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 memperoleh nilai 68,50 atau predikat "B" dengan capaian sebesar 85,62%. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kerjanya. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman masih belum berjalan dengan baik dan memerlukan perbaikan lebih lanjut. Berikut capaian Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB :

Gambar 3.77
Entry Meeting SAKIP Tahun 2022



Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(a) **Capaian Realisasi IKU “Nilai Evaluasi SAKIP” Tahun 2021 dan Tahun 2022**

Adapun data capaian terkait realisasi IKU “Nilai Evaluasi SAKIP” Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.46
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 12
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB	B	85,62	BB	B	86,07

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Implementasi sistem AKIP terhadap Pemerintah Daerah dilihat dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahunnya. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

Formulasi = **Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memperoleh predikat “B” dengan nilai 68,50. Hal ini berarti capaian indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan “BB” dan sama dengan capaian nilai SAKIP Tahun sebelumnya yaitu “B”. Meskipun tidak memenuhi target, jika dilihat dari perolehan poinnya nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman mengalami peningkatan dari 67,21 di tahun 2021 menjadi 68,50 pada tahun 2022. Tetapi untuk hasil nilai evaluasi SAKIP tahun 2022 tidak diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan dalam kriteria penilaian.

(b) **Capaian Realisasi IKU “Nilai Evaluasi SAKIP” Tahun 2022**

Berikut ini akan ditampilkan perolehan nilai SAKIP Kabupaten Padang Pariaman dari tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.47
Aspek Evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2018	2019	2020	2021
1	Perencanaan Kinerja	30	21,53	21,61	21,71	22,33
2	Pengukuran Kinerja	25	16,46	17,36	17,41	17,81
3	Pelaporan Kinerja	15	10,90	11,49	11,54	11,59
4	Evaluasi Internal	10	5,89	5,80	5,80	6,01
5	Capaian Kinerja	20	11,01	10,75	10,75	10,76
Nilai Hasil Evaluasi			65,80	67,01	67,21	68,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Adapun hasil evaluasi penilaian SAKIP Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 “**tidak diperbandingkan**” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen, dan kriteria penilaian SAKIP tahun 2022 yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut ini akan ditampilkan rincian hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 :

Tabel 3.48
Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	22,50
2	Pengukuran Kinerja	30	21,15
3	Pelaporan Kinerja	15	10,76
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,45
Nilai Hasil Evaluasi			68,86
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Dilihat dari table diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 Oleh Kemenpan RB mendapatkan total nilai sebesar 68,86. Nilai tersebut dikategorikan kedalam Tingkat Akuntabilitas Kinerja dengan kategori “B”.

(c) Strategi Penunjang Pencapaian IKU

Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai SAKIP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen Kepala Daerah (Bupati Padang Pariaman) dalam rangka peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Padang Pariaman.
2. Komitmen yang kuat dari seluruh OPD untuk mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan oleh Kepala OPD dengan Bupati Padang Pariaman dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Dokumen RPJMD 2021-2026.
3. Dilaksanakannya workshop bagi seluruh Kepala OPD dan jajarannya agar SAKIP dapat dipahami secara keseluruhan dengan narasumber yang berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang difasilitasi oleh Bagian Organisasi dan RB Sekretariat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
4. Seluruh Kepala OPD diwajibkan mampu menerapkan pelaksanaan SAKIP yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.
5. Optimalisasi kinerja Tim Penyusun LAKIP Kabupaten dengan Tim Reviu dan Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Daerah dengan melakukan pendampingan terhadap seluruh OPD dan Kecamatan dalam pelaksanaan Reviu LAKIP Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP OPD dan Kecamatan.

(d) Dokumentasi Kegiatan Terkait IKU

Adapun dokumentasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target IKU adalah sebagai berikut :

Gambar 3.78
Evaluasi SAKIP dan RB Tahun 2022 oleh Kemenpan RB



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.79
Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan oleh Inspektorat Tahun 2022



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.80
Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh Inspektorat Tahun 2022



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.81
Evaluasi SAKIP DPMPPT oleh Inspektorat Tahun 2022



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Kelemahan-Kelemahan Dalam Pengimplementasian SAKIP

Dalam mencapai Indikator **Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB** ini pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman merumuskan beberapa Program dan kegiatan diantaranya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi SAKIP OPD yang diampu oleh Bagian Organisasi dan PAN Sekretariat Daerah dan Program Pengawasan Internal . Namun Target Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 dengan target Nilai SAKIP “BB” Belum dapat dicapai karena masih terdapatnya kelemahan-kelemahan dalam pengimplementasian SAKIP antara lain :

1. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART.
2. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.
3. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja.
4. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektifitas program dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
5. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
6. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan inspektorat terhadap Perangkat Daerah belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.
7. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya Reformasi Birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

(e) Upaya-Upaya Dalam Pengimplementasian SAKIP

Untuk menjawab kelemahan kelemahan tersebut diatas dan untuk meningkatkan nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman perlu dilakukan berbagai upaya antara lain :

1. Melakukan reviu dokumen perencanaan secara keseluruhan untuk memastikan kualitas sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran kinerja yang tepat dengan mengacu pohon kinerja yang telah disusun sampai ke level individu.
2. Melakukan reviu atas keselarasan antara kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan.

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk mengintegrasikan fungsi perencanaan, keuangan, dan kinerja untuk meningkatkan kualitas manajemen kinerja secara menyeluruh.
4. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi dan tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan reward dan punishment bagi pimpinan sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja.
5. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan faktor penghambat pencapaian kinerja.
6. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal.
7. Menjadikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah.

3. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 69 bahwa : “Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini bertujuan untuk memonitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pemerintah daerah, khususnya dalam hal pencapaian tujuan otonomi daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

(a) Capaian IKU Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menjadi salah satu indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman periode 2021-2026. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.49
Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2018 (Realisasi Terakhir)	Tahun 2021			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian	
Nilai LPPD	Angka	3.0562	2,600	*	*	Menunggu proses penilaian Kemendagri

Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai LPPD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2021 masih menunggu proses penetapan peringkat melalui keputusan dari Kementerian Dalam Negeri yang sampai saat ini belum ditetapkan. Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman yang ada pada saat ini adalah nilai pada tahun 2018 dengan skor 3,056 (sangat tinggi). Dampak belum keluarnya nilai LPPD ini adalah tidak dapat diketahui seberapa jauh pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Dalam Negeri, hasil evaluasi LPPD seluruh Indonesia oleh Tim nasional EPPD sudah ada di Kemendagri, akan tetapi untuk penetapannya melalui Keputusan Menteri belum ada, sedangkan untuk membahas keputusan tersebut Tim nasional akan melakukan rapat kembali pada tanggal 26 Januari 2023 yang langsung dipimpin oleh Bapak Sekjen Kemendagri dengan peserta eselon 1 dari Kemenkeu, KemenpanRB, KemenPPN/Bappenas, BPKP, BPS dan Kemitraan.

Proses ini akan membutuhkan waktu lama dikarenakan SK Tim nasional baru terbit akhir Juni 2022, sehingga Tim nasional baru bekerja pada bulan Juli. Disamping itu secara teknis dikarenakan IKK semua baru, maka harus ditetapkan metodologi satu persatu IKK tersebut, Provinsi yang jumlahnya 114 IKK sedangkan untuk Kabupaten/Kota terdapat 126 IKK. Tapi tahun 2023 ini tidak ada lagi penetapan metodologi satu persatu, sehingga ditutup tanggal 31 Maret 2023 Timnas dan Timda bisa langsung melakukan pengerjaannya, target pertengahan 2023 ini hasil sudah keluar melalui aplikasi SILPPD.

(b) Program, Kegiatan, dan Upaya Penunjang IKU

Untuk memperoleh capaian nilai LPPD yang lebih baik, dilakukan melalui Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan LPPD. Sedangkan upaya yang dilakukan diantaranya :

- (1) Pengumpulan data Indikator Kinerja Kunci (IKK) masing-masing urusan yang diampu oleh seluruh OPD terkait ;
- (2) Reviu terhadap data Indikator Kinerja Kunci (IKK) oleh Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman ;

Gambar 3.82
Reviu LPPD



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- (3) Melaksanakan workshop atau bimbingan teknis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;

Gambar 3.83
Workshop Penyusunan LPPD



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- (4) Finalisasi penyusunan LPPD Kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.84
Finalisasi Penyusunan LPPD



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(c) Kendala dan Solusi Terkait Pencapaian IKU

Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai nilai LPPD sebagai berikut :

- (1) Tidak semua Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat dilaksanakan oleh OPD pengampu karena keterbatasan anggaran ;
- (2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;
- (3) Indikator kinerja IKK dalam LPPD banyak yang belum sinkron dengan dokumen perencanaan.

Adapun solusi yang dilakukan untuk pemecahan masalah diatas, yaitu :

1. Memprioritaskan anggaran untuk pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan ;
2. Menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk pelaksanaan program kegiatan menyangkut Indikator Kinerja Kunci (IKK) ;
3. Sinkronisasi Indikator kinerja IKK dalam LPPD dengan dokumen perencanaan.

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang ada untuk menunjang target pencapaian indikator kinerja. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut :

Tabel 3.50**Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

IKU	Program	Kegiatan	Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
Nilai LPPD	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	2021	Rp. 165.000.000	Rp. 155.691.280	94%
			2022	Rp. 126.072.000	Rp. 121.426.552	96,31%

Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Untuk mencapai nilai indikator LPPD ini, didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat dengan Kegiatan “Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah” Tahun 2021 sebesar Rp. 165.000.000 dengan realisasi Rp. 155.691.280 dan capaian persentasenya 94%. Sedangkan pada Tahun 2022 anggaran kegiatan dari program tersebut sebesar Rp. 126.072.000 dengan realisasi Rp. 121.426.552 dan capaian persentasenya 96,31%.

(e) Inovasi dan Penghargaan

SILPPD (Sistem Informasi Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah) adalah aplikasi terkait Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang berbasis aplikasi dan dikeluarkan oleh Kemendagri.

Gambar 3.85
Aplikasi SILPPD



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.86
Piagam Penghargaan Terkait Nilai LPPD Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Bagian TPKS Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 13

**Birokrasi yang efisien dan efektif
(kapabel)**

Sasaran Strategis “Birokrasi Yang Efisien dan Efektif (Kapabel)” merupakan turunan dari Misi ke-5 Kabupaten Padang Pariaman. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “ Indeks E-Government / SPBE”. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan SPBE dapat mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Nilai Indeks SPBE ditentukan berdasarkan hasil Evaluasi dari Kemenpan RB terhadap seluruh K/L/D. Indeks SPBE ini diukur berdasarkan tingkat kematangan berdasarkan struktur domain (terdiri dari empat (4) domain), aspek (terdiri dari delapan (8) aspek) dan indikator (terdiri dari 47 (empat puluh tujuh) indikator). Keempat domain meliputi Domain Kebijakan, Domain Tata Kelola, Domain Manajemen dan Domain Layanan SPBE. Berikut merupakan formulasi pengukuran indeks SPBE adalah sebagai berikut :

Formulasi = **Indeks SPBE Hasil Penilaian Kemenpan RB**

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2022

Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman pada 2022 mencapai 2,60. Nilai tersebut sudah termasuk kategori baik, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.51
Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2022		%	Interprestasi
		Target	Realisasi		
1	Indeks SPBE	2,44	2,60	106,55	Sangat Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tahun 2022, upaya untuk peningkatan prestasi pada IKU ini dilakukan sesuai target dan standar penilaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022, Nilai Indeks SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman adalah 2,60. Dari Target yang ditetapkan maka pencapaian IKU tahun 2022 dikategorikan Sangat Berhasil karena melampaui target indeks 2,44. Berikut Keputusan Kemenpan RB Nomor 108 Tahun 2023 terkait Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.52
Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	3,48	Baik
2	Pemerintah Kab. Lima Puluh Kota	3,29	Baik
3	Pemerintah Kab. Tanah Datar	3,21	Baik
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	3,18	Baik
5	Pemerintah Kabupaten Solok	3,12	Baik
6	Pemerintah Kota Payakumbuh	3,02	Baik
7	Pemerintah Kota Padang	3,01	Baik
8	Pemerintah Kota Sawah Lunto	2,84	Baik
9	Pemerintah Kota Padang Panjang	2,81	Baik
10	Pemerintah Kota Solok	2,71	Baik
11	Pemerintah Kota Pariaman	2,64	Baik
12	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	2,60	Baik
13	Pemerintah Kota Bukit Tinggi	2,46	Cukup
14	Pemerintah Kab. Dharmasraya	2,41	Cukup
15	Pemerintah Kabupaten Agam	2,38	Cukup
16	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	2,36	Cukup
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	2,26	Cukup
18	Pemerintah Kab. Sijunjung	2,18	Cukup
19	Pemerintah Kab. Pasaman	1,91	Cukup

Sumber : Keputusan Kemenpan RB Nomor 108 Tahun 2023

(b) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan capaian realisasi Nilai SPBE tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.53
Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	2021		2022		%	Interprestasi
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Indeks SPBE	2,15	2,60	2,44	2,60	106,55	Sangat Berhasil

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Upaya untuk meningkatkan nilai SPBE sudah dilaksanakan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya partisipasi dan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal dari stakeholder yang terkait dalam penilaian SPBE.

Untuk mendukung penilaian ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman harus melengkapi seluruh *evidence* yang diminta KemenpanRB saat dilakukan evaluasi mandiri pada Aplikasi Monitoring Evaluasi SPBE dari KemenpanRB. Atas kerja keras dan usaha yang telah dilaksanakan, sesuai Kepmen PAN & RB 108 Tahun 2023 Tentang Hasil Tauval Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menerima Indeks 2,60.

Di tahun 2022 target Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Dokumen RPJMD 2021-2026 adalah sebesar. Berpatokan kepada hasil yang diperoleh, maka dapat dipastikan pelayanan kepada masyarakat pun meningkat, meskipun nilai yang diperoleh masih sama dengan tahun 2021. Adapun predikat indeks SPBE Nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.54
Predikat Nasional Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5	Memuaskan
2	3,5 - < 4	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(c) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Nasional dan Kabupaten Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi standar nasional dengan Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.55
Capaian Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Standar Nasional Tahun 2022

Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional yang ditargetkan Oleh Pemerintah Kabupaten	Realisasi Kabupaten Tahun 2022	%	Interpretasi
Indeks SPBE	Nilai	4	2,60	65	Baik

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dibandingkan dengan realisasi yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka Nilai Indeks SPBE yang diperoleh terlihat baik. Karena dengan penetapan Skala 4 (empat) tertinggi, pada tahun 2022 saja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah mampu meraih 65% realisasi dari target yang ditetapkan. Diharapkan pada tahun 2023 hasilnya mampu melampaui nilai yang diraih pada tahun 2022.

(d) Perbandingan Realisasi Nilai SPBE Nasional dan Kabupaten Tahun 2022

Adapun Nilai Indeks SPBE Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan domain dan aspek SPBE adalah sebagai berikut :

Tabel 3.56
Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022 (Domain dan Aspek)

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,60
	Domain Kebijakan SPBE	3,40
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3,40
	Domain Tata Kelola SPBE	2,70
	Perencanaan Strategis SPBE	2,25
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,00
	Penyelenggara SPBE	3,00
	Domain Manajemen SPBE	1,09
	Penerapan Manajemen SPBE	1,13
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	2,87
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,90
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) Domain SPBE, Domain Kebijakan memiliki nilai yang sangat baik yaitu 3,40, kemudian Domain Layanan 2,87, Domain Tata Kelola 2,70 dan Domain Manajemen memiliki Nilai Indeks SPBE yang sangat rendah yaitu 1,09.

1. Domain Kebijakan meliputi keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE sebagai **evidence** yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yaitu berupa **Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 25 Tahun 2021** (telah memuat dan mengatur tentang Kebijakan Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE, Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi), **Masterplan SPBE dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE**. Kebijakan ini merupakan hasil reviu dari kebijakan sebelumnya. Kemudian untuk Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, dimana

tercantum dalam Keputusan Bupati Padang Pariaman nomor 359/KEP/BPP/2020 tanggal 16 Juli 2020 Tentang Pembentukan Tim Pengarah, Tim Pemantau dan Tim evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tugas dari masing-masing tim. Isi pasal yang terdapat didalam kebijakan ini adalah versi lengkap dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah melaksanakan Audit Internal TIK.

2. Domain Layanan SPBE

Pada Domain Layanan SPBE, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan Layanan Administrasi dan Layanan Publik SPBE. Layanan Administrasi yaitu Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa serta Layanan Kepegawaian. Hal ini menjadi kekuatan dalam Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Proses manajemen SPBE yang dilakukan sudah terpadu dengan proses tata kelola lainnya dan sudah memiliki kontribusi ke unitnya. Layanan Publik yaitu Layanan DISDUKCAPIL Ceria, Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik BPHTB, Layanan Publik NAGITA, dan Layanan Publik SIKDA GENERIK PUSKESMAS.

Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat terlihat bahwa diantara beberapa indikator pada aspek ini yang memiliki Tingkat Kematangan yang baik yang bisa menjadi kekuatan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik adalah Aplikasi Publik yaitu SIKDA GENERIK PUSKESMAS. Aplikasi ini sudah bisa menyediakan layanan diseminasi, interaksi, transaksi dan kolaborasi.

Evidence tersebut diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah, disamping itu dinas KOMINFO juga menyusun Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang SPBE, Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Email Resmi Dinas, Penyusunan Draft Masterplan SPBE, yang merupakan dokumen utama yang diperlukan dalam SPBE.

(e) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2022 capaian Nilai SPBE ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi total dana sebanyak Rp. 8.612.511.118,- dengan proyeksi/komposisi anggaran tersebut, tidak semua dialokasikan untuk pencapaian IKU tersebut. Dengan segala

daya dan upaya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meng-efisiensikan Sumber Daya yang ada. Pada tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi total dana sebanyak Rp. 6.098.344.337,-. Dengan proyeksi/komposisi anggaran tersebut, tidak semua dialokasikan untuk pencapaian IKU tersebut.

Untuk pencapaian Nilai SPBE pada tahun 2022 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi total dana sebanyak Rp. 8.612.511.118,-, proyeksi anggaran tersebut naik karena adanya penambahan pada biaya sewa internet daerah. Senada dengan tahun 2021, dengan segala daya dan upaya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika untuk meng-efisiensikan Sumber Daya yang ada, karena tidak semua dialokasikan untuk pencapaian IKU. Keberhasilan pencapaian target indeks SPBE Tahun 2022, didukung dengan pemenuhan anggaran pelaksanaan kegiatan yang berdampak kepada SPBE. Dengan anggaran yang dialokasikan pada tahun 2022, SPBE padang pariaman dapat berjalan dengan baik, namun belum dapat meningkatkan capaian indeks yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu.

Bersasarkan hasil penilaian SPBE Kabupaten Padang Pariaman, dari 4 Domain SPBE yang dinilai, Padang Pariaman baik dalam pelaksanaan 2 aspek yaitu aspek kebijakan dan aspek layanan. Sedangkan 2 aspek lagi masih bernilai rendah yaitu aspek Tata Kelola dan Aspek Manajemen. Dengan demikian untuk meningkatkan indeks SPBE dibutuhkan dukungan SDM dan anggaran yang memadai untuk meningkatkan dua aspek yang masih bernilai kurang dimaksud.

(f) Kesenjangan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut kesenjangan atas efisiensi penggunaan Sumber Daya yang ditemui selama kurun waktu tahun 2022 :

a) **KEBIJAKAN DAN TATAKELOLA**

- a. Belum ditetapkannya arsitektur SPBE
- b. Pada tingkat strategis belum ada Tim Pengarah yang merencanakan, menetapkan dan mengendalikan kebijakan pengembangan SPBE.
- c. Kurangnya peran serta tim pengarah dan tim koordinasi dalam pengembangan SPBE
- d. Pengendalian pelaksanaan kebijakan pengembangan SPBE tidak ada, hal ini merupakan konsekuensi logis ketiadaan Tim Pengarah pada tingkat strategis.
- e. Belum terdapat perencanaan dan pelaksanaan pengendalian risiko SPBE secara sistematis.
- f. Kurangnya Regulasi dalam implementasi SPBE;
- g. Operasional kegiatan Sistem Informasi dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing Perangkat Daerah

- b) SUMBER DAYA MANUSIA
 - a. Jumlah sumber daya manusia SPBE secara keseluruhan masih kurang. Termasuk untuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola dan pengembang semua sistem .
 - b. Ketersediaan sumber daya manusia SPBE yang belum mampu memenuhi seluruh aspek penerapan sistem informasi;
 - c. Kesulitan yang sering timbul akibat dinamika organisasi (mis. mutasi, promosi ke bidang lain, dsb.) pada sumber daya manusia SPBE, sementara tenaga pengganti belum tersedia.
- c) APLIKASI LAYANAN SPBE
 - a. Belum tersedia perencanaan sistem informasi yang *up-to-date* pada tingkat strategis, yang melingkupi seluruh lingkungan Pemerintah Padang Pariaman.
 - b. Belum tersedia arsitektur rinci yang mendefinisikan kebutuhan dan interaksi antar sistem aplikasi.
 - c. Belum tersedia panduan dan/atau rujukan bagi masing-masing Perangkat Daerah dalam pengembangan sistem informasi.
 - d. Belum tersedia kebijakan, standar, dan prosedur pada pengembangan sistem informasi misalnya terkait dengan manajemen proyek/kegiatan, penjaminan kualitas, manajemen konfigurasi, manajemen perubahan, dan sebagainya.
 - e. Belum tersedia kerangka koordinasi pengembangan sistem informasi yang dapat dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan koordinasi pengembangan sistem informasi Pemerintah Daerah Padang Pariaman.
- d) INFRASTRUKTUR SPBE
 - a. Jaringan lokal antar Perangkat Daerah tidak semuanya berfungsi dengan baik karena pemanfaatannya belum optimal;
 - b. Belum terdapat kebijakan yang secara formal mengatur pengelolaan infrastruktur jaringan serta kebijakan dan standar yang mengatur pengelolaan tingkat ketersediaan layanan (*Service Level Management*) pada penyelenggaraan infrastruktur jaringan;
 - c. Belum terdapat dokumentasi perencanaan pengembangan infrastruktur jaringan yang disepakati dan tersosialisasi dengan baik;
 - d. Data center sebagai pusat sumber daya data dan informasi sudah tersedia tetapi perlu dioptimalkan dan belum semua aplikasi di simpan pada data center sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pemeliharannya.

- e. Jaringan Internet sudah terkoneksi keseluruhan OPD , kecamatan dan puskesmas tetapi akses internetnya belum maksimal

(g) Anggaran Program dan Kegiatan

Adapun rincian anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.57
Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan 2022

1. Program		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Kegiatan	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah		
Tahun	2021	2022	
Jumlah Anggaran	1.579.058.250	2.959.643.470	
Capaian Output	300Mbps	800Mbps	
Peningkatan anggaran karena adanya penambahan Jasa Sewa Bandwith/Internet Daerah. Masih dianggap efisien karena cakupan layanan bandwith tidak hanya menysasar kepada kualitas layanan internet, namun pada penambahan Coverage Area Baru (OPD hingga UPT)			
2. Program		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Sub Kegiatan	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah		
Tahun	2021	2022	
Jumlah Anggaran	262.380.890	183.466.190	
Capaian Output	4 Server Mirroring, Operasional Ruang Server Pemda dan Maintanace Infrastruktur Jaringan	4 Server Mirroring, Operasional Ruang Server Pemda dan Maintanace Infrastruktur Jaringan	
Segala bentuk pengembangan penguatan insfrastruktur data center daerah, telah dilaksanakan pada tahun 2021. Sehingga pada tahun 2022 terjadi penghematan anggaran pada sub-kegiatan ini.			
3. Program		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Kegiatan	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		

	Sub Kegiatan	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota	
	Tahun	2021	2022
	Jumlah Anggaran	20.713.750	28.878.510
	Capaian Output	Nilai Indeks SPBE 2,60	Nilai Indeks SPBE 2,60
	Secara angka yang tertera pada anggaran memang terjadi peningkatan, namun belum mampu untuk meningkatkan performa IKU Daerah yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Harusnya ini menjadi perhatian Pimpinan dalam perumusan anggaran, karena secara langsung, sub-kegiatan ini adalah master mindnya penilaian Indeks SPBE pada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.		
4.	Program Kegiatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	
	Tahun	2021	2022
	Jumlah Anggaran	32.172.000	32.172.000
	Capaian Output	20%	25%
	Meskipun tidak terjadi penambahan anggaran pada sub-kegiatan ini, namun efisiensi atas penggunaan anggaran tetap diupayakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, ini dibuktikan dengan pencapaian <i>Persentase Aplikasi Interaktif dan Integrasi utk mewujudkan E-Government dalam rangka menuju Smart City di Kabupaten Padang Pariaman yang terwujud sebanyak 25%</i>		
5.	Program Kegiatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik	
	Tahun	2021	2022
	Jumlah Anggaran	32.490.000	27.183.530
	Capaian Output	1 Pusdatin Pemda	1 Pusdatin Pemda
	Terdapat pengurangan anggaran pada sub-kegiatan ini, namun efisiensi atas penggunaan anggaran tetap diupayakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini		

	dibuktikan dengan Pengelolaan data Padang Pariaman Dalam Sebuah Sistem, meskipun masih dirasa kurang optimal.		
6.	Program	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah daerah Kabupaten/Kkota Berbasis Elektronikdan Non Elektronik	
	Tahun	2021	2022
	Jumlah Anggaran	28.878.750	33.985.150
	Capaian Output	10 OPD	22 OPD
	Secara angka yang tertera pada anggaran memang terjadi peningkatan, namun belum mampu untuk meningkatkan pengoptimalan pengelolaan sarana dan Prasarana Oeperasional dan dukungan persandian untuk pengamanan Informasi. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kinerja yang hanya mencapai 50% dari 68% yg ditargetkan.		
7.	Program	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan	Pelayanan Informasi Publik	
	Tahun	2021	2022
	Jumlah Anggaran	40.485.000	38.099.815
	Capaian Output	27 Perangkat Daerah	41 Perangkat Daerah
	Secara angka yang tertera pada anggaran memang terjadi peningkatan, namun belum mampu untuk meningkatkan pelaksanaanya layanan informasi dan dokumentasi. Hal ini didasri pada pengelolaan PPID yang belum dirasa Optimal di Kabupaten Padang Pariaman.		

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(a) Dokumentasi Kegiatan**Gambar 3.87****Pengelolaan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan pemateri Bapak Hamza Fansur, S.Kom, M.sc dari Kementerian PANRB**

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.88**Studi Komparasi Penggunaan Aplikasi Srikandi**

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.89**Pelaksanaan pelatihan penggunaan dan pengelolaan teknis Command Center**

Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.90
Bimtek Literasi Digital UMKM Se-Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.91
Bimtek Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Se-Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.92
Coaching Clinic Peyusunan Peta Proses Bisnis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.93
Studi Tiru SPBE dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ke Pemerintah Republik KOREA Selatan, bersama Korean Kenaf Group (KKG) tahun 2022



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.94
MOU Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan PT ICON Ne



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.95
Ruangan Command Center dan Digital Lounge, sebagai pendukung layanan IT yang terintegrasi se-Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.96
Penghargaan sebagai peserta Gerakan Menuju 100 Smart City untuk dimensi Smart Branding Tahun 2021



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.97
Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Achievement Motivation Person dan Anugerah Buka Award tahun 2022



Sumber : Diskominfo Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 14**Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas**

Sasaran Strategis Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang Berkualitas merupakan turunan dari misi Kabupaten yang Ke-5 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang efektif, Bersih Berkeadilan, Demokratis, Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif, Dan Transparan”. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Indeks Pelayanan Publik”.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, guna memperoleh gambaran tentang kondisi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik maka dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas adalah “Indeks Pelayanan Publik”.

(a) Perbandingan Capaian Target dan Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2022

Adapun capaian realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publikm” tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.58
Capaian Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Kategori
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,65	101,97	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2022 nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan nilai 4,65 kategori “A” atau *Pelayanan* Prima, dengan rincian : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperoleh nilai 4,74 kategori “A” atau Pelayanan Prima dan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu memperoleh nilai 4,56 kategori “A” atau Pelayanan Prima. Perangkat Daerah tersebut menjadi lokus evaluasi KemenPANRB untuk penilaian penyelenggaraan publik. Dengan demikian, realisasi tahun 2022 (nilai indeks pelayanan publik 4,65) melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,56 dengan capaian 101,97%. Indeks pelayanan publik adalah nilai indeks pelayanan publik hasil evaluasi KemenPANRB. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan formula sebagai berikut :

$$\text{Formulasi Pengukuran} = \frac{\text{Nilai Indeks Pelayanan Publik}}{\text{Hasil Evaluasi KemenPANRB}}$$

(b) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Indeks Pelayanan Publik Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.59

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Kategori
			Target	Realisasi	Selisih (%)	
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,49	4,56	4,65	3,51%	Sangat Berhasil

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 sebesar 4,49 dengan Kategori “A-” atau Sangat Baik, dengan rincian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 4,74 dengan Kategori “A” atau Pelayanan Prima dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu memperoleh nilai 4,23 kategori “A-” atau Sangat Baik, sehingga presentase capaian tahun 2021 sebesar 98,46%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar dimana presentase capaian sebesar 101,97% mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 3,51%.

(c) Perbandingan Capaian Realisasi IKU Provinsi dan Kabupaten

Adapun perbandingan capaian realisasi IKU “Indeks Pelayanan Publik” Provinsi dan Kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.60
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
dengan Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Kinerja Provinsi Tahun 2022	Realisasi Kinerja Kabupaten Tahun 2022	Selisih
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,83	4,65	0,81

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Nilai Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 realisasinya sebesar 3,83 dengan Kategori “Baik”. Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2022 yang diperoleh Kabupaten Padang Pariaman lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi provinsi, dimana Kabupaten Padang Pariaman memperoleh nilai 4,65 dengan kategori “A” atau pelayanan prima.

(d) Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penunjang IKU

Untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaan pelayanan publik tersebut terdapat beberapa faktor pendukung tercapainya target kinerja, antara lain sebagai berikut :

1. Koordinasi dan kolaborasi yang baik antara Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman dengan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan Publik (UKPP) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Menjadikan hasil evaluasi dan rekomendasi KemenPANRB pada tahun sebelumnya sebagai salah satu patokan dalam perbaikan pelayanan.
3. Bagian Organisasi berupaya melakukan monitoring dan evaluasi serta pendampingan terhadap UKPP yang menjadi lokus evaluasi.
4. Respon yang maksimal dari UKPP yang di evaluasi/yang dinilai, termasuk juga komitmen dari Kepala Dinas terkait/UKPP dalam mempersiapkan dokumen maupun sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan publik.

Dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan juga tidak terlepas dari hambatan dan masalah yang terjadi diantaranya adalah :

1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan di UKPP.
2. Keterbatasan SDM dalam pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan kompetensi jabatan pada UKPP.
3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

(e) Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Untuk mencapai Indikator kinerja Nilai Indeks Pelayanan Publik tersebut Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan tersebut diantaranya:

1. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - ✓ Sub Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan Anggaran Rp. 40.000.000 dan realisasi anggarannya Rp. 39.850.000 atau dengan persentase 99,62%. Hasil dari SKM ini menjadi salah satu patokan atau standar perbaikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Gambar 3.98**Publikasi Hasil SKM dan Penandatanganan Janji Perbaikan Layanan Serta Forum Konsultasi Publik**

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- ✓ Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik dengan Anggaran Rp. 45.012.670 dan realisasi anggarannya Rp. 43.903.967 atau dengan persentase 97,53%. Salah satu yang menjadi objek monitoring dan evaluasi pelayanan publik adalah terkait dengan penilaian kepatuhan standar pelayanan oleh Ombudsman setiap tahunnya. Hasil penilaian tersebut menjadi bagian terpenting dalam pengukuran/indikator perbaikan standar pelayanan pada UKPP. Disamping itu, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan terkait dengan penilaian evaluasi/rekomendasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh KemenPANRB.

(f) Upaya Penunjang IKU

Salah satu upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unit penyelenggara pelayanan. Sesuai Permenpan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk

Penyelenggara Pelayanan Publik, maka Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap unit penyelenggara pelayanan dilaksanakan minimal 1 kali setahun. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan bertujuan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan indikator dan metodologi Survei yang sudah ditentukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan (menyusun instrumen survei, besaran dan teknik sampling, responden)
2. Pengumpulan data
3. Pengolahan data
4. Analisis hasil/evaluasi hasil
5. Pelaporan dan publikasi

(g) Peran Dinas Yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) di dapatkan dari hasil penilaian Evaluasi Kinerja dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh KemenPANRB ditahun berjalan. Penyerahan hasil penilaian tersebut disertai dengan rekomendasi perbaikan layanan bagi aspek yang belum terpenuhi oleh UKPP yang dinilai (DPMPTP & Disdukcapil). Sebagai lokus dari penilaian tersebut, DPMPTP dan Disdukcapil terus berbenah dan berupaya memenuhi aspek layanan sesuai standar pelayanan yang tercantum dalam Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan didampingi oleh Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi. Hal tersebut terbukti dari grafik hasil penilaian yang didapat setiap tahunnya yang terus meningkat.

Pada tahun 2022, berdasarkan Hasil Keputusan MenPANRB Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 kedua UKPP telah mendapatkan Predikat Pelayanan Prima dan bahkan 3 (tiga) besar tingkat Nasional untuk Dinas Dukcapil. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa peningkatan pemberian layanan publik yang berkualitas oleh kedua UKPP sangat berperan penting bagi Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik Berkualitas di Padang Pariaman khususnya.

Gambar 3.99
Penganugrahan Penghargaan Pelayanan Publik



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 15**Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**

Sasaran Strategis “Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat” merupakan turunan dari Misi Kabupaten Padang Pariaman yang Ke-6 yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator Kinerja Utama dari sasaran ini adalah “Angka Usia Harapan Hidup”.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan kesehatan pada masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2022. Salah satunya adalah meningkatkan angka Usia Harapan Hidup.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman :

Tabel 3.61**Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Usia Harapan Hidup	68.99 Tahun	69.34 Tahun	100.50	Sangat Berhasil

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu 69,34 tahun sedangkan target yang ditetapkan adalah 68.99 tahun dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, Artinya angka

harapan hidup ini adalah seorang bayi yang dilahirkan di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mempunyai harapan hidup selama 69.34 tahun ke depan atau rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seseorang akan mencapai umur 69.34 tahun pada tahun kedepan.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi UHH pada tahun 2022 dengan Tahun 2021:

Tabel 3.62
Perbandingan Target dan Realisasi UHH
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Usia Harapan Hidup	Tahun	68.89	68,97	100.12	68.99	69.34	100.50	Sangat Berhasil

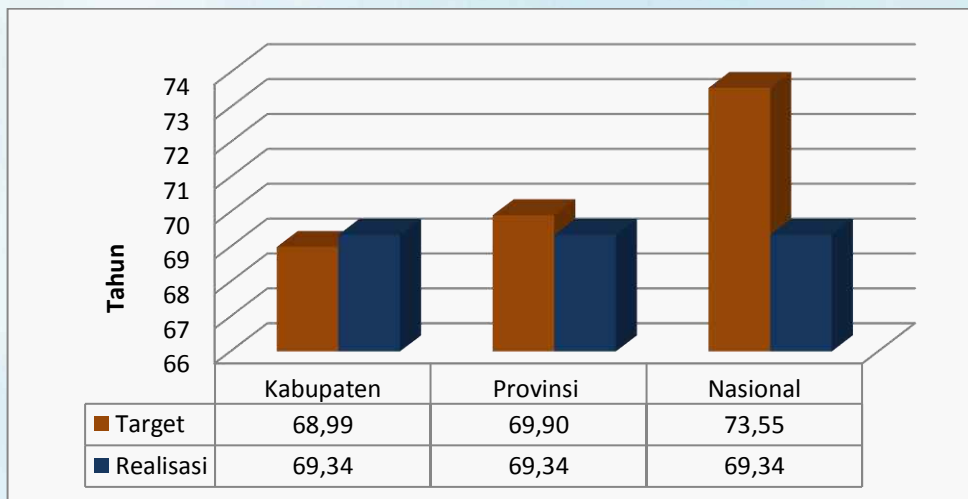
Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja Usia Harapan Hidup tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian UHH tahun 2021 yaitu sebesar 0.37.

(c) Perbandingan Realisasi IKU Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Tahun 2022

Adapun perbandingan terkait hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.14
Capaian Kinerja Indeks Pembangunan Gender Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022

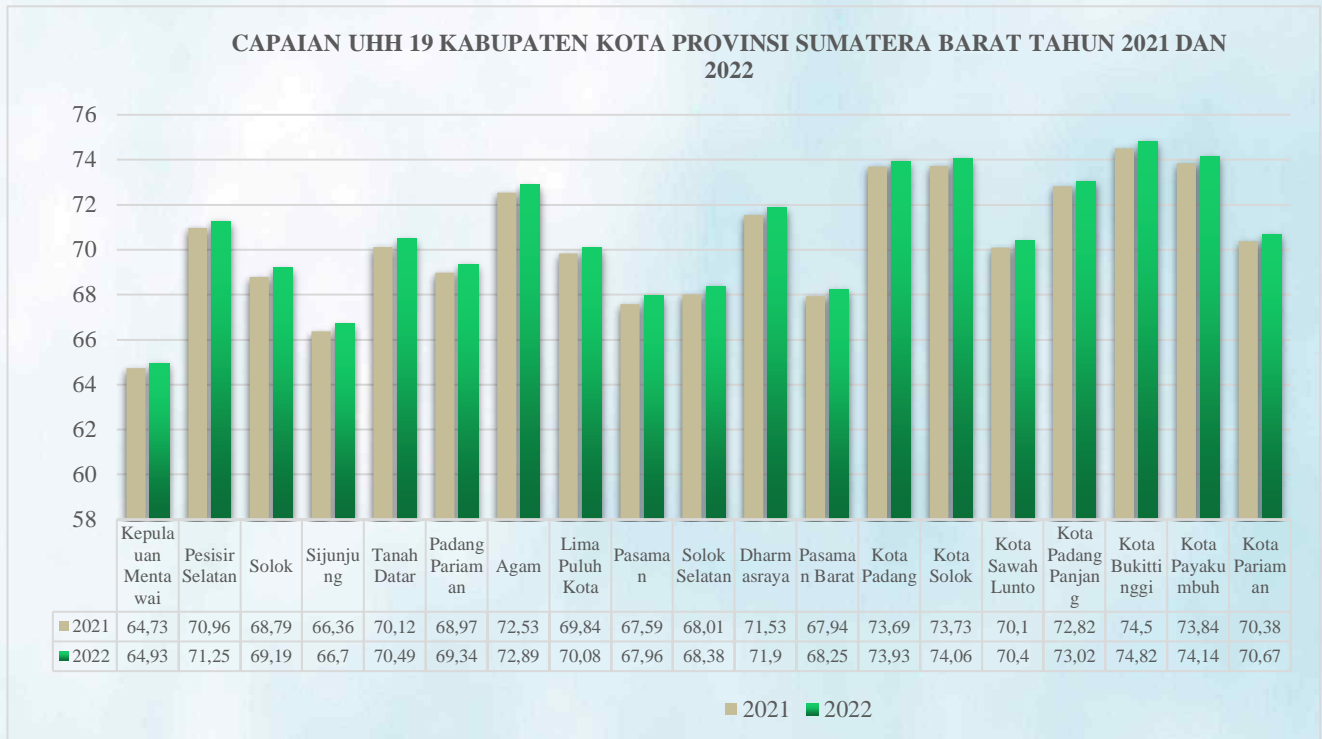


Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indikator Kinerja Utama Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dimana realisasi Kabupaten sebesar 69,34 tahun melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 68,99 tahun dengan persentase keberhasilan mencapai 100,50%. Sedangkan realisasi nasional sebesar 69,34 Tahun dengan persentase capaian sebesar 94,27% dan realisasi pada Provinsi Sumatera Barat yaitu 69,34 dengan persentase capaian sebesar 99.20%.

Capaian Indikator Kinerja Usia Harapan Hidup di 19 Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.15
Capaian UHH 19 Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dan 2022



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada grafik 3.15 dapat dilihat bahwa terlihat bahwa 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat mengalami peningkatan UHH di tahun 2022 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021. UHH yang tertinggi pada tahun 2022 yaitu Kota Bukittinggi dengan capaian 74.82 tahun. Capaian UHH Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “Berhasil”, dimana target UHH nasional tahun 2022 adalah 73.55 tahun dan realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 69.34 tahun (94.27%).

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian Indeks kesehatan dan usia harapan hidup bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan namun merupakan tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai target harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

(d) Upaya Penunjang IKU

Angka usia harapan hidup dapat meningkat karena adanya upaya pengendalian masalah kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk mencapai usia harapan hidup yang tinggi dilakukan peningkatan cakupan pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular, yang diantaranya :

1. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Sesuai Standar Orang Dengan Resiko HIV. Persentase orang dengan risiko terinfeksi *HIV* yang mendapatkan pelayanan deteksi dini *HIV* sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 sebesar 100%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 setiap pasien TBC, IMS, Ibu hamil wajib melakukan *skrening HIV*, dan ini yang menjadi faktor keberhasilan peningkatan capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan pelayanan HIV di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman :

Gambar 3.100

Pemeriksaan dan Skrening HIV pada Pasien TBC



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Sesuai Standar Orang Dengan Resiko TBC. Cakupan penderita terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebesar 82,92%. Capaian ini cukup berhasil dari target 100%. Hal ini dikarenakan penemuan terduga TBC yang bersifat pasif dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit TBC serta pemegang program TBC yang sering diganti tiap tahunnya sehingga data TBC ada yang tidak terpantau. Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang capaian pelayanan penderita terduga TBC diantaranya supervisi Bimtek, Monitoring dan Evaluasi, Validasi data TB SO/RO, pelacakan kasus dan investigasi kontak. Pada tahun 2022 pelayanan TBC telah sesuai dengan standar tapi belum mencapai target, jika dibandingkan tahun 2021 capaian pelayanan penderita terduga TBC mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemegang program TBC dan dukungan dari lintas program maupun lintas sektor. Selain itu tersediannya alat TCM yang ada di lima tempat yaitu RSUD Parit Malintang, Rumah Sakit Paru, Puskesmas Kayu Tanam, Puskesmas Sungai Limau dan Puskesmas Ampalu yang menunjang meningkatnya capaian pelayanan penderita terduga TBC di Kabupaten Padang Pariaman. Berikut ini dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan :

Gambar 3.101
Pelacakan Kasus TBC



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.102 Investigasi Kontak TBC



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.103 Validasi Data TBC



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Untuk meningkatkan capaian TBC di tahun mendatang Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan beberapa solusi, antara lain :

- a. Menciptakan inovasi supaya terlaksana penjangkaran TBC secara aktif
- b. Melakukan sosialisasi ke masyarakat terutama ke kelompok yang beresiko
- c. Melakukan permintaan media promosi kesehatan ke Dinas Provinsi Sumatera Barat
- d. Membuat komitmen dengan kepala puskesmas supaya tidak mengganti pemegang program TBC

(e) **Kegiatan Penunjang Pencapaian IKU**

1. *Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Penderita Diabetes Melitus*

Capaian penderita *Diabetes Melitus (DM)* yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan angka prevalensi DM pada tahun 2022 sudah berhasil yaitu sebesar 92.67%. Capaian ini tidak tercapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yaitu 100%. Hal ini dikarenakan gejala penyakit diabetes melitus yang mudah diketahui membuat penderitanya lebih rutin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yaitu :

Gambar 3.104

Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan kurangnya sosialisasi ke masyarakat terkait pentingnya pemeriksaan kesehatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan mencari solusi agar ditahun mendatang capaian pelayanan Diabetes Melitus mencapai target yang ditetapkan diantaranya:

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien *hypertensi* tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas.
- b. Mengajukan permintaan pelatihan petugas P2PTM kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat karena tidak diakomodir dalam anggaran APBD.
- c. Membuat surat pernyataan oleh setiap petugas yang sudah dilatih tidak boleh pindah selama 5 tahun.

2. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Penderita Hipertensi

Capaian penderita *hipertensi* di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 belum berhasil yaitu sebesar 73.61%. Capaian ini masih sangat jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100%. *Hipertensi* masih dianggap sepele oleh sebagian masyarakat sehingga banyak orang dengan *hipertensi* tidak melakukan pengobatan secara rutin. Kurangnya promosi dan sosialisasi tentang *hipertensi* menyebabkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut tidak datang berobat ke puskesmas dan yang datang ke fasyankes hanya sasaran yang sama. Berikut adalah dokumentasi kegiatan pelayanan kesehatan penderita hipertensi.

Gambar 3.105

Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM)



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Kesehatan mencari solusi agar ditahun mendatang capaian pelayanan *Hipertensi* mencapai target yang ditetapkan diantaranya :

- a. Melakukan sosialisasi kegiatan Program Posbindu PTM kepada Dokter Puskesmas dan petugas pengelola P2PTM puskesmas dan memberikan arahan agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama pada pasien *hipertensi* tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin dengan melibatkan petugas Promkes Puskesmas.
- b. Melakukan penyuluhan pada saat Posbindu kepada kelompok sasaran P2PTM tentang faktor-faktor pemicu meningkatnya tekanan darah dan menjelaskan kandungan yang terkandung didalam garam dan santan.
- c. Puskesmas membuat inovasi tentang melakukan kunjungan rumah bagi pasien yang tidak datang ke posbindu.

3. Rapid Village Survey (RVS) Kusta di Puskesmas

Penyakit kusta atau lepra merupakan penyakit infeksi kronis yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium Leprae* dan utamanya mempengaruhi kulit, saraf tepi, mukosa saluran pernafasan atas

dan mata. Bakteri lepra mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu, daya tahan hidup di luar tubuh manusia mencapai 9 hari dan memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan bisa lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus kusta yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.

Pada tahun 2022, Angka penemuan penderita kusta baru atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah 3.54/ 100.000 penduduk (jumlah kasus baru 15 orang), dimana target yang ditentukan adalah < 5 per 100.000 penduduk. Artinya masih ada penularan penyakit kusta pada masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 15 orang. Setelah ditemukan kasus baru dilakukan Pemeriksaan kontak serumah. Guna untuk penemuan kasus secara dini. Supaya tidak terjadi penularan lainnya.

Untuk menekan angka penemuan kusta baru (CDR) tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan *Rapid Village Survey* (RVS) yang merupakan suatu cara menemukan penderita baru kusta secara aktif dalam lingkup yang lebih kecil (Kenagarian/ Korong) yang dilakukan secara rutin per bulan melalui deteksi dini pada kelompok rentan, kelompok beresiko tertular, dan kelompok tertular.

Gambar 3.106
Deteksi Dini Kusta



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Penemuan penderita baru terkait dengan deteksi dini penyakit kusta di masyarakat yang sangat sulit. Ini dikarenakan anggapan masyarakat yang negatif terhadap penderita kusta seperti rasa ketakutan yang berlebihan kepada masyarakat dan petugas kesehatan karena menganggap kusta adalah kutukan, penyakit keturunan dan guna-guna, sehingga penderita malu untuk berobat ke fasyankes. Kondisi kecatatan penderita kusta yang ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman ada 1 penderita yang masuk kategori Cacat tingkat 2. Hal ini dikarenakan adanya upaya pencarian pelayanan kesehatan oleh penderita kusta dan keluarga yang salah seperti penggunaan pengobatan tradisional.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman terus berupaya melakukan penemuan kasus sejak dini dan juga meningkatkan sosialisasi ke seluruh masyarakat, dan juga melakukan edukasi dan penyebaran informasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

4. Kasus DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) telah dikenal di Indonesia sebagai penyakit yang endemis di masyarakat, terutama sangat berbahaya bagi kalangan anak-anak. Penyebab penyakit ini adalah virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* sebagai faktor utama, disamping nyamuk *Aedes Albopictus*. Demam dengue dapat menyebabkan demam tinggi, ruam, nyeri otot dan sendi. Sedangkan demam berdarah dengue (DBD) dapat menyebabkan kebocoran plasma yang mengakibatkan perdarahan serius, penurunan tekanan darah tiba-tiba (syok), hingga bahkan kematian.

Penyakit demam berdarah yang disebabkan oleh virus ini dapat menyerang siapa saja, dari tingkat anak-anak hingga orang dewasa. Pada umumnya penderita demam berdarah sebelumnya mengalami gejala yang sangat bervariasi. Mulai demam ringan sampai gejala yang paling berat, seperti penderita mengalami muntah-muntah atau berak darah. Biasanya penderita demam berdarah dialami oleh bayi atau anak-anak, ditandai dengan ruam-ruam pada kulit. Di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sudah tercatat 62 kasus positif DBD. Musim hujan yang menyebabkan banyaknya genangan air, diterangi menjadi penyebab utama kembali meningkatnya kasus DBD tersebut.

Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan Puskesmas di wilayahnya melakukan sosialisasi 3M Plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mengubur barang yang tidak layak pakai, dan Plus kegiatan yang tergantung pada kreativitas seperti memelihara ikan cupang, menaburkan bubuk abate, menggunakan obat nyamuk dan lain-lain. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga melakukan Fogging apabila penderita DBD lain di lokasi penderita (20 rumah sekitar penderita).

Gambar 3.107
Kegiatan Fogging



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.108
3M Plus



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

5. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah 5 tahun/balita. Pada tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 25% dimana target 18.4%. Walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan tetapi prevalensi stunting menurun di banding tahun 2021 yaitu dari 28.3% menjadi 25% turun sebesar 3.3%.

Permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya. Kompleksnya masalah stunting dan banyaknya *stakeholder* yang terkait dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas.

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan yang menunjang penurunan angka stunting antara lain:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil dan Ibu Bersalin

- 1) Ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 99,59%, hal ini menunjukkan jika cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan sudah melebihi target nasional sebesar 80%, karena dari Kemenkes sendiri telah memberikan MT dengan jumlah yang cukup sehingga pemenuhan capaiannya juga optimal. Presentase cakupan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan di puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman juga sudah melebihi target yang telah ditentukan nasional. Puskesmas yang memiliki presentase ibu Kurang Energi Kronis (KEK) mendapat makanan tambahan terkecil yaitu Puskesmas Sei Sarik dengan persentase 87,5%. Sedangkan, puskesmas lainnya di Kabupaten Padang Pariaman sudah mencapai persentase 100%.

Gambar 3.109

Pemeriksaan Ibu Hamil KEK



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- 2) Ibu hamil yang mendapatkan TTD Min 90 Tablet dan Ibu Bersalin yang mendapatkan Vitamin A. Persentase cakupan ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 90,89%, hal ini menunjukkan jika cakupan ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah sudah melebihi target nasional sebesar 82%, karena pemberian TTD tersebut telah dilakukan secara optimal.

Gambar 3.110
Ibu Hamil yang mendapatkan TTD Min 90 Tablet



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Balita

- 1) Bayi usia 6-59 Bulan yang mendapatkan Vit-A.ersentase cakupan bayi usia 6-59 bulan mendapat vitamin A di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 adalah sebesar 96,61%, hal ini menunjukkan jika cakupan bayi usia 6-59 bulan mendapat vitamin A sudah melebihi target nasional sebesar 88%.

Gambar 3.111
Pemberian Vitamin A pada Bayi Usia 6-59 Bulan



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- 2) Balita Gizi Kurang yang Mendapatkan Makanan Tambahan. Persentase Balita Gizi Kurang yang mendapatkan PMT di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 adalah sebesar 95,79%, hal ini menunjukkan jika Kasus Gizi Balita Gizi Kurang yang mendapatkan PMT sudah melebihi target nasional yaitu sebesar 85%.

Gambar 3.112 Pemberian Makanan Tambahan pada Balita Gizi



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

6. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

Kabupaten Padang Pariaman melakukan PIS-PK dalam peningkatan UHH, yaitu melakukan kunjungan rumah untuk mengetahui permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat. Ada 12 Indikator yang dilihat saat kunjungan rumah.

Faktor penghambat tidak tercapainya target ini adalah : Sosialisasi tentang PIS-PK sudah dilaksanakan, namun masih ada penolakan dari masyarakat terkait kunjungan yang dilakukan Puskesmas sehingga belum semua keluarga terdata. Koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait peningkatan cakupan indikator yang masih rendah (antara lain : Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 40.87%, penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 32.12%, keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 31.97%, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 49.25%, anggota keluarga tidak ada yang merokok 39.42% dan keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 42.40%). Masih ditemukan kondisi hasil pendataan keluarga yang belum masuk ke dalam aplikasi dikarenakan permasalahan teknis yang dihadapi Puskesmas, seperti data tidak bisa tersimpan ataupun data yang sudah disimpan tidak ditemukan.

Hal ini tentu saja mempengaruhi hasil akhir jumlah keluarga sehat sebagai penentu IKS di suatu wilayah. Adapun Solusi dan Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan agar capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di tahun-tahun mendatang dapat sesuai dengan target yang ditetapkan adalah : Meningkatkan cakupan total *coverage* pendataan keluarga sehat melalui pendataan ulang; Melakukan intervensi lanjut sebagai pembinaan kepada KK Pra Sehat dan Tidak Sehat untuk meningkatkan status sehat keluarga; Menyelenggarakan koordinasi lintas program dan lintas sektor.

Gambar 3.113
Kunjungan Rumah untuk Mengetahui Permasalahan Kesehatan yang Ada di Masyarakat



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

7. Meningkatkan Budaya Hidup Sehat

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Padang Pariaman sudah berhasil dimana capaian tahun 2022 adalah sebesar 74% dengan target 74%. Hal ini dikarenakan sudah terbentuknya perilaku hidup sehat di masyarakat kabupaten Padang pariaman dan juga berkat kerja keras petugas dan pemegang program Promkes dalam melaksanakan kegiatan UKBM seperti Posyandu, Desa Siaga Aktif, dan membentuk Poskesri di tiap nagari, dan Implementasi Germas.

Gambar 3.114
Kegiatan Posyandu



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Gambar 3.115
Implementasi Germas



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) Kontribusi RSUD, UPTD, dan Labkesda

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupten Padang Pariaman, UPTD. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dan UPTD. Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK) Padang Pariaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman. Ketiga UPTD ini juga memiliki peranan yang penting dalam peningkatan Usia Harapan Hidup Kabupaten Padang Pariaman.

RSUD berperan dalam peningkatan pelayanan dasar yang sesuai standar. sedangkan Indikator kinerja Labkesda dalam peningkatan capaian UHH adalah meningkatkan kualitas air minum dan air bersih serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, serta UPTD IFK berperan dalam pengelolaan obat, yang meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pemantauan dan evaluasi.

(g) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2022 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 29.506.599.783 sedangkan target biaya untuk semua program adalah Rp 32.731.685.921 . Dengan rumus diatas di peroleh efisiensi biaya adalah 9.85 % . Dibandingkan dengan tahun 2021 diperoleh efisiensi sebesar 27.53 % (anggaran sebesar Rp 42.566.712.477 realisasi sebesar Rp 30.849.495.405). Persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, dan jauh lebih kecil dari tahun 2021 sehingga dapat di asumsikan bahwa pada tahun 2022 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber baya biaya. Namun bila dilihat pada kegiatan dan hasil nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan.

(h) Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program kegiatan yang menunjang adalah Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp 18.620.120.364 realisasi sebesar Rp 16.797.832.878 (90.21%), Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp 13.900.901.130 realisasi Rp 12.518.494.835 (90.6%) dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 120.682.445 realisasi Rp 190.272.070.

(b) Prestasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021

1. Penghargaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Pemenang Harapan III e-Aspirasi Tahun 2021 kategori Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota.

Gambar 3.116

Piagam Penghargaan Harapan III dari Kementerian Kesehatan RI



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Penghargaan Menteri Kesehatan Republik Indonesia di berikan kepada Kabupaten Padang Pariaman atas Keberhasilan Mencapai Target Non-Polio AFP (NPAFP) Rate ≥ 2 per 100.000 Penduduk <15 Tahun Pada Tahun 2021

Gambar 3.117

Piagam Penghargaan NPAFP dari Kementerian Kesehatan RI



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2022 Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.118

Penghargaan dari Bupati Kabupaten Padang Pariaman kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2022



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4. Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara II Lomba Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur Tahun 2022

Gambar 3.119

Penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat Juara II Lomba Penilaian Kelompok Asuhan Mandiri



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

5. Penghargaan Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Predikat AA Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2020 dan tahun 2021

Gambar 3.120**Penghargaan Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Predikat AA SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021**

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

6. Penghargaan Bupati Padang Pariaman sebagai Perangkat Daerah Terinovatif ke III Tahun 2021 dan Tahun 2022

Gambar 3.121

Penghargaan Bupati Padang Pariaman sebagai Daerah Inovatif Ke-3 Tahun 2021 dan Tahun 2022



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(j) Inovasi Inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman 2022

1. SILENTING (Aksi Bersama Lintas Sektor Entaskan Stunting)

SILENTING merupakan serangkaian aksi atau bentuk kegiatan pencegahan dan pengentasan stunting yang dilakukan bersama-sama dengan lintas program dan lintas sektor yang berorientasi intervensi terintegrasi terhadap sasaran data surveilans gizi yaitu ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan Balita. Bentuk aksi ini dengan menjalin kerjasama dan komitmen dengan lintas program dan Lintas Sektor sampai ke tingkat Nagari dan Masyarakat. Program pengentasan stunting ini dilakukan tidak pada sasaran 1000 Hari Pertama Kehidupan, namun juga pada Semua Siklus Kehidupan (intervensi Gizi Anak Sekolah, intervensi gizi remaja, ibu hamil, bayi dan balita). Tahap pertama yang sudah dilakukan adalah bentuk intervensi bertujuan untuk pencegahan kasus stunting melalui percepatan pelayanan adminduk. Nanti akan dilakukan berbagai bentuk intervensi bersama dengan Sektor terkait lainnya.

Tujuan dari kegiatan SILENTING ini adalah salah satu bentuk kerjasama Dinas Kesehatan dalam intervensi sensitif hasil data surveilans gizi melalui Aplikasi e PPGBM Dinas Kesehatan bersama Lintas SEKTOR untuk memberikan percepatan pelayanan adminduk untuk seluruh sasaran dalam surveilans gizi yang teridentifikasi belum mempunyai adminduk dari data surveilans gizi melalui aplikasi E PPGBM, Salah satu upaya untuk mencegah, menemukan dan mengintervensi seluruh kasus yang berkaitan dengan resiko stunting sehingga sasaran yang berisiko dapat secara cepat, tepat dapat pelayanan segera. Bentuk kegiatannya adalah:

- Kerjasama dengan Disdukcapil (Yanpernduk/ Pelayanan Percepatan Adminduk)
 - Pendataan dan entryan data sasaran surveilans gizi melalui aplikasi e ppgbm oleh bides, TPG dan Tim surveilans gizi setiap bulan di posyandu.
 - Identifikasi dan Analisa semua sasaran surveilans gizi yang belum mempunyai NIK./ Adminduk terutama dengan indikator resiko kejadian stunting
 - Koordinasikan data tersebut dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Kesehatan melaporkan data tersebut serta membuat jadwal pelayanan program AJEK Disdukcapil
 - Mensosialisasikan jadwal serta persyaratan semua sasaran data surveilans gizi yang akan dilakukan pelayanan Percepatan Adminduk disampaikan ke yang bersangkutan oleh bidan desa dan petugas serta tim surveilans gizi puskesmas

- Petugas AJEK Disdukcapil datang ke puskesmas sesuai jadwal dan melakukan pelayanan percepatan Adminduk.
- Kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distan KP)
 - Pemberian Makanan Tambahan pada keluarga Rawan Pangan (Stunting dan Gizi Kurang)
 - Pemberian Bantuan Bibit pada keluarga rawan Gizi
 - Pembinaan KWT dalam pemanfaatan pekarangan rumah pada keluarga dan nagari lokus stunting
 - Program KRPL pada nagari Lokus stunting
- Kerjasama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak
 - Pelayanan rekomendasi kepengurusan kepesertaan JKN bagi keluarga stunting yang tidak mampu
 - Pendampingan bagi keluarga ibu hamil dan anak yang teridentifikasi dalam kasus kekerasan Rumah Tangga
 - Bantuan PKH keluarga gakin dengan gizi kurang
- Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - Kampanye Gizi Seimbang dan program Duta Gizi di Sekolah
- Kerjasama dengan Baznas
 - Bantuan biaya perawatan anak dengan kasus gizi buruk/ kurang dengan penyakit
 - Bantuan bedah rumah untuk keluarga yang Layak Huni
- Kerjasama dengan DPMD
 - Pendampingan Nagari pada kegiatan Aksi Cegah Stunting
 - Pemberdayaan Kader Posyandu dan KPM untuk Meningkatkan jumlah nagari peduli gizi melalui pembentukan dan melaksanakan intervensi gizi melalui pos gizi
 - Pembinaan Rumah Desa Sehat Terpadu
- Kerjasama dengan Perikanan
 - Gerakan Gemar Makan Ikan melalui lomba menu berbahan olahan ikan.

Gambar 3.122 Kegiatan Gerakan Gemar Makan Ikan



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. IBU CANTIK (Ikuti Buka Cermati Buku KIA Pilihan Ibu Bijak)

Inovasi Ibu Cantik (Ikuti Buka Cermati Buku KIA Pilihan Ibu Bijak) merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mengoptimalkan penggunaan buku KIA sebagai sumber informasi dan buku catatan tentang kesehatan ibu dan anak. Penggunaan Buku KIA merupakan salah satu strategi pemberdayaan masyarakat untuk memelihara kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas. Buku KIA berisi informasi dan materi penyuluhan tentang gizi dan kesehatan ibu dan anak, kartu ibu hamil, KMS balita dan catatan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Buku KIA berisi informasi penting mengenai kesehatan ibu dan anak yang perlu dilakukan oleh ibu, suami dan keluarganya secara singkat dan padat, termasuk mengenai kewaspadaan keluarga dan masyarakat akan kesakitan dan masalah kegawatdaruratan pada ibu hamil, bayi baru lahir dan balita, sehingga pada akhirnya buku KIA menyumbang penurunan angka kematian bayi dan balita.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta tenaga kesehatan dan masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan Buku KIA sehingga dapat menurunkan AKI, AKB dan Stunting.

Pelaksanaan Ibu Cantik dilakukan oleh tenaga kesehatan atau kader yang telah bersedia untuk menyelenggarakan

pelayanan KIA dan telah dilatih dan dibina untuk melengkapi pengisian buku KIA, menjelaskan isi buku serta informasi terkait dengan kondisi ibu dan bayi pada buku KIA kemudian dilanjutkan pemanfaatannya oleh ibu hamil, suami dan keluarga agar dapat membaca dan memahami informasi penting mengenai kesehatan ibu dan anak yang terdapat dalam buku KIA.

Inovasi ini juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dimana DPMD akan membantu melakukan pembinaan kader kader posyandu. Karena kader ini nantinya memegang peranan penting dalam menggerakkan keaktifan ibu dalam penggunaan buku KIA.

Gambar 3.123

IBU CANTIK (Ikuti Buka Cermati Buku KIA Pilihan Ibu Bijak)



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. GEMOI CANTIK PAPA (GERakan Pemeriksaan Calon Pengantin Cegah Penyakit Infeksi Menular Seksual Padang Pariaman)

Kesehatan seksual dan sistem reproduksi sangat penting dalam penularan penyakit menular seksual seperti HIV, Sifilis dan Hepatitis. Secara umum penyakit tersebut dapat berdampak pada kesakitan dan kematian. Pada ibu dapat menyebabkan infertilitas, hamil ektopik, kanker saluran reproduksi sedangkan pada bayi/anak 90% terjadi selama kehamilan.

Berdasarkan data dari dinkes provinsi sumatera barat tahun 2017, Kabupaten Padang Pariaman peringkat ke 3 terbanyak penemuan penyakit HIV/AIDS sebanyak 104 kasus. Maka untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman melakukan pencegahan dan deteksi dini penyakit HIV/AIDS keseluruhan calon pengantin guna untuk mencegah atau deteksi dini penyakit HIV/AIDS.

Gerakan nikah sehat ini di buat karena di Kabupaten Padang Pariaman pernah terjadi pernikahan tanpa skrining sehingga pasangan pengantin ini tertular penyakit HIV dari suaminya dan anaknya pun ikut tertular. Tujuan Inovasi ini adalah menurunkan angka kejadian kasus HIV/AIDS di Kabupaten Padang Pariaman, menjadikan calon pengantin menjadi Pengantin Sehat, Pengantin Prima. Sehingga manfaat Yang Diperoleh berkurangnya penularan HIV /AIDS di Kabupaten Padang Pariaman.

Inovasi ini juga melibatkan Kemenag Padang Pariaman dimana nantinya Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan lembaga yang berwenang memberikan pelayanan pernikahan kepada masyarakat memiliki kebijakan khusus untuk memberlakukan bagi setiap catin untuk melampirkan bukti/ surat keterangan hasil test kesehatan dari Puskesmas.

Gambar 3.124

GEMOI CANTIK PAPA (GERakan Pemeriksaan Calon Pengantin Cegah Penyakit Infeksi Menular Seksual Padang Pariaman)



Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4. SABERMAS BARU (Satu Hari Bersama Masyarakat Membawa Perubahan)

Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga guna mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal. Penjabaran dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menetapkan kebijakan operasional kesehatan melayani masyarakat dengan kunjungan rumah sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan sehat.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 15 Tahun 2015 tentang Padang Pariaman Sehat sebagai strategi operasional

pembangunan kesehatan dengan melakukan pelayanan kesehatan kunjungan rumah dimana petugas kesehatan bertemu langsung dan melayani keluarga di rumahnya sendiri.

Kebijakan operasional Padang Pariaman sehat tersebut sangat bersinergis dengan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Konsep Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan diwilayahnya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya.

Kunjungan rumah (keluarga) dilakukan secara terjadwal dan rutin, dengan memanfaatkan data dan informasi dari profil kesehatan keluarga dan laporan program melalui aplikasi antara lain aplikasi Smart STBM untuk moitoring akses sanitasi, Aplikasi e PPGBM untuk memantau pertumbuhan balita yang langsung dapat diakses oleh staf kepresidenan.

Dalam menjangkau keluarga, Puskesmas tidak hanya mengandalkan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang telah ada, melainkan juga langsung berkunjung ke Keluarga. Pendekatan keluarga melalui kunjungan rumah tidak berarti mematikan peran UKBM seperti Posyandu, Posbindu PTM, PAUD, Poskestren dan Poskesdes dan atau polindes, justru untuk memperkuat UKBM yang selama ini masih kurang efektif.

Walaupun Dinas Kesehatan sudah berupaya melakukan berbagai inovasi dan telah mengatasi berbagai permasalahan namun permasalahan yang ada di keluarga belum diatasi secara tuntas. Oleh karena itu Puskesmas bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman selaku Pembina wilayah akan lebih mengenali masalah masalah kesehatan dan PHBS yang dihadapi keluarga secara lebih menyeluruh (holistik) melalui kunjungan keluarga dirumah dan Intervensi secara Individu. Anggota keluarga yang perlu mendapatkan pelayanan kesehatan kemudian dapat dimotivasi untuk memanfaatkan UKBM yang ada dan atau pelayanan Puskesmas. Keluarga juga dapat dimotivasi untuk memperbaiki kondisi kesehatan lingkungan dalam mencapai akses sanitasi dan berbagai faktor risiko lain yang selama ini merugikan kesehatannya dengan pendampingan dari kader- kader kesehatan UKBM. Untuk percepatan pencapaian Padang Pariaman Sehat, maka setiap Puskesmas diminta untuk menuntaskan minimal 1 nagari tuntas sebagai nagari sehat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut secara tuntas maka perlu sebuah solusi intervensi secara terintegrasi sehari bersama masyarakat yang disebut **SABERMAS**.

Inovasi ini terintegrasi dengan Disdukcapil (pelayanan administrasi publik), BPJS (konsultasi dan pembuatan BPJS),

DPPKB (Konsultasi, pemasangan alat kontrasepsi), BAZNAS (Bantuan untuk rumah layak huni), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bantuan bibit tanaman), Dinas Perikanan Kabupaten Padang Pariaman (Bantuan bibit ikan) dan juga Kemenag (bantuan Alquran).

(k) Inovasi Puskesmas

Berikut akan ditampilkan beberapa inovasi puskesmas antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.63
Inovasi-Inovasi Pada Puskesmas

No	Puskesmas	Jumlah Inovasi	Nama Inovasi
1	Puskesmas Sungai Geringging	4	1. SEMASA (sehat bersama lansia)
			2. Penggaris suger (penanggulangan gangguan refraksi siswa suger)
			3. TAMAN SABU (Terapkan makan sayur buah)
			4. MALATI BUNTING (malai III koto bebas stunting)
2	Puskesmas Koto Bangko	4	1. CATIN CETAR (Calon pengantin cerdas dan pintar)
			2. JAMILAH (jemput antar bumil bermasalah)
			3. KEJORA (TB Kejar dan obati penderita TB)
			4. PADUZI CETAR Koba (PARA DUTA GIZI CEGAH TANGANI ANEMIA pada REMANTRI KOTO BANGKO)
3	Puskesmas Batu Basa	4	1. Sabu BaBa (Sayur dan Buah Batu Basa)
			2. Pintu Cinta (Pelayanan Terpadu Untuk Calon Pengantin Kita)

			3. Ayam Berkokok (Ayo Mari Bersama Jauhi Rokok)
			4. Gebanting Baba (Gerakan Basmi Stunting Batu Basa)
4	Puskesmas Ampalu	4	1. AYO GEMAYU (Ayo Gemar Makan Buah dan Sayur)
			2. TABU PARE (Duta Anti Bullying pada Anak dan Remaja)
			3. GODA (Gojek Dahak)
			4. PUJA SERI (Posyandu Remaja Sehat dan Berprestasi)
5	Puskesmas Sungai Limau	9	1. TB JEK (Temukan Terduga TB, Bawa Sputumnya, Jangkau, Empati dan Kawal sampai sembuh)
			2. KURSI ANTING (Kuku Bersih Antisipasi Cacingan)
			3. GACEKSPIZI(Gerakan Aksi Cegah Stunting Peduli Gizi)
			4. BAGEHE GAYA CERDIK (Bersama Germas Hidup Sehat Cegah Penyakit Tidak Menular Secara Cerdik)
			5. DECAK KANGEN (DEfaulter traCKing deNGan cEk Kartu imunisasi ANak
			6. PENYU PESEK (PENYUluhan dan PESan SEputar Kesehatan)
			7. CEKI DENG ADU GOKAR (Cegah Kematian Ibu Dengan Ante Natal Care Terpadu Go To Korong)
			8. GERSIMAS (Gerakan Sikat Gigi Massal)
			9. KASIH SEKOLAH (Kampanye Sanitasi Hygiene Sekolah)
6	Puskesmas	4	1. GEMA POSTER (Gerakan Bersama

	Kampung Dalam		Posyandu Terpadu)
			2. Ceting Seni (Cegah Stunting Sedari Dini)
			3. Jum'at Sehat
			4. Makan Sate (Mari Temukan Sasaran TB)
7	Puskesmas Sikucur	4	1. GERJUSS (Gerakan Jum'at Sikucu Sehat)
			2. KUMILDA JEDALAYAR (Kunjungi Ibu Hamil dan Jemput Dampingi Antar Ibu Hamil kerumah)
			3. IBER (Imunisasi Berkunjung)
			4. CADARTING (Catin Sadar Stunting)
8	Puskesmas Ulakan	5	1. RAPET (Ramuan Penyehat Tradisional)
			2.Lasegar (Lansia Sehat dan Bugar)
			3.Cermati Balita (Cegah Kematian Bayi dan Balita)
			4.Catin Cetar (Calon Pengantin Sehat dan Pintar)
			5.Posduren (Posyandu Remaja Keren)
9	Puskesmas Padang Alai	4	1. Anting berlian (anak stunting berikan kepedulian)
			2. Jumsepase (jumat sehat padang alai semangat)
			3. JAS TB (jemput antar sputum tb)
			4. MuLan PUSPA (iMUnisasi berjaLAN PUSkesmas Padang Alai)
10	Puskesmas Pauh Kambar	4	1. Geliga (gerakan peduli keluarga)
			2. Duta tb
			3. Pesbumker (Pos berhenti merokok)
			4. ANJELIN (antar jemput pasien bersalin)

11	Puskesmas Gasan Gadang	4	1. GEPUK API (Gerakan Pencegahan Anemia ada Remaja Putri)
			2. CETAR DO PEBI (Cepat Tanggap Cari d di Obati Penderita TB)
			3. SINI SICEMAS CATIN (Skrining Nikah Sehat Cegah Masalah Calon Pengantin)
			4. TALI SIMPANG LAPAI SISBRO (Digitalisasi Sistem Pengendalian Capaian Berbasis Laporan)
12	Puskesmas Sungai Sariak	5	1. LAYANAN INTEGRASI POSBINDU/LANSIA DENGAN TANAMAN OBAT GARAPAN KELUARGA ATASI PTM (LAPIS MANGGA)
			2. SIBUNTING (Sistem Informasi bumil sadar stunting)
			3. MARAWA (Masyarakat Sadar Kesehatan Jiwa)
			4. Grobak Mas Ari (Grebek Orang Batuk Masyarakat Sungai Sariak)
			5. Aksi Manggabubu (Aktivitas Fisik dan Manifestasi Germas dg mengkonsumsi Buah tiap Hari Rabu)
13	Puskesmas Kayu Tanam	4	1. PILAR SEHAT (program inovasi layanan akupresur dan obat tradisional di ruang lingkup puskesmas menuju masyarakat sehat)
			2. TAPE CEMIL (Tablet Fe Cegah Anemia Ibu Hamil)
			3. PETERpan (pelayanan terpadu puskesmas kayutanam)
			4. RASA Semangka (Rabu Sabtu sehat Bersama Masyarakat Kayutanam)

14	Puskesmas Padang Sago	4	1. GERCEP (Gerakan Cuci Tangan Pakai Sabun Setelah Bepergian)
			2. COKOK UBI (Cari Oleh Kader Orang batuK untuk suspek TB)
			3. TINGGI RAMPING (Taman Gizi Tumah Tangga Pedulu Stunting)
			4. KAMEHI (Kecamatan Memerdulikan Hipertensi)
15	Puskesmas Sikabu	4	1. Tabaco santun (tanggap, bawa, check up dan obati pasien TB sampai tuntas)
			2. Jemari setia (remaja putri sehat tanpa anemia)
			3. Poszi nasi sala (Pos gizi nagari sikabu sikabu, salibutan dan lubuk alung)
			4. Bajamba nagari salibutan(Pembangunan Jamban Nagari salibutan)
16	Puskesmas Lubuk Alung	4	1. SEHARI CERMATI (Sehat hari ini ceria masa tua nanti)
			2. ES TEH ASING (Edukasi dan stimulasi terhadap balita stunting)
			3. SALIODHA (Sahabat Peduli Orang Dengan HIV-AIDS)
			4. LARI CANTIK (Layanan pemeriksaan CO upaya berhenti merokok)
17	Puskesmas Enam Lingsung	4	1. Celengan (Cek langsung ke lapangan)
			2. Gemar ceting (gerakan masyarakat cegah stunting)
			3. Gencar TB (gerakan pencarian penyakit TB)
			4. Tabur Jasa (tabungan bersama jamban

			sehat keluarga)
18	Puskesmas Kampung Guci	4	1. GARDA TUMBANG (Gerakan Sadar Tumbuh Kembang)
			2. NASI PEDAS (Nagari Siap Peduli Anak Stunting)
			3. GENCAR JUMPING BUMILIN (Gerakan Mencari, Menjemput & Mendampingi Ibu Hamil dan Bersalin)
			4. APB (Armada Peduli Batuk) TBC
19	Puskesmas Anduring	5	1. Inovasi POSTER JATI (Posyandu Terintegrasi dengan Pijat Bayi)
			2. Pensil duta (penting asi dari lahir hingga dua tahun)
			3. Kristal (kreasi seimbang makanan tambahan dari pangan lokal)
			4. Rancak (remaja anduring cegah anemia mulai kini)
			5. Maju cantik(mari jualan cemilan aman bernutrisi tidak instan berkalori)
20	Puskesmas Sintuk	4	1. POSYANDU remaja th 2017
			2. What's Up BUNDA th 2020
			3. Iso Mama (Isolasi mandiri dirumah)
			4. PeDe SiS th 2021
21	Puskesmas Ketaping	3	1. PK BAGAN TUMBANG (Pendampingan kader pada balita dengan gangguan tumbuh kembang)
			2. ARISAN SOSIALITA (Asuhan mandiri akupresur dan ramuan toga Solusi sehat alami untuk kita)
			3. Pendekar Ceria (pemberdayaan kader dengan kemitraan untuk ciptakan diri dan

			keluarga hidup sehat)
22	Puskesmas Limau Purut	4	1. JEMARIBUMIL (Jemput Antar Ibu Hamil)
			2. GOSIP Bumil (Group Sistem Informasi Ibu Hamil),
			3. SAKOBUDU (Satu Korong Satu Posbindu)
			4. Pasar PEKAN (Pasar Pemeriksaan Kesehatan)
23	Puskesmas Patamuan	4	1.Pensil...Pendamping Setia ibu Hamil
			2.Secereg emas...SEnyum CERia Generasi EMAS
			3.Berseri...BERantas Stunting bErsama nagaRI
			4. SERUM (Seribu rupiah untuk masyarakat)
24	Puskesmas Pasar Usang	4	1. Puspa Centing Derunggi (Puskesmas Pasar Usang Cegah Stunting dengan Daun Marunggi)
			2. Puspa Bakaba Dara (Puskesmas Pasar Usang Bakaba di Udara)
			3. Puspa Jevala (Puskesmas Pasar Usang Jemput IVA ke Lapangan)
			4. Puspa Posbindu PTM Badoncek (Puskesmas Pasar Usang Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular dengan Sistem Badoncek)
25	Puskesmas Sicincin	4	1. Gelas si abah (Gerakan lansia sehat inovatif aktif dan Bahagia)
			2. Mantra cinta (Minuman tradisional sicincin sehata Bahagia)



			3. Garpu Kesga (Gerakan peduli kesehatan keluarga sicincin kepala hilang)
			4. Jempol si Dia (jemput dan kontrol penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus)
	TOTAL	107	

Sumber : Dinkes / RSUD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 16**Terkendalinya Laju
Pertumbuhan Penduduk**

Sasaran Strategis “Laju Pertumbuhan Penduduk” merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Adapun Indikator Kinerja Utama dari sasaran strategis ini adalah “Laju Pertumbuhan Penduduk”. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan banyak menimbulkan dampak negatif. Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah telah berupaya untuk menekan besarnya angka laju pertumbuhan penduduk tersebut namun dirasa masih belum maksimal, diantaranya adalah mensosialisasikan dua anak lebih baik, pembagian alat kontrasepsi gratis, serta memberikan penyuluhan tentang penggunaan KB.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) adalah Angka yang menunjukkan presentase penambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai presentase dari penduduk. Guna dari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dalam 2 periode waktu. Pertumbuhan Penduduk juga adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Adapun capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.64
Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2022			Interpretasi
	Target	Realisasi	%	
Laju Pertumbuhan Penduduk	3,39	0,72	178,76	Sangat berhasil

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 yaitu 0,72 sedangkan target yang ditetapkan adalah 3,39 dengan kategori **“Sangat Berhasil”**, artinya Laju

Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 bisa diturunkan dari target yang telah ditetapkan.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.65
Perbandingan Target dan Realisasi LPP
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Interpretasi
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
LPP	%	3,50	0,74	178,85	3,39	0,72	178,76	Sangat Berhasil

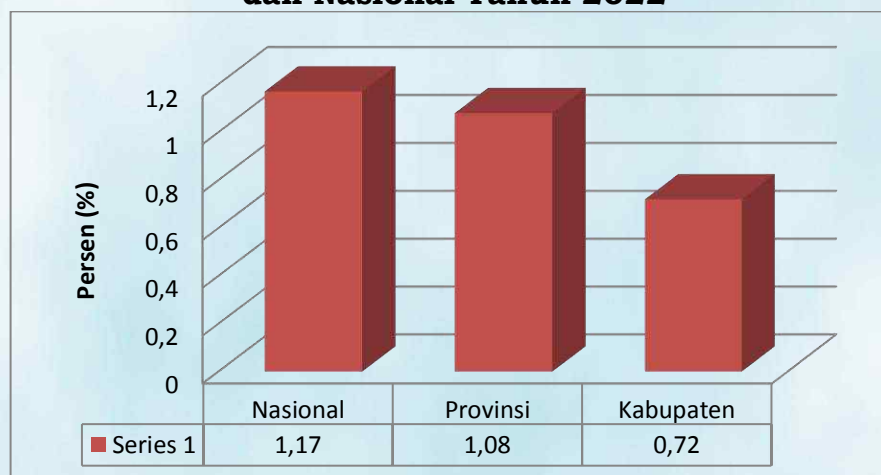
Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2022 mengalami penurunan di bandingkan dengan capaian Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2021 sebesar 0,02 yaitu 0,74 di tahun 2021 menjadi 0,72 di tahun 2022.

(c) Perbandingan Realisasi Nasional, Provinsi, Kabupaten Tahun 2022

Berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi berdasarkan realisasi nasional dan realisasi provinsi tahun 2022 :

Grafik 3.16
Perbandingan Realisasi LPP Kabupaten, Provinsi, dan Nasional Tahun 2022



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Capaian Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Padang Pariaman masuk kategori “ Sangat Berhasil”, dimana realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Nasional tahun 2022 adalah 1,17, dan realisasi Provinsi Sumatera Barat berada pada angka 1,08%, sementara realisasi Kabupaten Padang Pariaman sebesar 0,72 dengan capaian 178,76%.

(d) Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

Keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk bukan hanya tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana namun merupakan tanggung jawab bersama antara Unsur Pemerintah, Perangkat Daerah serta masyarakat sehingga untuk dapat mencapai targetnya harus ada kerjasama yang baik antara semua unsur tersebut.

Laju Pertumbuhan Penduduk bisa diturunkan salah satunya dengan upaya pengendalian penduduk, yaitu :

1. Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana (KB)

Meningkatkan kepesertaan Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Program Keluarga Berencana (KB dengan tujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera serta mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), dengan menurunkan angka kelahiran. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali mengakibatkan kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta menimbulkan banyak kerusakan dan kesenjangan dalam penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepesertaan Ber-KB diantaranya melalui peningkatan akses layanan kontrasepsi, termasuk jaminan ketersediaan alat kontrasepsi dan perluasan akses/jangkauan pelayanan KB (melalui pergerakan Penyuluh Keluarga Berencana/PKB dan pelayanan KB bergerak), serta meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi dan pengetahuan tentang kontrasepsi modern.

Untuk mencapai peningkatan kepesertaan KB Aktif didukung oleh program : Pembinaan Keluarga Berencana yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Empat (4) Kegiatan, yang dimaksud adalah :

- Pelaksanaan advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

- Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB).
- Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

Pada tahun 2022 presentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebesar 17,99 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 Sebesar 17,90%, dimana Jumlah penggunaan MKJP Pada tahun 2022 sebanyak 10.860. Kemudian Presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi pada tahun 2022 dapat mencapai target sebesar 34,79%.

Keberhasilan Pencapaian Contraceptive Prevalence Rate (CPR) karena adanya dukungan anggaran BOKB, dukungan sumber daya manusia yang kompeten (petugas lapangan KB, kader KB), ketersediaan alat-alat kontrasepsi di faskes dan adanya dukungan dari lintas sektoral seperti kegiatan GERAK IBI KB KES, TNI KB KES, PKK KB KES dan lokakarya mini di kampung KB. Keberhasilan ini juga melibatkan dinas dan instansi terkait seperti :

- (a) DINKES dan RSUD, terkait dengan pemberian pelayanan KB, penyediaan tenaga pelaksana KB, penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan KB ;

Gambar 3.125

Pemberian Pelayanan KB, Penyediaan Tenaga Pelaksana KB, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan KB



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- (b) TNI (Kodim 0308), terkait dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya untuk melaksanakan KB terutama metoda operasi pria (MOP);

Gambar 3.126
Sosialisasi pentingnya untuk melaksanakan KB terutama Metoda Operasi Pria (MOP)



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- (c) Organisasi Profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB;

Gambar 3.127
Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam bentuk keterlibatan memberikan pelayanan alat kontrasepsi kepada akseptor KB



- (d) Tim penggerak PKK Kabupaten, tim penggerak PKK Kecamatan dan Nagari, serta kader KB dalam bentuk menggerakkan masyarakat untuk aktif ber-KB.

Gambar 3.128
Tim penggerak PKK Kabupaten Menggerakkan Masyarakat
untuk Aktif Ber-Kb



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Menurunkan Angka Melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun

Dalam rangka menurunkan angka melahirkan di usia remaja (15-19 Tahun) Age Specific Fertility Rate (ASFR) yang merupakan salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman untuk menunjang terkendalinya laju pertumbuhan penduduk upaya yang dilakukan adalah pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah, pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekali pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Pemberian informasi yang disesuaikan dengan usia dan kesiapan anak/remaja dapat meningkatkan pemahaman mereka atas sistem, proses, fungsi alat reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksinya, serta meningkatkan pemahaman atas konsep perencanaan kehidupan berkeluarga.

Disamping itu jumlah umur wanita 15-19 Tahun yang melahirkan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan dari 114 menjadi 48 orang, kemudian dengan meningkatnya pendewasaan usia perkawinan dimana pada tahun 2022 rata-rata usia wanita kawin pertama yaitu 25,496 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yaitu 25,44. Untuk mencapai penurunan angka melahirkan usia remaja (15-19

Tahun) didukung oleh program : Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan : Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ; dan 7 Sub Kegiatan.

(e) Dukungan Dari Dinas Terkait

Keberhasilan ini juga didukung oleh kontribusi dinas dan instansi terkait seperti :

- (a) DISDUKCAPIL, terkait ketersediaan data penduduk menurut kelompok umur ;
- (b) Seluruh Kecamatan dan Nagari, terkait koordinasi pelaksanaan kegiatan dilapangan ; tambahkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan dan nagari dalam upaya menurunkan angka melahirkan remaja
- (c) KEMENAG, terkait dengan jumlah data wanita perkawinan pertama. tambahkan bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh kemenag dalam upaya menurunkan angka melahirkan remaja

(f) Kegiatan-Kegiatan Pembinaan

Berikut ini merupakan kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap remaja :

- a. Pemilihan Genre Kabupaten Padang Pariaman

Gambar 3.129

Pemilihan Genre Kabupaten Padang Pariaman



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Duta GenRe adalah ajang yang bergerak dibawah naungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Kegiatan ini mempertemukan remaja yang tergabung dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan memilih figur remaja berusia 16-22 tahun melalui proses seleksi yang ketat. Nantinya, Duta GenRe yang terpilih akan menjadi role model dalam meningkatkan pemahaman mengenai kesehatan

remaja, kependudukan, delapan substansi generasi berencana, dan lain sebagainya.

- b. Pembinaan Terhadap Kelompok Bina Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, dan Bina Keluarga Lansia

Gambar 3.130
Bina Keluarga Remaja



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(g) Penurunan Rata-rata Jumlah anak yang dilahirkan /Total Fertility Rate (TFR)

Angka kelahiran total masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang. TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. TFR merupakan gambaran mengenai rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan dari usia 15 sampai 49 tahun.

Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah upaya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk. TFR merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan program pengendalian penduduk dan program KB. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan TFR adalah Meningkatnya CPR (Contraceptive Prevalence Rate) dan menurunnya

angka melahirkan diusia remaja 15-19 Tahun. Pada Tahun 2022 TFR mencapai 1,93% Lebih rendah dibandingkan target sebesar 2,34%. Salah satu indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman adalah Persentase Total Fertility Rate (TFR). Untuk mencapai target dari indikator tersebut telah dilakukan selama tahun 2022.

Keberhasilan TFR dapat dicapai yaitu dengan ketersediaan alat-alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan, adanya peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), adanya dukungan Petugas Lapangan KB(PLKB), meningkatnya akses layanan kontrasepsi, adanya pembinaan terhadap anak-anak remaja melalui pertemuan kelompok PIK-R baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat atau luar sekolah. Pembinaan remaja juga dilakukan melalui pemilihan duta genre, dimana anak-anak remaja di bekal tentang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, penyakit-penyakit seksual seperti HIV-Aids, narkoba dan lain-lain. Disamping pembinaan pada kelompok remaja juga dilakukan pembinaan terhadap kelompok keluarga yang mempunyai remaja di korong-korong yang ada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman, serta dengan peningkatan pembinaan pada kelompok Bina Keluarga, bina keluarga remaja dan bina keluarga lansia.

Untuk mencapai penurunan Total Fertility Rate (TFR) didukung oleh 3 program yaitu :

(1) Program pengendalian penduduk

Terdiri dari 2 kegiatan yaitu : (a) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, (b) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.

(2) Program pembinaan keluarga berencana, Terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

(a) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) Pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

(b) Pendayagunaan tenaga penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB atau PLKB).

(c) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB didaerah Kabupaten/Kota.

(d) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.

(3) Program Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera, yang terdiri dari 1 Kegiatan yaitu Kegiatan :

Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

(h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi biaya} = 100 \% - \frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100 \%$$

Capaian kinerja yang dapat diraih sebesar 470,83% dan realisasi keuangan sebesar 67,76%. Total aggaran dari program penunjang indikator sebesar Rp. 6.651.315.000,-dengan realisasi sebesar Rp. 4.506.853.168,.,Dari penyajian tersebut pencapaian kinerja sudah maksimal jika dibanding dengan capaian keuangannya. Ini artinya adanya efisiensi pada penggunaan anggaran.

(i) Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja. Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian Laju Pertumbuhan Penduduk yaitu program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana,dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera.

Untuk mewujudkan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, program pembinaan keluarga berencana,dan program dan program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera. Dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.651.315.000,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 4.506.863.168,- atau sekitar 67.76% , terdapat efisiensi dari anggaran yang sudah di alokasikan untuk kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman sebesar 32.24%.

Perbandingan efisiensi anggaran program tahun 2021 dan tahun 2022 dapat dilihat pada data dibawah ini :

- (a) Program pengendalian penduduk pada tahun 2021, dengan pagu anggaran Rp. 601.508.000 dan realisasinya sebesar Rp. 573.664.500 dengan persentase 95,37%. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran program ini sebesar Rp. 256.161.000 dan realisasinya sebesar Rp. 205.115.731 dengan persentase 80,1 %.
- (b) Program pembinaan keluarga berencana Tahun 2021, dengan pagu anggaran Rp. 4.000.080.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.280.498.708 dengan persentase 82,01%. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran program ini sebesar Rp. 4.430.574.000 dan realisasinya sebesar Rp. 3.586.286.589 dengan persentase 77,4 %.

(c) Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Tahun 2021, dengan pagu anggaran Rp. 1.344.465.000 dan realisasinya sebesar Rp. 1.197.976.870 dengan persentase 89,1%. Sedangkan pada tahun 2022 anggaran program ini sebesar Rp. 1.964.580.000 dan realisasinya sebesar Rp. 715.460.848 dengan persentase 41%.

(j) **Prestasi dan Penghargaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022**

1) Penghargaan dari BKKBN Pusat Favorit Duta GenRe Indonesia Putera 2022

Gambar 3.131
Penghargaan dari BKKBN Pusat Favorit Duta GenRe Indonesia Putera 2022



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2) Penghargaan Ayah Bunda GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Gambar 3.132
Penghargaan Ayah Bunda GenRe terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- 3) Penghargaan Kabupaten terbaik 1 pengelolaan UPPKA Tingkat Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.133

Penghargaan Kabupaten terbaik 1 pengelolaan UPPKA Tingkat Provinsi Sumatera Barat



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

- 4) Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Runner Up 2 Duta GenRe Putra Sumatera Barat Tahun 2022

Gambar 3.134

Penghargaan dari BKKBN Perwakilan Sumatera Barat Runner Up 2 Duta GenRe Putra Sumatera Barat Tahun 2022



Sumber : DPPKB Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(k) Inovasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Pariaman 2022

- **PAPA PATEN BANA**
Adalah Padang Pariaman pasangan penganten berencana.
- **SERGAB KAKAB PLUS**
Adalah Serentak Menggarap Kampung Kb Melalui Keterlibatan Masyarakat dan Lintas Sektor Terkait Melaksanakan Pelayanan Lansung Di Seluruh Wilayah Kampung KB.
- **BERE BERE KUAT**
Adalah Bengkel Remaja Bereputasi Pembinaan Pik Remaja Diseluruh Sekolah Melalui Kesiapan Forum Genre Untuk Diterjunkan Kesekolah Sekolah Untuk Kompetensi Dan Pencegahan Hiv-Aids Dan Seks Bebas Dan Kerjasama Dengan UKS, PKPR.
- **GEOLS**
Genre Online Shop.
- **GEMA SEGANTING**
Adalah Gerakan Makan Sehat Cegah Anemia Dan Stunting.
- **NAGA GESIT**
Adalah Nagari Gencar mengatasi Stunting.
- **ABG Gardenpreuner**
Adalah Inovasi dari Ayah Bunda Genre Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka memotivasi remaja Padang Pariaman untuk berjiwa enterpreuner dengan cara memanfaatkan lahan pekarangandirumah masing-masing dengan tanaman yang bergizi sebagai upaya pencegahan stunting.
- **ABG Rafting**
Adalah Inovasi dari Ayah Bunda GenRe Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka mengajak dan memotivasi remaja padang pariaman untuk mencintai alam dan berinteraksi sosial dengan sesame sehingga mencegah kasus Triad KRR.
- **New Kopi Darat**
Adalah Komprehensif Online Penyajian Inovasi Data Akurat.

SASARAN STRATEGIS 17**Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum**

Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”.

Air minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Air minum yang layak untuk diminum tentu melalui berbagai uji coba dan telah memenuhi syarat untuk langsung diminum. Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari merupakan salah satu indikator kinerja utama yang dipangku oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.66**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2022			Interprestasi
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	90	72,05	80,05	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dilihat dari capaian diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” mendapatkan realisasi 72,05% dari target 90%. Persentase capaian yang didapatkan adalah 80,05% dengan kategori berhasil.

(b) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.67
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022			Interprestasi
			Target	Realisasi	%	
Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	%	72,05	90	72,05	80,05	Berhasil

Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dengan Indikator Kinerja Utama yakni Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari, mendapatkan capaian persentase sebesar 80,05 % pada tahun 2022. Persentase tersebut sudah termasuk kedalam kategori “Berhasil” untuk pencapaian indikator kinerja.
2. Pada tahun 2021 dengan target 88,00 mendapatkan realisasi indikator kinerja sebesar 72,05 %. Capaian persentase pada tahun 2021 yang didapat melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 81,87%.

(c) Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Solusi Pemecahan Masalah

Dalam mencapai target Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”, terdapat beberapa hambatan yaitu sebagai berikut :

- Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan SPAM yang baik ;
- Terbatasnya kapasitas kelembagaan pembangunan di daerah untuk melanjutkan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur air minum.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari”, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk pemecahan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan SPAM ditingkat masyarakat ;
- Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;

- Mendorong perubahan perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya SPAM.

Selain melakukan upaya-upaya pemecahan masalah, terdapat beberapa faktor pendorong keberhasilan pencapaian realisasi indikator kinerja yaitu :

- Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM ;
- Penguatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara berkelanjutan ;
- Indikator Kinerja Utama “Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari” ini didukung oleh Program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan beberapa kegiatan yakni : Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan. Kegiatan tersebut mampu mewujudkan realisasi yang nyata dalam pencapaian Indikator Kinerja.

(d) Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021, Program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum” memiliki total anggaran sebesar Rp. 3.809.762.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.125.022.466. Realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2021 ini adalah sebanyak 600 Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan berhasil dibuat.

Program “Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum” pada tahun 2022 memiliki total anggaran sebesar Rp. 5.316.476.470 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.275.422.280. Realisasi kinerja yang tercapai pada tahun 2022 ini adalah sebanyak 800 Sambungan Rumah (SR) jaringan perpipaan berhasil dibuat yang tersebar pada 21 lokasi di Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini DPUPR berkoordinasi dengan PDAM Kabupaten Padang Pariaman dalam usulan penerima Sambungan Rumah (SR) yaitu dari data PDAM dan Juga data dari PAMSIMAS. Setelah pekerjaan sambungan rumah selesai pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada PDAM dan untuk PAMSIMAS diserahkan ke Nagari.

(e) Dokumentasi Kegiatan

Berikut merupakan dokumentasi kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan yang mana pada tahun 2022 ini tersebar pada 21 lokasi di Kabupaten Padang Pariaman dengan total 800 Sambungan Rumah (SR) SPAM Jaringan Perpipaan.

Gambar 3.135
Pembangunan Jaringan SPAM Jaringan Perpipaan Kawasan Pedesaan



Sumber : DPUPR Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 18

Penguatan Layanan Kebencanaan

Sasaran Strategis Penguatan Layanan Kebencanaan merupakan turunan dari Misi ke-6 Kabupaten Padang Pariaman yakni “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar Dengan Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Kearifan Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat”. Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis ini adalah “Nagari Tangguh Bencana”. Nagari Tangguh Bencana yaitu nagari yang sudah mempunyai perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana yang merupakan Indikator Kinerja Utama dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Padang Pariaman. Nagari tangguh bencana ini mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai Rencana Pengurangan Resiko Bencana (RPB)
- Mempunyai Peta Rawan Bencana
- Sudah memiliki Kelompok Siaga Bencana (KSB)
- Sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU BPBD Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja (IKU) BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam evaluasi tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BPBD Tahun 2022 dengan realisasinya. Uraian Capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.68
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja IKU
Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interprestasi
Nagari Tangguh Bencana	Nagari	16 Nagari	16 Nagari	100%	Berhasil

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sasaran strategis penguatan layanan kebencanaan dengan indikator sasaran startegis tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai BPBD Kabupaten Padang Pariaman setiap tahunnya, yaitu Jumlah Nagari Tangguh Bencana. Pada tahun 2022 target jumlah nagari Tangguh bencana yang akan dibentuk adalah 16 nagari yang merupakan jumlah akumulatif dari seluruh nagari tangguh bencana yang ada di kabupaten Padang Pariaman dan pada tahun 2022 telah dibentuk 1 nagari tangguh bencana dengan capaian kinerja 100% serta *interpretasi* berhasil.

Adapun formulasi pengukuran dari indikator kinerja utama ini adalah sebagai berikut :

Formulasi Pengukuran : Jumlah Nagari Tangguh Bencana

(b) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perbandingan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 2021 dan 2022 dijabarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.69
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nagari Tangguh Bencana Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2021 dan 2022

Indikator Sasaran	Realisasi 2022		%	Interprestasi
	2021	Target Realisasi		
Nagari Tangguh Bencana	15 Nagari	16 Nagari	100%	Berhasil

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dilihat dari tabel capaian diatas, dimana pada tahun 2021 dengan target 15 Nagari tercapai dan juga pada tahun 2022 dengan target 16 Nagari juga tercapai. Hal tersebut menandakan bahwa indikator kinerja terealisasi dengan baik dengan capaian 100%. Pencapaian tersebut juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 3.17

Capaian Realisasi Indikator Kinera Utama Nagari Tangguh Bencana



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tahun 2021 terdapat 15 nagari tangguh bencana di seluruh Kabupaten Padang Pariaman yang telah dibentuk dan pada tahun 2022 telah terdapat 16 nagari tangguh bencana di seluruh Kabupaten Padang Pariaman dari target rencana jumlah Nagari Tangguh Bencana di Kabuaten Padang Pariaman pada tahun 2022 sejumlah 16 Nagari.

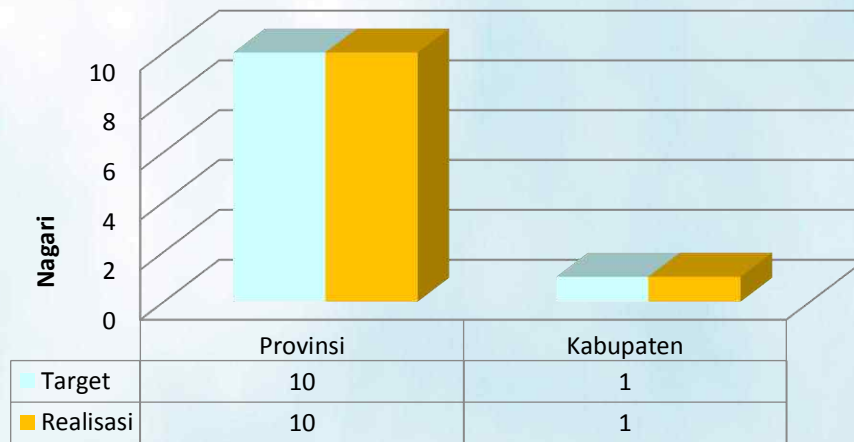
Dalam Capaian Realisasinya pada tahun 2022 BPBD Kabupaten Padang Pariaman telah berhasil membentuk 1 Nagari tangguh bencana yaitu pada Nagari Campago Selatan sehingga dengan relisasi tersebut jumlah nagari tangguh bencana pada Kabupaten Padang Pariaman terdapat sebanyak berjumlah 16 Nagari, sehingga persentase keberhasilannya mencapai 100%. Satu Nagari yang telah

terbentuk adalah nagari yang berada di pesisir pantai Kabupaten Padang Pariaman yang rawan ancaman bencana gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung dan abrasi pantai. yaitu Nagari Campago Selatan. Hal ini bisa terwujud berkat kerjasama antara BPBD Kabupaten Padang Pariaman, TNI, POLRI, dan OPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan P3A, Bapelitbangda, Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari) serta masyarakat di Nagari Campago Selatan.

(c) Perbandingan Realisasi Kabupaten dengan Target dan Realisasi Pada Provinsi Sumatera Barat

Adapun perbandingan realisasi Provinsi dengan Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik 3.18
Perbandingan Realisasi Kinerja Provinsi dan Kabupaten
Tahun 2022



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra BPBD Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2024 ditargetkan setiap tahunnya akan di bentuk 10 Nagari Tangguh Bencana. Sedangkan pada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman dan Renstra BPBD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 ditargetkan akan terbentuk 1 Nagari sehingga secara keseluruhan terdapat 16 nagari tangguh bencana.

Realisasi BPBD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah berhasil membentuk sebanyak 10 Nagari Tangguh Bencana dengan interpretasi berhasil, sedangkan pada Kabupaten Padang Pariaman Telah berhasil terbentuk 1 Nagari Tangguh Bencana pada tahun

- d. Rapat koordinasi dengan melibatkan instansi dan OPD terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial dan P3A, Bapelitbangda, Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari), TNI, POLRI, OPD terkait serta masyarakat di Nagari Campago Selatan.

Gambar 3.137**Proses Pembentukan Nagari Tangguh Bencana**

(1) Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Kelompok Siaga Bencana (KSB)



(2) Dasar Manajemen Bencana dan Identifikasi Hazard Vulnerable Capacity Assesment (HVCA)



(3) Penyusunan Kajian Resiko Bencana



(4) Penyusunan Rencana Pengurangan Bencana (RPB) Nagari



(5) Penyusunan Rencana Kontigensi (Renkon) Nagari



(6) Penyusunan Peta dan Rencana Evakuasi



(7) Penilaian ketangguhan nagari campago selatan



(Foto : Penilaian Ketangguhan Nagari)

(8) Lokakarya Hasil Kegiatan Destana



(Foto : Lokakarya Hasil Kegiatan Destana)

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Daftar Nama Nagari Tangguh Bencana

Dengan berhasilnya pembentukan desa tangguh bencana di Nagari Campago selatan ini, maka BPBD Padang Pariaman dari tahun 2015-2022 sudah berhasil membentuk 16 Nagari Tangguh Bencana yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. 16 Nagari tersebut adalah :

Tabel 3.70
Daftar Nagari Tangguh Bencana yang Ada di Kabupaten Padang Pariaman

NO	TAHUN	NAGARI TANGGUH BENCANA	ANGGARAN
1.	2015	1. Nagari Ketaping Kec. Batang Anai 2. Nagari Kuranji Hilir Kec. Sei Limau	BPBD Propinsi Sumbar

2.	2016	-	
3.	2017	-	
4.	2018	-	
5.	2019	1. Nagari Anduring Kec. 2x11 Kayu Tanam 2. Nagari Campago Kec V Koto Kampung Dalam	BPBD Propinsi Sumbar
	2020	1. Nagari Gasan Gadang Kec. Batang Gasan 2. Nagari Malai V Suku Kec. Batang Gasan 3. Nagari Guguak Kuranji Hilir Kec. Sei Limau	BNPB
		4. Magari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kec. Sei Limau 5. Nagari Pilubang Kec. Sei Limau 6. Nagari Kurai Taji Kec. Nan Sabaris 7. Nagari Sunua Barat Kec. Nan Sabaris 8. Nagari Ulakan Kec. Ulakan 9. Nagari Tapakis Kec. Ulakan Tapakis 10. Nagari Manggopoh Palak Gadang Ulakan Kec. Ulakan tapakis	
6.	2021	1. Nagari Seulayat Ulakan Kec. Ulakan Tapakis	BPBD Kab. Padang Pariaman
7.	2022	1. Nagari Campago Selatan	BPBD Kab. Padang Pariaman

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) **Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Serta Solusi Pencapaian IKU**

Upaya pembentukan nagari tangguh bencana diwujudkan melalui Program Penanggulangan Bencana dengan Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja BPBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan anggaran yang disediakan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022

- b. Adanya dukungan dari BMKG Provinsi Sumatera Barat
- c. Adanya dukungan dari fasilitator pembentukan nagari tangguh bencana
- d. Adanya dukungan OPD terkait, antara lain :
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Mitigasi structural/fisik, misalnya pembangunan jalan, normalisasi sungai.
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : Penganggaran dana desa terkait kebencanaan.
 - Dinas Kesehatan : Peningkatan kapasitas tentang kesehatan.
 - Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Pemukiman Perumahan dan Pertanahan : Mitigasi Non Struktural yaitu penanaman pohon pelindung.
 - Dinas Pendidikan : Peningkatan kapasitas terkait pendidikan mengenai kebencanaan.
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan : Mitigasi Non Struktural yaitu penanaman bibit tanaman dan pohon pelindung.
 - Dinas Sosial dan P3A
 - Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga : Pengembangan wisata di daerah rawan bencana, dan pembinaan kelompok darma wisata.
 - Bapelitbangda : Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan
 - Pemerintah Nagari dan Lembaga Nagari : Tempat pelaksanaan
 - TNI, POLRI : Evakuasi bencana dan keamanan
- e. Adanya dukungan dari nagari dan kecamatan wilayah V Koto Kampung Dalam serta adanya dukungan dari masyarakat di Nagari Campago Selatan untuk kesadaran akan tingginya ancaman bencana sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana.

Meskipun telah tercapainya realisasi sesuai dengan target yang diinginkan, namun dalam pelaksanaannya pembentukan nagari tangguh bencana tahun 2022 belum dapat dilaksanakan secara maksimal, dikarenakan terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya penganggaran dalam pembentukan nagari tangguh bencana sehingga belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
2. Kemampuan SDM pada internal BPBD masih kurang dalam mensosialisasikan pembentukan nagari tangguh bencana.

Adapun beberapa solusi yang dilakukan untuk mengurangi hambatan dimaksud adalah :

1. Memaksimalkan keterbatasan anggaran yang tersedia dengan penghematan anggaran, salah satu caranya dengan menghilangkan biaya transportasi peserta
2. Peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM dalam penyampaian informasi terkait pembentukan nagari tangguh bencana.

(g) Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program, kegiatan serta sub kegiatan penunjang sasaran strategis BPBD Kabupaten Padang Pariaman yang mendukung terbentuknya nagari tangguh bencana pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.71
Analisis Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Program	
Penanggulangan Bencana	
	Kegiatan
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana
	Sub Kegiatan
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
	Indikator
	Jumlah Nagari Tangguh Bencana

Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pada tahun 2022, Untuk Kegiatan yang mendukung Pembentukan Nagari/Desa Tangguh Bencana telah di targetkan dalam Renstra 2021-2026, yang merupakan indikator kunci utaman (IKU) BPBD Kab. Padang Pariaman dengan target capaian sebanyak 1 Nagari Tangguh Bencana yang terbentuk.

Adapun faktor keberhasilan pencapaian kinerja ini jika dikaitkan dengan program dan kegiatan yang mendukung realisasi kinerja adalah dikarena tersedianya sumber dana atau anggaran yang telah dianggarkan dari APBD Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp. 69.396.000 untuk pembentukan nagari tangguh bencana pada sub kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.

(h) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran pembentukan nagari tangguh bencana berasal dari belanja operasional dari Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota dengan annggaran sebanyak Rp. 69.396.000.

Penggunaan anggaran untuk pembentukan 1 nagari tangguh bencana pada Nagari Seuayat Ulakan pada tahun 2021 sebanyak Rp. 105.851.000,- sedangkan pada tahun 2022 anggaran yang dibutuhkan untuk pembentukan nagari tangguh bencana pada Nagari Campago selatan dibutuhkan anggaran sebanyak Rp. 69.396.000,- sehingga efisiensi penggunaan anggran APBD dalam pembentukan nagari tangguh bencana pada tahun 2022 dapat dihitung sebagai berikut :

Total Efisien APBD = Rp. 105.851.000 - Rp. 69.396.000 =Rp.36.455.000

Dari hasil pengurangan tersebut dapat diketahui bahwa BPBD Kabupaten Padang Pariaman Telah Berhasil Melakukan Efisiensi APBD untuk pembentukan Nagari Tangguh Bencana yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) di BPBD sebanyak Rp.36.455.000. Efisiensi ini bisa dilakukan karena pada pembentukan Nagari tangguh bencana tahun 2022 BPBD Kabupaten Padang Pariaman mampu memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di internal BPBD Kab. Padang Pariaman sebagai narasumber dalam penyampaian materi pembentukan nagari tangguh bencana. Jika dibandingkan dengan tahun lalu pada pembentukan nagari tangguh bencana menggunakan narasumber dari pihak ketiga (KOGAMI) dan dapat dilakukan penghematan anggaran dengan menghilangkan biaya transportasi peserta.

(i) Inovasi di Kabupaten Padang Pariaman

Pada tahun 2022 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BPBD Kabupaten Padang Pariaman memiliki tujuh buah inovasi sebagai berikut :

(a) NAN SIGAB

Program Nagari Siaga dan Tanggap Bencana (NAN SIGAB) adalah pembentukan sebuah Nagari yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Gambar 1.138 Pembentukan Desa Tangguh Bencana



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(b) SI SIGAB

Program Srikandi Siaga Tanggap Bencana ini melihat potensi perempuan yang memiliki naluri kuat untuk selalu melindungi keluarganya serta aktif dalam kelompok sosial sehingga perempuan dapat menjadi penggerak kesiapsiagaan bencana di dalam keluarga.

Gambar 3.139 Kegiatan Sosialisasi SI SIGAB



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(c) LENCANA

Program Analisa Rencana Pasca Bencana (LENCANA) adalah suatu rangkaian kegiatan meliputi analisa dan rencana untuk penanganan pasca bencana pada wilayah terdampak melalui upaya sosialisasi atau pembekalan kepada lembaga, perangkat daerah serta pemangku kepentingan lainnya baik di tingkat nagari, kecamatan,

maupun kabupaten yang ditindaklanjuti dengan pengaktifan tenaga terlatih.

Gambar 3.140
Kegiatan Program LENCANA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(d) SIAP AMAN

Program Sistem Aplikasi Perumahan Untuk Manajemen Bencana (SIAP AMAN) adalah sebuah inovasi yang melakukan penghimpunan kepada kondisi rumah atau bangunan yang berada di Kawasan yang rawan bencana dan disimpan dalam sebuah database aplikasi.

Gambar 3.141
Aplikasi SIAP AMAN



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) PUSPA SADAR BANA

Inovasi PUSPA SADAR BANA (PUSAT PELAPORAN SIAGA DARURAT BENCANA) merupakan layanan pengaduan kebencanaan berbasis Call Center 112 dan layanan pengaduan melalui media sosial Whats App.

Gambar 3.142
Pusat Pelaporan Siaga Darurat Bencana



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) **SIMUNA V2**

Inovasi SIMUNA V2 (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BENCANA) Merupakan layanan informasi kebencanaan berbasis Android dan dapat di download melalui Paly Store.

Gambar 3.143
Aplikasi SIMUNA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(g) **PUSDAKA**

Inovasi PUSDAKA (PUSAT DATA KEJADIAN BENCANA) Merupakan layanan informasi kejadian kebencanaan berbasis Website.

Gambar 3.144
Website PUSDAKA



Sumber : BPBD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

SASARAN STRATEGIS 19**Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman**

Sasaran Strategis “Peningkatan Nilai Investasi di Padang Pariaman” merupakan Misi ke-7 pada RPJMD Kabupaten Padang 2021-2026 yaitu: Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja. Adapun Indikator Kinerja Utama pada sasaran ini adalah Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA).

(a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Capaian indikator kinerja utama “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.72
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

NO	IKU	Tahun 2022		Capaian (%)	Kategori
		Target	Realisasi		
1	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	403,3M	463,6M	114,95%	Sangat Berhasil

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Adapun realisasi capaian indikator kinerja utama pada “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” tahun 2022 adalah Rp. 463,6 M dengan target Rp. 403,3 M. Dilihat dari capaian tersebut yang melebihi target, maka persentase capaian dari indikator tersebut adalah 114,95% dengan kategori “Sangat Berhasil”. Adapun formulasi perhitungan untuk IKU ini adalah sebagai berikut :

Formulasi : Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) (Rp)

(b) Perbandingan Realisasi Tahun 2021 dan Tahun 2022

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.73
Perbandingan Realisasi Tahun 2022
dengan Target dan Realisasi Tahun 2021

NO	IKU	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)	365,1 M	997,6M	403,3M	463,6M

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Jika dilihat dari capaian realisasi IKU “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” pada tahun 2021 dan tahun 2022, realisasi yang diraih selalu melebihi target yang ditetapkan. Hal ini berarti pada tahun 2021 dan tahun 2022 persentase capaian IKU “Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)” selalu melebihi 100% dan mendapatkan kategori sangat berhasil. Apabila dibandingkan realisasi IKU tahun 2021 dan tahun 2022 akan terlihat seperti berikut :

(Jumlah investasi 2022 – Jumlah investasi 2021)

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah investasi 2021}}{\text{Jumlah investasi 2022} - \text{Jumlah investasi 2021}} \times 100\% \\ & = \frac{\text{Rp. 997.633.820.052}}{\text{Rp. 463.620.026.645} - \text{Rp. 997.633.820.052}} \times 100\% \\ & = - 0.53 \% \end{aligned}$$

Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Perindustrian (DPMPTP) selama tahun 2021 dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 jika digambarkan dalam bentuk grafik akan terlihat seperti berikut :

Grafik 3.19
Peningkatan Investasi Daerah



Nilai realisasi yang dicapai sekarang sudah mencapai target rencana investasi yang ditetapkan oleh RPJMD, hal ini dikarenakan adanya kegiatan rutin yang dilakukan oleh DPMPTP yaitu kegiatan pengawasan dan kegiatan pembinaan ke pelaku usaha. Tetapi

capaian nilai realisasi investasi tahun 2022 turun dari tahun 2021, disebabkan adanya kegiatan proyek strategis nasional yang terhenti seperti terhentinya pengerjaan jalan tol dan beberapa pelaku usaha Terkendala dalam pengurusan perizinan seperti masih sering terjadinya kendala/masalah pada aplikasi OSS (Online Single Submission) dan adanya kendala dalam proses pengurusan tata ruang pelaku usaha, dll.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (IKU DPMPTP) adalah: jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA), mencapai realisasi Rp 463.620.026.645,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Juta dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dengan persentase capaian 87% dari target yang ditetapkan Rp. 403,300.000.000,- (Empat Ratus Tiga Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan realisasi investasi perusahaan baik PMA maupun PMDN.

(c) Faktor Penghambat dan Pendukung Pencapaian IKU

Meningkatkan Nilai Investasi karena terjadinya peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang sebabkan oleh faktor pendukung sebagai berikut :

- Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung.
- Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah.
- Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha.

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah :

- Masih adanya pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami tentang proses perizinan secara elektronik,
- Rendahnya tingkat kemampuan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM.

(d) Perbandingan Realisasi PMDN/PMA Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2022

Nilai realisasi yang dicapai pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan jenis Data Realisasi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Jumlah Tahun 2021 adalah Rp. 5.161.169.300.000,- dengan PMDN (Rp. 4.183.713.900,-) dan PMA (Rp. 977.455.400.000,-) Sedangkan Jumlah Tahun 2022 Rp. 3.931.966.580.000,- dengan PMDN (Rp. 2.559.750.700,-) dan PMA (Rp.1.372.215.880.000,-)

Dapat dilihat Pertumbuhan Investasi pada Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat adalah -23,82 dengan jenis Data Realisasi Investasi PMA (Penanaman Modal Asing) 42,83 dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) -38,82 per tanggal 25 Januari 2023.

(e) **POTENSI MENUNJANG INVESTASI**

1. Pengelolaan Sentra IKM Coklat Malibau Anai lokasi Nagari Guguak Kec. 2x11 Kayu Tanam Perkiraan nilai investasi Rp. 7.400.000.000 dengan sarana prasarana nilai investasi Sudah ada Gedung Produksi, Gedung Serbaguna, Gedung UPT, IPAB/IPAL, jalan lingkung, areal perkebunan kakao, area parkir, drainase, fasilitas sanitasi, mesin produksi, dan listrik.

Gambar 3.145

Pengelolaan Sentra IKM Coklat Malibau Anai lokasi Nagari Guguak Kec. 2x11 Kayu Tanam



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Dermaga Wisata Muara Anai lokasi Nagari Kataping Kec. Batang Anai dengan nilai investasi Rp. 71.243.700.000 dengan sarana penunjang Akses jalan, listrik, didekat Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Gambar 3.146 Dermaga Wisata Muara Anai



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Wisata Alam (Resort) dan Real Estate/Perhotelan/Convention Hall Di kawasan Tarok City lokasi Korong Tarok Nagari Kepala Hilalang Kec. 2x11 Kayu Tanam nilai investasi Rp. 150 M sarana penunjang Air bersih, listrik, jalan.

Gambar 3.147**Wisata Alam (Resort) dan Real Estate/Perhotelan/Convention Hall**

Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4. Tambak Udang Vaname lokasi Kec. Batang Gasan, Batang Anai, Nan Sabaris, Ulakan Tapakis, Sungai Limau dengan nilai investasi 150 M sarana penunjang Akses jalan.

Gambar 3.148**Tambak Udang Vaname**

Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2022

5. Kawasan Terpadu Wisata Tiram lokasi Nagari Tapakih Kec. Ulakan Tapakih dengan nilai investasi Rp. 30 M sarana penunjang Akses jalan, listrik, dekat BIM

Gambar 3.149
Wisata Tiram



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(e) Program dan Kegiatan Penunjang IKU

Dalam pencapaian realisasi kinerja, terdapat beberapa program yang mendukung pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan Nilai Investasi di Padang Pariaman adalah :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Dengan Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah dengan target yang di tetapkan yaitu 2 dokumen sedangkan pagu Anggaran Rp. 8.145.000 dan Terealisasi 2 dokumen dan realisasi anggaran Rp. 7.977.950 serta Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan target 1 dokumen, dan 2 kegiatan dan pagu Anggaran Rp 40.000.000 1 dokumen, dan 2 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 39.790.900. Adapun kegiatan penunjang Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal yaitu :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten dan Kota dengan sub kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
 - Faktor pendukung kegiatan :
 - ✓ Ketersediaan anggaran
 - ✓ Dukungan drake holder terkait
 - ✓ Adanya Referensi
 - Faktor penghambat kegiatan :
 - ✓ Adanya Perubahan regulasi
 - ✓ Ketersediaan Anggaran

- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
 - Faktor pendukung kegiatan :
 - ✓ Tersedianya dan telah ditetapkannya dokumen-dokumen pendukung seperti Dokumen RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan dokumen pendukung lainnya.
 - ✓ Partisipasi Perangkat Daerah Teknis dalam mengikuti FGD dan Rapat Koordinasi penyusunan RUPMK.
 - ✓ Dukungan Lembaga Akademis dalam merumuskan penyusunan RUPMK. Arahan dari perwakilan Kemenkumham dalam menetapkan RUPMK.
 - ✓ Sarana dan prasarana pendukung kegiatan (Ruang Rapat Representatif).
 - Faktor penghambat kegiatan :
 - ✓ Belum tersedianya beberapa dokumen pendukung.
 - ✓ Rendahnya minat Perangkat Daerah Teknis dalam mengikuti FGD penyusunan RUPMK.
 - ✓ Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.

Yang menjadi faktor pendukung dari Program iklim penanaman modal dan pencapaian ini diantaranya adalah :

- Terlaksananya kegiatan fasilitasi Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha yang bersumber dari Dana DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun 2022
- Tersedianya data peluang investasi, lebih sering mengadakan sosialisasi pentingnya melaporkan LKPM
- Mengajukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan untuk tahun 2023
- Peningkatan kegiatan usaha sektor perumahan, sektor industri dan sektor usaha distribusi BBM.

Sedangkan yang menjadi hambatan diantaranya adalah :

- Belum berjalan efektifnya sistem perizinan OSS berbasis RBA, sehingga berdampak pada terkendalanya penyampaian LKPM oleh beberapa pelaku usaha.
- Permasalahan kesesuaian Ruang untuk beberapa rencana investasi yang akan dikembangkan di Kabupaten Padang Pariaman.
- Keterbatasan SDM yang memahami tentang teknis pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dinas untuk kegiatan dimaksud.
- Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan realisasi investasinya kedalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- Peralihan aplikasi terkait LKPM yang mana saat ini menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) dimana masih banyak pelaku usaha tidak paham terkait tata cara penginputannya.
- Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Target pelaksanaan kegiatan promosi sebanyak 4 (empat) kali tidak dapat dilaksanakan yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

- Kurang tersedianya data peluang investasi yang sudah memiliki kajian ilmiah
- Minimnya ketersediaan anggaran untuk mengakomodir kebutuhan kegiatan.
- Tidak bisanya kita mengikuti kegiatan promosi investasi diakhir tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Sumatera Barat, yang disebabkan oleh tidak tersedia lagi anggaran pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya untuk target 1 (satu) dokumen sudah dilaksanakan sesuai target yaitu berupa 1 (satu) dokumen audio visual promosi investasi.

Terlaksananya pembuatan dokumen Audio Visual tersebut didukung oleh faktor pendukung sebagai berikut :

- Tersedianya dokumen cetak peluang investasi daerah yang sudah disusun sebelumnya.
- Dukungan dari OPD teknis terkait dalam memberikan informasi terkait dengan sektor potensi investasi. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah adanya beberapa sektor peluang investasi yang belum terekspose dalam pembuatan audio visual karena kecilnya anggaran kegiatan.

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Untuk mewujudkan Pelaksanaan program ini ada 4 Kegiatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 141.779.221,- dengan realisasi anggaran Rp. 141.301.742 dengan capaian sebesar 99,66%. Kegiatan pendukung indikator program adalah:

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota dengan sub kegiatan:
 - ✓ Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan NonPerizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrrasi Secara Elektronik.

- ✓ Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal.
- ✓ Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah.

Adapun Faktor pendukung keberhasilan program ini adalah :

- Pemberian Pelayanan prima kepada masyarakat.
- Inovasi dan pelayanan secara Online.
- Koordinasi yang Intensif dengan lembaga penyedia Aplikasi OSS agar pelayanan perizinan berjalan lancar.
- Pemenuhan sarana dan prasarana untuk memperlancar dan mempermudah pelayanan perizinan.

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah :

- Masih sering terjadi kendala pada Aplikasi OSS
- Fasilitasi Pelayanan yang masih Kurang
- Kurangnya sarana dan Prasarana untuk penunjang pelayanan
- Banyaknya pelaku usaha yang melanggar aturan yang di tetapkan pemerintah Daerah dan Pusat
- Masyarakat masih belum memahami dan mengerti pentingnya Perizinan hanya yang mengurus izin yang berkepentingan dengan urusan bank baru mereka mengurus izin serta prosedur kepengurusannya namun mereka juga enggan pula bertanya
- Terbatasnya anggaran dalam operasional kelengkapan untuk melakukan pengawasan dengan OPD Teknis
- Bimbingan teknis Personil yang mempunyai sertifikat BKPM RI

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pelaksanaan Program ini dialokasikan anggaran DAK NON FISIK sebesar Rp.443.394.000 terealisasi sebesar Rp. 442.011.900,-.Kegiatan Program yang mendukung adalah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Faktor pendukung sebagai berikut :

- Sistem perizinan secara elektronik menggunakan aplikasi OSS/OSS RBA memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk mengakses dan memproses izin secara mandiri/langsung.
- Telah dilaksanakannya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis tentang sistem pelaksanaan dan pengendalian penanaman modal/Investasi di daerah.

- Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan dilapangan kepada pelaku usaha.

Sedangkan Faktor Penghambat diantaranya adalah :

- Masih adanya pelaku usaha khususnya UMKM yang belum memahami tentang proses perizinan secara elektronik,
- Rendahnya tingkat kemampuan penggunaan teknologi oleh pelaku UMKM.

Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia, kita masih dapat melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat/pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian DPMPTP yang masih bisa meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB dengan kategori nilai (A-) menjadi nilai (A) “Pelayanan Prima”.

Dengan segala keterbatasan baik anggaran, sarana prasarana dan sumber daya manusia yang tersedia, kita masih dapat melakukan pelayanan yang baik terhadap masyarakat/pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian DPMPTP yang masih bisa meningkatkan kualitas pelayanan dengan mendapatkan penghargaan Evaluasi Pelayanan Publik dari KemenPANRB dengan kategori nilai (A-) menjadi nilai (A) “Pelayanan Prima”.

(f) Penghargaan Tahun 2022

Terdapat beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTP) adalah sebagai Berikut :

1. Piagam Penghargaan diberikan kepada DPM-PTSP Kabupaten Padang Pariaman sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Lingkup DPM-PTSP Kabupaten/ Kota Tahun 2022 Pada 06 Desember 2022 oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Gambar 3.150

Piagam Penghargaan DPM-PTSP Kabupaten Padang Pariaman sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima



Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Penyerahan Piagam Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Tahun 2022 oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Gambar 3.151**Penyerahan Piagam Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Tahun 2022**

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Penghargaan Kepada DPMPTP oleh Bupati Padang Pariaman dengan Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022 Pada Ulang Tahun Kabupaten Padang Pariaman Tanggal 11 Januari 2023.

Gambar 3.152**Penyerahan Piagam Oleh Bupati Kabupaten Padang Pariaman Hasil Kepatuhan Penyelenggaraan Standard Pelayanan Publik Kategori Pelayanan Prima Tahun 2022**

Sumber : DPMPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

4. Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang pariaman Tahun 2022 dengan Nilai 89,06.

Gambar 3.153
Penyerahan Piagam Hasil Publikasi Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)



Sumber : DPMPPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

(f) Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Penunjang IKU

Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko bagi pelaku usaha di kabupaten Padang Pariaman.

Gambar 3.154
Bimbingan Teknis /Sosialisasi Perizinan berusaha dan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko



Sumber : DPMPPTP Kabupaten Padang Pariaman, 2022

2. Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengimputan LKPM untuk melaporkan realisasi investasinya kedalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

Gambar 3.155
Pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengimputan LKPM



Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3. Pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam pengurusan izin dan peralihan aplikasi terkait LKPM yang mana saat ini menggunakan aplikasi OSS (Online Single Submission) dimana masih banyak pelaku usaha tidak paham terkait tata cara pengimputannya.

Gambar 3.156
Pendampingan terhadap pelaku usaha yang mengalami permasalahan dalam pengurusan izin dan peralihan aplikasi terkait LKPM



Sumber : DPMPPT Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022, pagu dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagai berikut :

Tabel 3.74
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022			
Uraian	Pagu	Realisasi	Capaian
Pendapatan Daerah	Rp. 1.376.652.314.082,00	Rp. 1.348.628.168.796,46	97,96%
Belanja Daerah	Rp. 1.407.999.184.315,00	Rp. 1.314.912.192.338,42	93,39%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 1.376.652.314.082,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.348.628.168.796,46 (97,96%) sedangkan dilihat dari aspek belanja daerah di targetkan sebesar Rp. 1.407.999.184.315,00 dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.314.912.192.338,42 dengan persentase mencapai realisasi 93,39%. Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.75
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022

NO	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 125.989.378.436,00	Rp. 126.243.892.462,46	100,20%
2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.206.070.909.646,00	Rp. 1.191.493.250.334,00	98,79%
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 44.592.026.000,00	Rp. 30.891.026.000,00	69,27%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 125.989.378.436,00 mampu terealisasi sebesar Rp. 126.243.892.462,46 (100,20%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.76.

Tabel 3.76
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	Rp. 50.600.000.000,00	Rp. 50.121.822.881,24	99,05%
2	Pendapatan Restribusi Daerah	Rp. 2.213.000.000,00	Rp. 2.472.939.567,00	111,75%
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 7.214.956.413,00	Rp. 7.214.956.413,00	100,00%
4	Lain-lain PAD yang Sah	Rp. 65.961.422.023,00	Rp. 66.434.173.601,22	100,72%
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		Rp. 125.989.378.436,00	Rp. 126.243.892.462,46	100,20%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.3.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Desa (DID) Dan Dana Desa
2. Pendapatan Transfer antar daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Pendapatan Transfer pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.1.206.070.909.646,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.191.493.250.334,00 (98,79%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.77
Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp. 1.137.908.313.913,00	Rp. 1.116.029.110.626,00	98,08%
2	Dana perimbangan	Rp. 1.041.818.348.913,00	Rp. 1.019.939.145.626,00	97,90%
3	Dana Insentif Daerah(DID)	Rp. 1.317.667.000,00	Rp. 1.317.667.000,00	100,00%
4	Dana Desa	Rp. 94.772.298.000,00	Rp. 94.772.298.000,00	100,00%
5	Pendapatan Transferantar daerah	Rp. 68.162.595.733,00	Rp. 75.464.139.708,00	110,71 %
6	Pendapatan Bagi Hasil	Rp. 68.162.595.733,00	Rp. 75.464.139.708,00	110,71 %
7	Bantuan Keuangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Jumlah Pendapatan Transfer		Rp. 1.206.070.909.646,00	Rp. 1.191.493.250.334,00	98,79%

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dana lain-lain pendapatan yang sah pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 44.592.026.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp. 30.891.026.000,00 (69,27%). Adapun gambaran perbandingan antara target dan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.78
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
1	Pendapatan Hibah	Rp. 44.592.026.000,00	Rp. 30.891.026.000,00	69,27 %
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	0,00%
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		Rp. 44.592.026.000,00	Rp. 30.891.026.000,00	69,27 %

Sumber : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2022

3.4 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

No	Tahun	Nama Penghargaan	Tingkat	Instansi/ Lembaga Penyelenggara
1	2021	Penghargaan kategori Dukcapil BISA sebagai apresiasi atas kinerja terbaik, dedikasi yang tinggi, komitmen yang kuat dan konsisten dalam mengemban dan menjalankan tugas memberikan pelayanan ADM kependudukan tahun 2020	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
2	2021	Penghargaan K.I.A Madya	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
3	2021	Penghargaan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia (APPI) Award 2021	Nasional	Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
4	2021	Penghargaan Best Tourism Nasional ASITA 2021	Nasional	Association Of The Indonesia Tour And Travel Agencies (ASITA)
5	2021	Penghargaan Desa Wisata Nyarai Dalam 300 Besar Desa Wisata Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021	Nasional	Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
6	2021	Penghargaan Smart City Kategori Smart Branding Gerakan Menuju Smart City	Nasional	Kementerian Komunikasi Dan Informatika
7	2021	Penghargaan Kepala Daerah Peduli Keberlanjutan ZCD	Nasional	Badan Amil Zakat Nasional
8	2021	Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2021	Nasional	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
9	2022	Penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Lingkup Disdukcapil Kabupaten/Kota Tahun 2022	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia

10	2022	Penghargaan Zona Integritas sebagai unit pelayanan berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)	Nasional	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia
11	2022	Penghargaan Innovation Government Award Tahun 2022	Nasional	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
12	2022	Penghargaan Peringkat 1 Kabupaten Kota Terinovatif tingkat Sumatera Barat	Provinsi	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
13	2022	Penghargaan Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022	Provinsi	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

**PENGHARGAAN BEST
TOURISM NATIONAL ASITA**



PENGHARGAAN K.I.A MADYA



**PENGHARGAAN ANUGRAH PRATAMA
PERKEBUNAN INDONESIA (APPI) 2021**



**ANUGERAH DESA
WISATA INDONESIA 2021**



**PENGHARGAAN KATEGORI
DUKCAPIL BISA 2021**



**PENGHARGAAN KEPALA DAERAH
PEDULI KEBERLANJUTAN ZCD**



**PENGHARGAAN SMART CITY
TAHUN 2021**



**PENGHARGAAN WAJAR TANPA
PENGECCUALIAN (WTP) 2021**



**PENGHARGAAN PENGELENGGARA
PELAYANAN PUBLIK KATEGORI
“PELAYANAN PRIMA” TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN INNOVATION
GOVERNMENT AWARD TAHUN 2022**



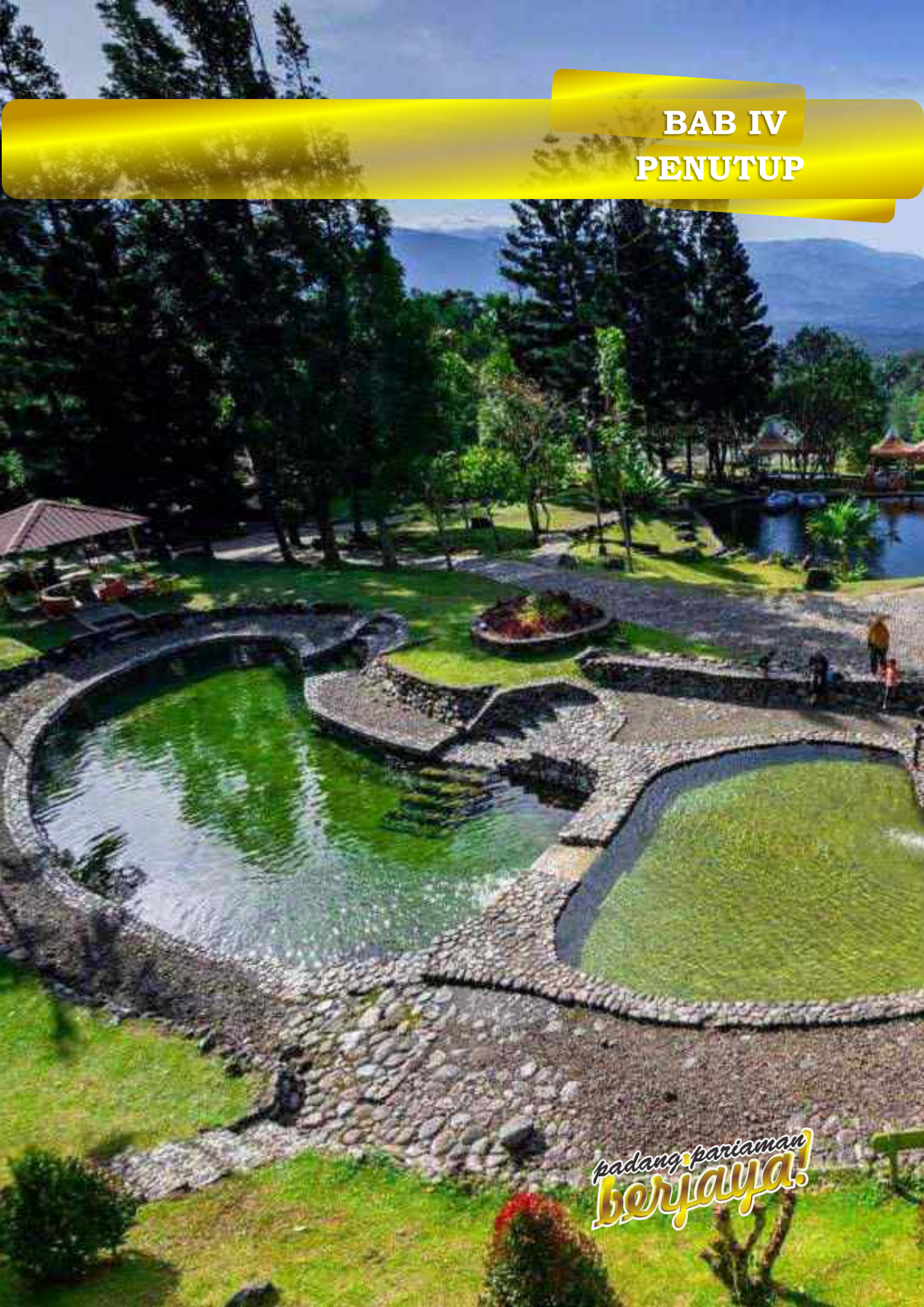
**PENGHARGAAN REDIKAT
KEPATUHAN STANDAR
PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022**



**PENGHARGAAN PERINGKAT 1
KABUPATEN KOTA TERINOVATIF
TAHUN 2022**



BAB IV PENUTUP



*padang pariwisata
berjaya!*

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Secara umum Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategis sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap capaian kinerja (*Performance Results*) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 menggambarkan bahwa hampir semua dapat dipenuhi dan secara umum mencerminkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dari 19 (sembilan belas) Sasaran Strategis, 24 (dua puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil pengukuran seluruh sasaran, telah dapat direalisasikan dengan sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja diatas 90% sesuai target. Secara rinci pencapaian indikator kinerja utama dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Terdapat 12 (Duabelas) indikator (50%) dengan Kategori sangat berhasil, antara lain :
 - Indikator Kinerja Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang Menghasilkan Hafizh/Hafizhah dengan realisasi 27,02% dari target 27% ;
 - Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik dengan realisasi 69,47% dari target 58,72% ;
 - Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW dengan realisasi 69,57% dari target 68,00% ;
 - Indikator Kinerja Kontribusi Ekonomi Pertanian / Perkebunan Terhadap PDRB dengan realisasi Rp. 2,845,588.2 (Juta) dari target Rp. 2,796,247.14 (Juta) ;
 - Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB dengan realisasi 10,44% dari target 8,58% ;
 - Indikator Kinerja Tingkat Kemiskinan dengan realisasi 6,25% dari target 6,99% ;

- Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka realisasi 6,60% dari target 7,15% ;
 - Indikator Kinerja Indeks SPBE dengan realisasi nilai indeks sebesar 2,60 dari target nilai indeks sebesar 2,44 ;
 - Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik dengan realisasi nilai indeks sebesar 4,65 dari target nilai indeks sebesar 4,56 ;
 - Indikator Kinerja Angka Usia Harapan Hidup dengan realisasi capaian 69,34 tahun dari target 68,99 tahun ;
 - Indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dengan realisasi 0,72% dari target 3,39% ;
 - Indikator Kinerja Jumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) dengan realisasi 463,6 M dari target 403,3 M.
2. Terdapat 9 (Sembilan) indikator (37,5%) dengan Kategori berhasil, antara lain :
- Indikator Kinerja Persentase Penegakkan Perda dengan realisasi 59,29% dari target sebesar 65% ;
 - Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender dengan realisasi nilai indeks sebesar 92,78 dari target nilai indeks sebesar 93,60 ;
 - Indikator Kinerja Persentase Tingkat Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang dengan realisasi 62,02% dari target 67% ;
 - Indikator Kinerja PDRB/Income Per Kapita dengan realisasi *42,62 Juta dari target 46,98 Juta ;
 - Indikator Kinerja Harapan Lama Sekolah dengan realisasi 13,93% dari target 13,97% ;
 - Indikator Kinerja Opini WTP Atas Laporan Keuangan Daerah dengan realisasi WTP dari target WTP ;
 - Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekolah dengan realisasi B dari target BB ;
 - Indikator Kinerja Persentase Rumah Tangga yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dengan realisasi 72,05% dari target 90% ;
 - Indikator Kinerja Nagari Tangguh Bencana dengan realisasi 16 Nagari dari target 16 Nagari.
3. Terdapat 2 (dua) indikator (8,33%) dengan Kategori kurang berhasil yaitu :
- Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB dengan realisasi sebesar 6,87% dari target sebesar 12,6% ;
 - Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan realisasi 1,97% dari target seharusnya sebesar 18,85%.
4. Terdapat 1 (satu) indikator (4,17%) dengan kategori N/A (Belum Tersedia Data) yaitu indikator kinerja Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nilai LPPD).

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman didukung dengan adanya alokasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2022 sebesar Rp. 1.407.999.184.315,00 dengan capaian realisasi 93,39 % dan Anggaran Pendapatan Daerah dengan besaran Rp. 1.376.652.314.082,00 dengan realisasinya 97,96 %.

4.2 RENCANA PERBAIKAN

Adanya pencapaian realisasi untuk beberapa indikator yang belum memenuhi target kinerja, hal ini tidak terlepas dari beberapa hambatan dan kendala. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan langkah kongkrit melalui analisis dan evaluasi baik internal dan eksternal agar dapat dilakukan perbaikan dimasa mendatang. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan melakukan upaya akselerasi untuk pencapain tahun berikutnya, dan akan menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan, sehingga resiko kegagalan dapat ditekan dan dicarikan solusi untuk mengatasinya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Padang Pariaman. Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman ini, secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dimasa akan datang.

LAMPIRAN



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Pemerintah Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- b. bahwa dengan ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Padang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi.

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja.

BAB II
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 3

IKU Perangkat Daerah untuk :

- a. perencanaan Jangka Menengah;
- b. perencanaan Tahunan dan Anggaran;
- c. penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- e. evaluasi kinerja Perangkat Daerah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Pasal 4

IKU di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Bupati ini:

- a. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman melakukan review dan evaluasi atas pelaksanaan IKU di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman melakukan evaluasi atas capaian kinerja Indikator Kinerja Utama setiap Perangkat Daerah dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

BAB III
KETENTUAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita DaPerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUNATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 55

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 55 TAHUN 2021
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Sumber Data	SKPD Pengelola
1.	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan kebudayaan	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah (IKU)	<i>(Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran yang menghasilkan hafiz dan hafizah) / (Jumlah Lembaga Pendidikan Alquran" keseluruhan) x 100 %</i>	DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN	SKPD Pengelola DISDIKBUD SETDA (KESRA), KECAMATAN
2.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Penegakan Perda (IKU)	<i>(Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan) / (Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang di laporkan dan dipantau) x 100 %</i>	SATPOL-PP DAMKAR	SATPOL-PP DAMKAR
3.	Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks Pembangunan Gender (IKU)	<i>(IPM Perempuan) / "IPM Laki-laki"</i>	DINSOS P3A	DINSOS P3A
4.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang (IKU)	<i>(Panjang jalan memenuhi kondisi jaringan jalan baik dan sedang) / ("Panjang jaringan " jalan kabupaten) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
5.	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (IKU)	<i>(Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik) / "Luas irigasi Kabupaten" x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR
6.	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase ketataan terhadap RTRW (IKU)	<i>(Realisasi RTRW) / ("Rencana Peruntukan) x 100 %</i>	DINAS PUPR	DINAS PUPR

7.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkeburuan terhadap PDRB (IKU)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	BPS	DISTAN- KP, DISNAKESWAN
8.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	BPS	DISDAGNAKER KOP & UKM
9.	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (IKU)	$(\text{Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan}) / (\text{Nilai PDRB Kabupaten}) \times 100 \%$	DPMPPTP	DPMPPTP
10.	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Miskin}) / (\text{Jumlah Penduduk seluruhnya}) \times 100 \%$	BPS	DINSOS P3A
11.	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita (IKU)	$(\text{Nilai PDRB}) / (\sum \text{penduduk}) \times 100 \%$	BPS	SEKRETARIAT DAERAH BAG. EKONOMI
12.	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IKU)	$\sum \text{UPLM} / (\text{ALM}) \times 100 \%$ UPLM = Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat UPLM 1 = Indeks Kepuasa Masyarakat Layanan Kepustakaan UPLM 2 = Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	DISKEARPUS	DISKEARPUS

			<p>UPLM 3 = Persentase Kemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat</p> <p>UPLM 4 = Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk</p> <p>UPLM 5 = Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan</p> <p>ALM = Aspek Literasi Masyarakat (jumlah UPLM)</p> <p>Lamanya sekolah (dalam Tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang</p>		<p>DISDIKBUD</p>
13.	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah (IKU)		$\frac{\text{(Jumlah Pengangguran) / (Jumlah angkatan kerja)}}{100 \%} \times$	BPS
14.	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka (IKU)		Penilaian opini Laporan Keuangan daerah oleh BPK	BPS
15.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan (IKU) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB (IKU)		<p>Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten dari Kemenpan RB</p>	<p>SELURUH PERANGKAT DAERAH</p> <p>SELURUH PERANGKAT DAERAH</p>
16.	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD (IKU) Indeks E-Government / SPBE (IKU)	<p>Nilai LPPD hasil penilaian Kemendagri</p>	Indeks SPBE hasil Penilaian Kemenpan RB	<p>BAGIAN TPKS</p> <p>DISKOMINFO</p>
17.	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik (IKU)	<p>Indeks Pelayanan Publik hasil penilaian Kemenpan RB</p>		<p>BAGIAN ORGANISASI</p> <p>SEKRETARIAT DAERAH</p>

18.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup (IKU)	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	BPS	DINKES/RSUD
19.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (IKU)	$(\text{Jumlah Penduduk Tahun } n - \text{Jumlah Penduduk tahun } (n-1)) / \text{Jumlah Penduduk}$	BPS	DPPKB
20.	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (IKU)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan * / jumlah total rumah tangga * x 100 %	DPUPR	DPUPR
21.	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana (IKU)	Jumlah Nagari tangguh bencana	BPBD	BPBD
22.	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (IKU)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)	DPMPTP	DPMPTP





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUHATRI BUR
Jabatan : Bupati Padang Pariaman

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Parit Malintang, 3 Januari 2022
BUPATI PADANG PARIAMAN



SUHATRI BUR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang menghasilkan Hafizh/Hafizah	27%
2	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda	65%
		Indeks Pembangunan Gender	93.60
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase tingkat kondisi jaringan jalan kabupaten baik dan sedang	67%
4	Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	58.72%
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Penencariaan Tata Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	68%
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi pertanian/perkebunan terhadap PDRB	2.796.247,14 (juta)
		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	8.58%
		Kontribusi Ekonomi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	12.60%
7	Berkurangnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	6.99%
8	Peningkatan daya beli masyarakat	PDRB/Income Per Kapita	46.98 Juta
9	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18.85
10	Peningkatan Mutu Pendidikan	Harapan lama sekolah	13,97 Tahun
11	Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing	Tingkat Pengangguran Terbuka	7.15%
12	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP
		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Hasil Evaluasi Kemenpan RB	B
		Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ LPPD	2.700 (tinggi)
13	Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)	Indeks E-Government /SPBE	2.44
14	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Pelayanan Publik	4.56
15	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	68,90 Tahun
16	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	3.39%
17	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%
18	Penguatan layanan kebencanaan	Nagari tangguh bencana	16 Nagari
19	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	403,3 Milyar

No	Program	Anggaran
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3,235,686,020
2	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 442,949,830
3	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 71,484,120
4	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 20,000,000
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 70,000,000
6	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 91,050,920,595
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 10,060,743,392
8	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 9,746,451,076
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 3,362,053,590
10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 4,021,070,710
11	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 3,869,096,389
12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 158,521,500
13	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 53,578,450
14	program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Rp 316,237,355
15	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 523,259,520
16	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 191,999,010
17	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 19,999,850
18	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 40,000,000
19	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 29,989,800
20	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 50,000,000
21	Program Pengembangan Ekspor	Rp 20,049,800
22	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 49,999,900

23	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp	49,529,700
24	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	32,200,000
26	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	Rp	30,000,000
26	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	400,800,000
27	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	17,800,000
28	Program Pengembangan UMKM	Rp	68,000,000
29	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	75,000,000
30	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	17,233,857,000
31	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	86,514,000
32	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	685,790,100
33	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	214,810,800
34	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Rp	40,000,000
35	program pengelolaan pendidikan	Rp	103,723,427,310
36	program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Rp	191,334,100
37	program penempatan tenaga kerja	Rp	50,048,324
38	program hubungan industrial	Rp	78,000,000
39	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	942,472,066
40	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	552,989,438
41	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	358,589,750
42	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	182,909,846,256
43	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1,144,414,700
44	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp	676,640,000

45	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	233,110,000
46	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	18,137,217,300
47	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	257,800,000
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	739,815,833,991
49	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp	242,394,000
50	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp	294,008,700
51	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp	28,524,000
52	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	72,371,030
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	37,068,300
54	Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Rp	764,812,315
55	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	28,895,150
56	Program Penyelenggaraan Statistik Sektorai	Rp	36,915,440
57	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	746,812,315
58	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	150,309,320
59	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	29,289,068,780
60	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	18,000,000
61	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan, Dan Makanan Minuman	Rp	232,426,200
62	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	334,450,000
63	Program Pengendalian Penduduk	Rp	211,345,000
64	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	4,436,574,400
65	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	1,964,580,000
66	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	8,061,028,800

66	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	8.061.028.800
67	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.482.016.200
68	Program Pengembangan Ilmu Penanaman Modal	Rp.	50.180.000
69	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	40.000.000
70	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	139.804.221
71	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	4.433.940.000
72	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	10.030.000
	JUMLAH	Rp.	1.248.505.689.913

Pari Malintang, 3 Januari 2022

BUPATI PADANG PARAHMAN



SUHATRI BUR

**Matrix Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran Indikator Kinerja	Rumus Pengukuran Kinerja	Kinerja Realisasi %	Program	Pagu	Anggaran		Keterangan
									Realisasi	%	
1	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya	Persentase Lembaga Pendidikan Alqur'an yang menghasilkan Hafizh / Hafizah	27%	Persentase lembaga pendidikan yang menghasilkan hafizh / hafizah	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	27,02%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 3.126.376.920	Rp 2.578.909.595	82,49%	
2	Peningkatan ketertarikan, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Penegakan Perda Indeks Pembangunan Gender	65.00% 93.60	Persentase pelaksanaan dan penegakan perda IPM Perempuan/PTM laki-laki	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$ $\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	91,20% 99,12%	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Program Pelembagaan Pengrusutamaan Gender (PO) pada Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota	Rp 13.234.780.523	Rp 27.092.200	12,642.411.202 99,69%	95,52% 99,04%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kecepatan Infrastruktur Transportasi	Persentase Tingkat Kondisi Jerngan Jalan Kabupaten Baik dan Sedang	67.00%	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	62,02%	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 63.565.810.401	Rp 55.571.639.806	87,42%	
4	Meningkatnya Infrastruktur-Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	58.72%	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	69,47%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp 13.413.804.084	Rp 11.697.956.846	87,20%	
5	Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keataan terhadap RTRW	68.00%	Persentase keataan terhadap RTRW	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	69,57%	Program Penataan Bangunan Gedung Penataan Ruang	Rp 1.2504.021.712	Rp 12.054.242.210	96,40%	
6	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata	Kontribusi ekonomi Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	Rp. 2,796,247,14 (juta)	Nilai PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	101,76%	Program Penyediaan dan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian dan Pemangulangan Bencana Pertanian Program Perikanan Usaha Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Penyuluhan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 1.714.918.230 Rp 3.556.918.550 Rp 133.921.400 Rp 3.985.000 Rp 291.233.343 Rp 355.359.520 Rp 206.967.010 Rp 19.999.850 Rp 40.000.000 Rp 29.989.800 Rp 479.16.200	Rp 1.708.191.111 Rp 3.188.860.690 Rp 133.642.950 Rp 3.985.000 Rp 288.375.144 Rp 355.548.020 Rp 206.303.010 Rp 19.999.850 Rp 39.150.500 Rp 29.849.800 Rp 46.446.500	99,61% 89,65% 99,79% 100% 99,01% 99,49% 99,68% 100% 97,88% 99,53% 96,93%	
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8.58%	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100$	10,44%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 29.989.800	Rp 29.849.800	99,53%	



**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH**

Tahun 2023